

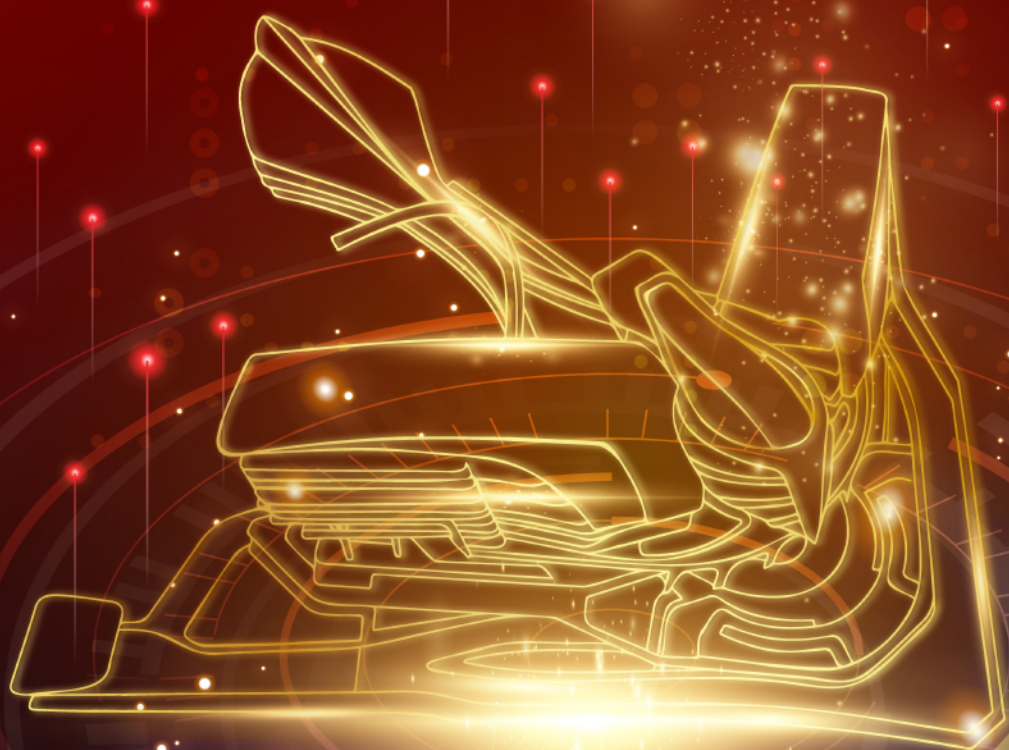


BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KELEMBAGAAN BANK INDONESIA

PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG,
SERTA CAPAIAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Triwulan IV 2024

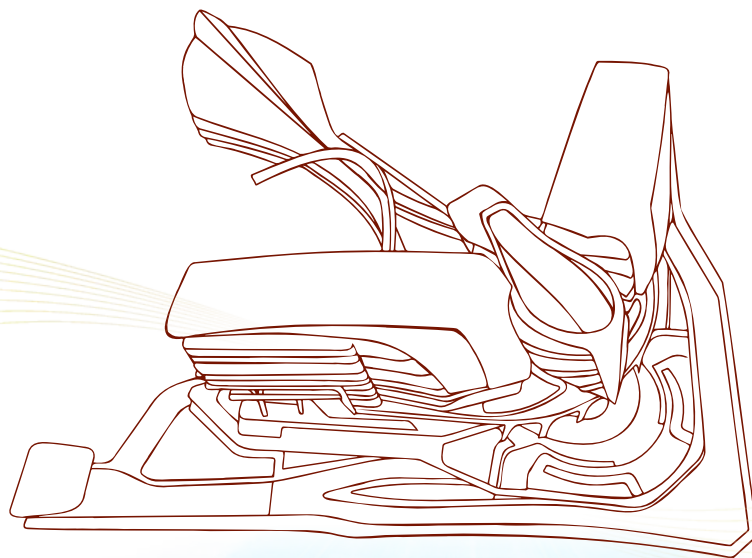


KOORDINASI, AKUNTABILITAS, DAN TRANSPARANSI
Memperkuat Transformasi Kebijakan dan Kelembagaan
untuk Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Nasional

LAPORAN KELEMBAGAAN BANK INDONESIA

PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG,
SERTA CAPAIAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

TRIWULAN IV 2024



Laporan Kelembagaan Bank Indonesia - Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang, serta Capaian Program dan Indikator Kinerja Utama Bank Indonesia adalah laporan kinerja kelembagaan yang disusun sebagai pemenuhan kewajiban akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia yang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

DAFTAR ISI



Kata Pengantar	iv
Ringkasan Eksekutif	viii
BAB 1 Kelembagaan Bank Indonesia	1
1.1. Profil Bank Indonesia	2
1.2. Dewan Gubernur Bank Indonesia	3
1.3. Organisasi Bank Indonesia	10
1.4. Daftar Pemimpin Satuan Kerja Bank Indonesia	14
BAB 2 Lingkungan Strategis Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia	19
2.1. Lingkungan Strategis Perekonomian Global dan Nasional	20
2.2. Lingkungan Strategis Kebijakan dan Kelembagaan	23
BAB 3 Respons Kebijakan Bank Indonesia	27
3.1. Stance Kebijakan Bank Indonesia	28
Boks 1. Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2024	29
3.2. Respons Bauran Kebijakan Bank Indonesia	31
BAB 4 Transformasi Bank Indonesia	35
4.1. Transformasi Kebijakan	36
Boks 2. Peluncuran <i>Blueprint</i> Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030	44
4.2. Transformasi Organisasi dan Proses Kerja	48

BAB 5 Capaian Kinerja Bank Indonesia	55
PS 01. Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter dan Bauran Kebijakan Bank Indonesia Secara Berkelanjutan, Konsisten, dan Transparan untuk Mencapai Stabilitas Nilai Rupiah dalam rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	56
PS 02. Memperkuat Sinergi Bauran Kebijakan Bank Indonesia dengan Kebijakan Fiskal dan Reformasi Struktural Pemerintah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	59
PS 03. Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan serta Surveilans Makroprudensial untuk Turut Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	61
PS 04. Memperkuat Sinergi Kebijakan serta Pengawasan Makroprudensial dengan KSSK dan Otoritas Terkait untuk Turut Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam Rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	63
Boks 3. Hasil Rapat Berkala KSSK Triwulan IV 2024	64
Boks 4. Peluncuran Buku Kajian Stabilitas Keuangan dan Kalkulator Hijau	65
PS 05. Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Percepatan Ekonomi Keuangan Digital untuk Memelihara Stabilitas Sistem Pembayaran dalam rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	66
Boks 5. Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2024	69
PS 06. Memperkuat Sinergi Kebijakan dan Pengawasan Bank Indonesia dengan Pemerintah, KSSK, dan Otoritas Terkait untuk Percepatan Ekonomi dan Keuangan Digital serta Pengelolaan Uang Rupiah dalam rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	70
PS 07. Mengatur, Mengawasi, dan Mengembangkan Pasar Uang dan Pasar Valas untuk Mendukung Efektivitas Kebijakan Bank Indonesia serta Memperkuat Sinergi dengan Otoritas Terkait untuk Pengembangan Pasar Keuangan dan Pembiayaan Ekonomi	71
Boks 6. Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE-IT!) 2024	74
PS 08. Merumuskan Kebijakan dan Melaksanakan Program Bank Indonesia serta Memperkuat Sinergi untuk Meningkatkan Inklusi Ekonomi Keuangan, Keuangan Berkelanjutan, dan Pelindungan Konsumen Baik secara Konvensional maupun Berdasarkan Prinsip Syariah	75
Boks 7. Indonesia <i>Sharia Economic Festival</i> (ISEF) 2024	76
Boks 8. Komitmen Bersama Edukasi Pelindungan untuk Konsumen yang Berdaya melalui Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK)	81
PS 09. Merumuskan Kebijakan dan Melaksanakan Kerjasama Internasional dengan Bank Sentral, Organisasi, dan Lembaga Internasional untuk Mendukung Efektivitas Kebijakan Bank Indonesia serta Bersinergi dengan Pemerintah dan Otoritas Lain dalam rangka Memperjuangkan Kepentingan Nasional	83
Boks 9. Pertemuan Tahunan <i>World Bank</i> dan IMF	86
PS 10. Merumuskan Kebijakan dan Mengelola Sistem Tata Kelola Kelembagaan yang Baik untuk Memperkuat Kinerja Kelembagaan	87
PS 11. Merumuskan Kebijakan, Mengembangkan, dan Mengelola Proses Kerja, Sumber Daya Manusia, Peraturan dan Ketentuan, serta Laporan dan Komunikasi untuk Menjamin Tercapainya Kinerja Kelembagaan secara Efisien, Profesional, Taat Hukum, Akuntabel, dan Transparan	88
PS 12. Merencanakan, Mengembangkan, dan Mengelola Teknologi dan Inovasi Digital serta Sarana dan Prasarana Kerja untuk Menjamin Tercapainya Kinerja Kelembagaan yang Modern, Produktif dan Efektif	91
Lampiran	95
Daftar Istilah	96
Daftar Singkatan	104

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya Bank Indonesia dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang serta Capaian Program dan Indikator Kinerja Utama Bank Indonesia periode triwulan IV 2024. Sebagai bagian dari Laporan Kelembagaan Bank Indonesia, laporan ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Laporan ini disusun sebagai perwujudan dari komitmen Bank Indonesia untuk menjadi bank sentral yang kredibel dalam mencapai tujuannya secara efektif, efisien, dan taat asas, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pada triwulan IV 2024, ketidakpastian pasar keuangan global masih berlanjut di tengah divergensi pertumbuhan ekonomi dunia yang melebar. Perekonomian AS diprakirakan tumbuh lebih kuat, didorong oleh stimulus fiskal dan investasi teknologi yang meningkatkan produktivitas. Pertumbuhan ekonomi AS yang solid serta kebijakan fiskal ekspansif menahan laju penurunan *Fed Funds Rate* (FFR) dan menjaga *yield* US *Treasury* tetap tinggi. Sebaliknya, ekonomi Eropa, Tiongkok, dan Jepang masih melemah akibat menurunnya keyakinan konsumen dan tertahannya produktivitas. Bersamaan dengan ketegangan geopolitik yang meningkat, perkembangan tersebut menyebabkan makin besarnya preferensi investor global untuk memindahkan portofolionya ke AS. Kondisi ini menyebabkan indeks mata uang dolar AS naik tinggi sehingga meningkatkan tekanan depresiatif terhadap berbagai mata uang dunia. Di penghujung tahun 2024, kebijakan *America First* kembali mengemuka yang dapat menyebabkan perubahan besar pada lanskap geopolitik dan perekonomian dunia ke depan.

Meskipun dihadapkan pada dinamika ketidakpastian global yang tinggi, perekonomian Indonesia tetap tumbuh baik didukung oleh bauran kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2024 tetap

baik dan lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya. Kendati nilai tukar Rupiah selama triwulan IV 2024 masih mengalami tekanan, laju depresiasi Rupiah lebih rendah daripada laju depresiasi pada berbagai mata uang lain di kawasan.

Dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis global dan domestik tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan berkelanjutan, bersinergi erat dengan bauran kebijakan ekonomi nasional. Kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan, sementara kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, dan kebijakan lain tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan. Selama triwulan IV 2024, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga kebijakan, yaitu BI-Rate, pada level 6,00%. Keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter dalam mengendalikan laju inflasi sesuai sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2024 dan 2025. Sementara itu, kebijakan makroprudensial longgar melalui insentif likuiditas untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan, kebijakan digitalisasi sistem pembayaran, dan kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing terus diperkuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah sejalan dengan program-program dalam Asta Cita dan kerjasama internasional untuk memitigasi dampak rambatan memburuknya risiko global.

Bank Indonesia terus mempertajam agenda transformasi untuk mendukung pencapaian tujuan sebagaimana amanat UU P2SK. Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia meluncurkan *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030 untuk menavigasi arah pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) yang modern dan maju. Selain itu, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Kebijakan Makroprudensial (PBI KMP) sebagai tindak lanjut PBI Bauran Kebijakan Bank Indonesia (BKBI), menyelesaikan *Proof of Concept* (PoC) Rupiah Digital untuk tahap pertama, serta melanjutkan

reformasi pengaturan PUVA melalui penerbitan 3 (tiga) Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG). Di area kelembagaan, Bank Indonesia menetapkan pokok-pokok ketentuan internal tentang Bauran Kebijakan Kelembagaan (BKK) yang mengintegrasikan dukungan organisasi, sumber daya, dan tata kelola Bank Indonesia. Transformasi digital terus dilanjutkan, termasuk pengembangan dan perluasan fitur BI-FAST, guna meningkatkan kualitas dan menjaga ketersediaan layanan BI-FAST kepada masyarakat.

Walaupun dihadapkan pada lingkungan strategis yang sangat menantang, pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia dapat mencapai berbagai target Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai tahapannya serta memberikan dampak yang signifikan dan bermakna bagi perekonomian Indonesia. Capaian ini menunjukkan efektivitas respons kebijakan Bank Indonesia yang didukung oleh penajaman sejumlah agenda

transformasi di berbagai area, termasuk dalam rangka menindaklanjuti amanat UU P2SK dan memanfaatkan pesatnya digitalisasi.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak sehingga Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas mulia dalam menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kami berharap Laporan Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang, serta Capaian Program dan Indikator Kinerja Utama Bank Indonesia Triwulan IV 2024 ini dapat menjadi rujukan terpercaya bagi masyarakat dan seluruh pihak terkait dalam menyusun langkah bersama untuk memajukan perekonomian Indonesia. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan keberkahan, kesempurnaan, dan kemudahan bagi setiap langkah kita untuk mewujudkan ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional.

Jakarta, Maret 2025

Gubernur Bank Indonesia

Perry Warjiyo



AIDA S. BUDIMAN
Deputi Gubernur

DONI PRIMANTO JOEWONO
Deputi Gubernur

PERRY WARJIYO
Gubernur

DESTRY DAMAYANTI
Deputi Gubernur Senior

JUDA AGUNG
Deputi Gubernur

FILIANINGSIH HENDARTA
Deputi Gubernur

RINGKASAN EKSEKUTIF

Lingkungan Strategis Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia

Pada triwulan IV 2024, divergensi pertumbuhan ekonomi dunia melebar dan ketidakpastian pasar keuangan global berlanjut. Perekonomian Amerika Serikat (AS) tumbuh lebih kuat dari prakiraan didukung oleh stimulus fiskal dan kenaikan investasi di bidang teknologi. Sementara itu, ekonomi Eropa, Tiongkok, dan Jepang masih lemah dipengaruhi oleh menurunnya keyakinan konsumen dan tertahannya produktivitas, sedangkan ekonomi India masih tertahan akibat sektor manufaktur yang terbatas. Arah kebijakan Pemerintah dan bank sentral AS turut mempengaruhi ketidakpastian pasar keuangan global, dimana kuatnya ekonomi AS serta dampak kebijakan tarif menahan proses disinflasi dan berdampak pada menguatnya ekspektasi bahwa penurunan *Fed Funds Rate* (FFR) akan lebih terbatas. Kebijakan fiskal AS yang lebih ekspansif juga mendorong *yield* US *Treasury* tetap tinggi. Perkembangan tersebut, disertai dengan meningkatnya ketegangan geopolitik, mendorong preferensi investor global untuk memindahkan portofolionya ke AS sehingga memperkuat indeks mata uang dolar AS dan menambah tekanan pelemahan terhadap berbagai mata uang dunia.

Di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi, kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2024 lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 mencapai 5,03% (yoy) dan pada 2025 diprakirakan akan berada dalam kisaran 4,8–5,6%. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia terus mengoptimalkan bauran kebijakannya untuk tetap menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di tengah ketidakpastian global, nilai tukar Rupiah tetap terkendali didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia. Meskipun nilai tukar Rupiah pada triwulan IV 2024 masih mengalami tekanan, laju depresiasi Rupiah lebih rendah daripada laju depresiasi mata uang sejumlah negara lain, seperti won Korea, peso Mexico, real Brasil,

yen Jepang, dan lira Turki. Sementara itu, stabilitas harga terjaga sebagaimana tecermin pada laju inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2024 yang tercatat 1,57% (yoy), lebih rendah daripada laju inflasi pada September 2024 sebesar 1,84%. Bank Indonesia terus mengoptimalkan instrumen moneter *pro-market*, yaitu Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sekuritas Utang Valas Bank Indonesia (SUVBI), untuk memperkuat upaya penguatan stabilitas nilai tukar Rupiah dan pencapaian sasaran inflasi.

Lebih lanjut, peran kredit/pembiayaan pada triwulan IV 2024 dalam mendukung pertumbuhan ekonomi tetap kuat dan ketahanan sistem keuangan tetap terjaga. Pertumbuhan kredit pada akhir triwulan IV 2024 mencapai 10,39% (yoy), relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan pada akhir triwulan III 2024 yang mencapai 10,85%. Realisasi kredit tersebut berada dalam kisaran prakiraan Bank Indonesia 10–12%. Ketahanan sistem keuangan pada triwulan IV 2024 juga terjaga dengan baik, didukung oleh likuiditas perbankan yang memadai, rasio kecukupan modal yang tinggi, dan risiko kredit yang terkendali. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap tumbuh didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Pada akhir triwulan IV 2024, volume transaksi pembayaran digital² tercatat tumbuh 36,1% (yoy). Dari sisi infrastruktur, stabilitas sistem pembayaran tecermin pada penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) yang lancar dan andal serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah Terdepan, Terluar, Terpencil (3T).

Bank Indonesia juga terus mencermati perubahan lingkungan strategis yang memerlukan penguatan respons dan transformasi kebijakan dan kelembagaan termasuk tindak lanjut implementasi UU P2SK, mitigasi dampak negatif rambatan global, serta optimalisasi pemanfaatan digitalisasi. UU P2SK memperkuat landasan hukum bagi tujuan Bank Indonesia dan mempertegas kewenangan Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing, pengaturan lalu lintas devisa, Rupiah digital, dan pengawasan transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar. Sementara itu, meningkatnya dampak negatif rambatan global menekankan pentingnya bauran kebijakan bank sentral, khususnya bauran kebijakan moneter dan makroprudensial. Bauran kebijakan bank sentral tersebut perlu dirumuskan ke dalam kerangka kerja dan pengaturan sebagai acuan dalam merumuskan respon yang diperlukan sesuai dengan dinamika perekonomian global dan nasional yang berkembang. Bauran kebijakan ekonomi nasional juga sangat diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional dari dampak ketidakpastian global yang meningkat dan prospek pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat. Bauran kebijakan ekonomi nasional dimaksud mencakup kebijakan fiskal dan sektor riil oleh Pemerintah, kebijakan moneter dan makroprudensial oleh Bank Indonesia, serta kebijakan stabilitas sistem keuangan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Selanjutnya, sinergi dalam digitalisasi ekonomi keuangan nasional diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia berperan penting dalam mempercepat digitalisasi di Indonesia melalui digitalisasi pembayaran, bersinergi dengan Pemerintah, KSSK, dan Asosiasi Sistem Pembayaran (ASPI). Di sisi kelembagaan, Bank Indonesia mempercepat transformasi digital proses bisnis kebijakan dan kelembagaan secara terintegrasi, yang dikenal dengan *Integrated Digital Central Banking* (IDCB). Transformasi digital secara bertahap

dan menyeluruh dilakukan untuk mewujudkan visi Bank Indonesia menjadi bank sentral digital terdepan.

Respons Kebijakan Bank Indonesia

Bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2024 difokuskan untuk memperkuat stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan, didukung oleh sinergi yang erat dengan bauran kebijakan ekonomi nasional. Pada awal tahun 2024, kebijakan moneter difokuskan pada upaya menjaga stabilitas (*pro-stability*). Namun sejak September 2024 kebijakan moneter mulai diseimbangkan antara stabilitas (*pro-stability*) dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*). Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*). Sepanjang triwulan IV 2024, Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate pada level 6,00%. Keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalnya inflasi dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sementara itu, kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Di bidang sistem pembayaran, kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan, khususnya sektor perdagangan dan UMKM, dengan memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran.

Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program-program dalam Asta Cita. Koordinasi ini mencakup upaya menjaga stabilitas ekonomi, moneter, nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan termasuk memastikan kestabilan nilai Rupiah, penguatan kebijakan moneter dan fiskal termasuk dalam pembelian SBN di pasar sekunder, dukungan

² Pembayaran digital terdiri atas transaksi melalui aplikasi *mobile* dan internet.

ketahanan pangan sejalan dengan upaya pengendalian inflasi, serta dukungan pembiayaan ekonomi melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk sektor-sektor prioritas. Selain itu, Bank Indonesia mendukung akselerasi transformasi digital Pemerintah melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Sinergi juga diperkuat dengan KSSK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, serta pada kerja sama internasional dalam sistem pembayaran, transaksi mata uang lokal, dan promosi investasi serta perdagangan di sektor prioritas.

Transformasi Bank Indonesia

Bank Indonesia terus mempertajam agenda transformasi untuk mendukung pencapaian tujuan sebagaimana diamanatkan UU P2SK. Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia telah menerbitkan PBI No. 13 Tahun 2024 tentang Kebijakan Makroprudensial (PBI KMP) sebagai tindak lanjut atas PBI No. 4 Tahun 2024 tentang Bauran Kebijakan Bank Indonesia (BKBI). Selain itu, Bank Indonesia telah menyelesaikan *Proof of Concept* (PoC) Rupiah Digital untuk tahap pertama *immediate state – wholesale cash ledger* dan melanjutkan rangkaian transformasi pengaturan Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA) melalui penerbitan tiga PADG sebagai peraturan pelaksanaan dari PBI No 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PBI PUVA). Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia juga meluncurkan *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030 untuk menavigasi arah pendalaman PUVA yang modern dan maju, guna mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pembiayaan ekonomi nasional.

Di area kelembagaan, Bank Indonesia telah menetapkan pokok-pokok ketentuan internal tentang Bauran Kebijakan Kelembagaan (BKK) yang mengintegrasikan tiga lingkup kelembagaan yakni dukungan organisasi, sumber daya, dan tata kelola. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah melakukan pengembangan kerangka pengelolaan proses bisnis dan fungsi organisasi yang terintegrasi dengan BKK, serta menyusun perencanaan SDM jangka menengah termasuk strategi pemenuhan SDM. Terkait transformasi digital, Bank Indonesia telah melakukan pengembangan dan perluasan fitur BI-FAST dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjaga ketersediaan layanan BI-FAST kepada masyarakat.

Capaian Kinerja Bank Indonesia

Di tengah beratnya tantangan akibat meningkatnya dampak negatif rambatan global termasuk tindak lanjut implementasi UU P2SK dan cepatnya digitalisasi, Bank Indonesia dapat mencapai berbagai target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada triwulan IV 2024 sesuai tahapannya dan memberikan dampak yang signifikan dan bermakna bagi perekonomian Indonesia. Capaian ini menunjukkan efektivitas respons kebijakan Bank Indonesia terhadap perkembangan ekonomi dan lingkungan strategis terkini, didukung oleh penajaman sejumlah agenda transformasi, baik di area kebijakan maupun kelembagaan. Selain itu, berbagai upaya penguatan kerangka dan implementasi sistem tata kelola yang baik dan profesional juga turut mendukung pencapaian kinerja Bank Indonesia.





Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan

BAB 1

Kelembagaan Bank Indonesia

1.1. Profil Bank Indonesia

Status dan Kedudukan

Keberadaan Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia telah diamanatkan dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945. Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia memasuki babak baru ketika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan berlaku pada 17 Mei 1999 yang kemudian beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang berlaku sejak 12 Januari 2023. Undang-undang ini memperkuat status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain.

Dalam menjalankan independensinya, Bank Indonesia terus berkomitmen untuk mengutamakan prinsip tata kelola yang

baik dan profesional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang. Sebagai perwujudan dari tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional, Bank Indonesia mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKBTBI) selama 21 tahun berturut-turut. Hal ini merupakan pembuktian atas komitmen Bank Indonesia untuk mengelola keuangan dengan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik dan menyajikan laporan keuangan yang relevan, akuntabel, dan transparan. Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia menyampaikan laporan kinerja kelembagaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Presiden, serta memublikasikannya kepada masyarakat

Tujuan dan Tugas

Tujuan Bank Indonesia, yang tercantum dalam Pasal 7 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU P2SK, adalah: (i) mencapai stabilitas nilai Rupiah; (ii) memelihara stabilitas Sistem Pembayaran; dan (iii) turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam upaya mencapai tujuan dimaksud, Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas: (i) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan; (ii) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; serta (iii) menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial.

Kebijakan moneter Bank Indonesia bertujuan untuk menjaga dan memelihara stabilitas nilai Rupiah. Stabilitas nilai Rupiah mencakup kestabilan harga barang dan jasa serta kestabilan nilai tukar Rupiah. Kestabilan harga barang dan jasa secara umum diukur dari inflasi yang rendah dan stabil. Sementara itu, kestabilan nilai tukar Rupiah diukur dari kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai Rupiah dalam artian inflasi yang rendah dan stabil, serta kestabilan nilai tukar Rupiah sangat penting bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menetapkan sasaran inflasi secara eksplisit dan diumumkan secara transparan untuk memberikan sinyal kepada masyarakat dan pelaku pasar mengenai komitmen bank sentral dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat kepercayaan publik.

Dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia memastikan seluruh perangkat pengaturan, lembaga, dan mekanisme pemindahan dana berjalan lancar untuk memenuhi setiap kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. Teknologi digital dan inovasi kini telah memungkinkan perkembangan sistem pembayaran yang nyaman, cepat, dan efisien serta membuka lebar peluang inklusivitas ekonomi keuangan. Tren digitalisasi tersebut mempengaruhi sendi-sendi perekonomian, mengubah pola transaksi masyarakat, baik individu maupun korporasi, dan mendisrupsi fungsi-fungsi konvensional, tidak terkecuali di sektor keuangan. Hal ini menjadi tantangan

kebijakan bagi otoritas, khususnya Bank Indonesia, dalam mencari titik keseimbangan yang tepat antara upaya mengoptimalkan peluang yang diusung oleh inovasi digital dengan upaya untuk memitigasi risiko. Oleh karena itu, Bank Indonesia menginisiasi Visi Sistem Pembayaran Indonesia dan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2030 yang diharapkan dapat memberikan arah yang jelas, guna memperoleh manfaat dari digitalisasi dengan tetap menjamin terlaksananya mandat Bank Indonesia dalam pengedaran uang, moneter, dan stabilitas sistem keuangan.

Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui upaya mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan; memitigasi dan mengelola risiko sistemik; serta mendorong inklusi ekonomi dan keuangan serta keuangan berkelanjutan. Dengan semakin berkembangnya sistem keuangan, Bank Indonesia terus mengembangkan instrumen-instrumen kebijakan makroprudensial sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia, bersama dengan kebijakan moneter dan kebijakan sistem pembayaran.

1.2. Dewan Gubernur Bank Indonesia

Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas: Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan 4 (empat) hingga 7 (tujuh) Deputi Gubernur. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Gubernur menyelenggarakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam menetapkan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang bersifat prinsipil dan strategis. Dalam kaitan ini, RDG dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur. Setiap anggota Dewan Gubernur mempunyai hak suara yang sama. Pengambilan keputusan oleh Dewan Gubernur di dalam RDG dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat dengan menerapkan prinsip kolektif kolegial. Keputusan Dewan Gubernur dalam RDG merupakan keputusan Bank Indonesia dan mengikat seluruh anggota Dewan Gubernur.

Saat ini Dewan Gubernur Bank Indonesia terdiri atas Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan 4 (empat) Deputi Gubernur dengan profil sebagai berikut:

Visi

Menjadi Bank Sentral Digital Terdepan dengan Tata Kelola Kuat, yang Berkontribusi Nyata terhadap Perekonomian Nasional dan Terbaik di antara Negara *Emerging Markets* untuk Indonesia Maju

Misi

- 01 Mencapai stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- 02 Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang Rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- 03 Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- 04 Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional.
- 05 Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional.
- 06 Turut meningkatkan inklusi ekonomi keuangan dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program Bank Indonesia.
- 07 Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.



Perry Warjiyo
Gubernur

PERRY WARJIYO menjabat kembali sebagai Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P Tahun 2023 tanggal 5 Mei 2023, dan diambil sumpahnya pada 24 Mei 2023 untuk masa jabatan 2023-2028. Sebelumnya, Perry Warjiyo menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2018-2023 dan sebagai Deputy Gubernur untuk masa jabatan 2013-2018.

Sebelum menduduki jabatan Deputy Gubernur, Perry Warjiyo menjabat sebagai Asisten Gubernur Bank Indonesia untuk perumusan kebijakan moneter, makroprudensial, dan internasional. Jabatan ini diembannya setelah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia sejak 2009. Sebelum kembali ke Bank Indonesia pada Juli 2009, Perry Warjiyo menduduki posisi penting selama dua tahun sebagai Direktur Eksekutif di *International Monetary Fund* (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam the *South-East Asia Voting Group* (SEAVG), yang berkedudukan di Washington DC, AS. Perry Warjiyo mempunyai karier yang panjang di Bank Indonesia sejak 1984, khususnya di area riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset kebanksentralan, pengelolaan devisa, dan utang luar negeri.

Perry Warjiyo saat ini juga menduduki posisi sebagai *Chair of Asian Consultative Council* – Bank for International Settlement (ACC-BIS), *Chairman of Executive Committee*

(EC) - *Islamic Financial Service Board* (IFSB), Ketua Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), dan Ketua Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Selain itu, Perry Warjiyo juga mewakili Bank Indonesia dan Indonesia dalam Keketuaan *The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dan *G20 Finance Ministers and Central Bank Governors* (FMCBG) Meeting, serta di *International Monetary Fund* (IMF), ASEAN, ASEAN+3, *Financial Stability Board* (FSB), *Islamic Development Bank* (IsDB), dan *Islamic International Liquidity Management* (IILM). Selama tahun 2020-2022, Perry Warjiyo aktif menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada, di samping sebagai dosen tamu pada sejumlah universitas di dalam dan luar negeri.

Perry Warjiyo juga telah menulis dan memublikasikan sejumlah buku, jurnal, dan makalah di bidang ekonomi, moneter, dan isu Internasional. Salah satu bukunya, yaitu "*Central Bank Policy: Theory and Practice*" yang ditulis bersama Dr. Solikin M. Juhro mendapat pengakuan nasional dan internasional sebagai referensi penting dalam perumusan bauran kebijakan bank sentral.

Perry Warjiyo dilahirkan di Sukoharjo pada tahun 1959. Gelar Sarjana diraih dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1982. Gelar Master dan Ph.D. di bidang Moneter dan Keuangan Internasional diperoleh dari Iowa State University, AS, masing-masing pada tahun 1989 dan 1991.



Destry Damayanti
Deputi Gubernur Senior

DESTRY DAMAYANTI resmi menjabat Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019 untuk periode 2019-2024, dan mengucapkan sumpah jabatan pada 7 Agustus 2019. Melalui Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2024 tanggal 10 Juli 2024 Destry Damayanti kembali ditetapkan menjadi Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia untuk periode 2024-2029, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 7 Agustus 2024. Sebelum menjabat sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti menjabat sebagai Anggota Dewan Komisiner LPS periode 2015-2019. Selain menjabat sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti juga menjabat sebagai Anggota Dewan Komisiner (*ex-officio*) Bank Indonesia pada LPS sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 58/M Tahun 2020 tanggal 3 September 2020.

Destry Damayanti mengawali kariernya sebagai peneliti dan pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1987-1990. Selanjutnya, Destry Damayanti bekerja di Kementerian Keuangan selama

periode 1992-1997. Pada tahun 1997-2000, Destry Damayanti menjadi ekonom di Citibank yang kemudian diteruskan menjadi *Senior Economic Advisor* Duta Besar Inggris untuk Indonesia pada tahun 2000 - 2003. Kariernya sebagai ekonom berlanjut sebagai Kepala Ekonom di Mandiri Sekuritas dan Bank Mandiri selama periode 2005-2015 dan sekaligus sebagai Direktur Eksekutif untuk Mandiri Institute.

Selama tahun 2014 - 2015, Destry juga menjabat sebagai Ketua *Task Force* Ketahanan Ekonomi pada Kementerian BUMN. Pada tahun 2015, Destry Damayanti dipercaya oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua Tim Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019.

Destry Damayanti dilahirkan di Jakarta pada tahun 1963. Gelar Sarjana Ekonomi diraih dari Universitas Indonesia dan gelar Master of Science pada *Field of Regional Science* diraih dari *Cornell University*, New York, AS, pada tahun 1992.



Doni Primanto Joewono
Deputi Gubernur

DONI PRIMANTO JOEWONO menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78/P Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 11 Agustus 2020. Selain itu, Doni Primanto Joewono juga dilantik menjadi Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (*Ex-Officio*) Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 51/P Tahun 2022 tanggal 9 Mei 2022 dan mengucapkan sumpah jabatan pada 20 Juli 2022.

Doni Primanto Joewono memulai kariernya di Bank Indonesia pada tahun 1991 di Departemen Pengelolaan Moneter dan banyak terlibat dalam membangun sistem pengelolaan moneter, termasuk mempersiapkan terbitnya Obligasi Pemerintah, dan membangun sistem pelaporan Lalu Lintas Devisa. Doni Primanto Joewono pernah ditugaskan sebagai Peneliti Ekonomi Senior (Deputi Direktur) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia London (2005-2008). Kariernya berlanjut dengan memimpin beberapa Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah, dimulai di Solo, kemudian di Provinsi DKI Jakarta, dan terakhir di Provinsi Jawa Barat. Selama kariernya di daerah, Doni Primanto Joewono bersama kepala daerah setempat pernah mendapat penghargaan sebagai TPID terbaik, yaitu saat di Solo (2012) dan DKI Jakarta (2017), serta banyak menginisiasi berbagai kegiatan

untuk mendorong investasi daerah dan pemberdayaan ekonomi pondok pesantren. Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono mengemban tugas sebagai Kepala Departemen Sumber Daya Manusia pada tahun 2020.

Selama perjalanan kariernya di Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono aktif memimpin dan memberdayakan organisasi, yaitu sebagai Ketua Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS periode 2016-2021 dan terpilih kembali untuk periode 2021-2026, serta menjadi Wakil Ketua Ikatan Alumni UNS (2021-2024).

Doni Primanto Joewono lahir di Surabaya pada tahun 1965. Pendidikan formalnya ditempuh pada bidang Ekonomi Studi Pembangunan di Universitas Sebelas Maret (UNS) pada tahun 1988 untuk gelar Sarjana, serta bidang Administrasi dan Pengembangan SDM di Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2004 untuk gelar Magister. Doni Primanto Joewono mengikuti program kepemimpinan tertinggi di Bank Indonesia - SESPIBI pada tahun 2012 dan Program Pendidikan LEMHANNAS pada tahun 2018 serta beragam program eksekutif kepemimpinan dan pengembangan kompetensi moneter dan pasar keuangan di beberapa lembaga internasional (antara lain IMF dan SEACEN).



Juda Agung
Deputi Gubernur

JUDA AGUNG menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No.147/P Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 6 Januari 2022 dengan masa jabatan 2022-2027.

Memulai karier di Bank Indonesia pada tahun 1991, Juda Agung memiliki pengalaman yang panjang melalui sejumlah penugasan, mulai dari bidang kebijakan moneter, makroprudensial, dan manajemen strategis, hingga Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung menjabat sebagai Asisten Gubernur yang membawahi stabilitas sistem keuangan dan kebijakan makroprudensial di Bank Indonesia. Jabatan tersebut diembannya setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Eksekutif di *International Monetary Fund* (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam the

South-East Asia Voting Group (SEAVG), berkedudukan di Washington D.C., AS.

Sebagai ekonom, Juda Agung telah memublikasikan sejumlah artikel di bidang moneter, finansial, dan perbankan pada berbagai jurnal internasional, antara lain *Applied Economics* dan *Review of International Economics*. Salah satu publikasi yang baru saja diterbitkan oleh Juda Agung adalah buku "Kebijakan Makroprudensial di Indonesia: Konsep, Kerangka, dan Implementasi."

Juda Agung lahir di Pontianak pada tahun 1964. Setelah menempuh pendidikan pada bidang Teknologi Pertanian di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987, Juda Agung melanjutkan pendidikan di University of Birmingham dan mendapatkan gelar Master di bidang *Money Banking and Finance* pada tahun 1995. Juda Agung kemudian melanjutkan pendidikan di University of Birmingham dan mendapatkan gelar Ph.D. di bidang *Economics* pada tahun 1999.



Aida S. Budiman
Deputi Gubernur

AIDA S. BUDIMAN resmi menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No.147/P Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 6 Januari 2022 dengan masa jabatan sampai tahun 2027. Selain itu, Aida S. Budiman juga dilantik menjadi Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (*Ex-Officio*) Bank Indonesia masa jabatan 2024 hingga 2025, berdasarkan Keputusan Presiden RI No.101/P Tahun 2024 tanggal 11 September 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisiner LPS.

Aida S. Budiman memulai kariernya di Bank Indonesia pada tahun 1991, dan selama perjalanannya telah mengumpulkan pengalaman yang luas melalui berbagai penugasan. Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman menjabat sebagai Asisten Gubernur yang membawahi kebijakan strategis di sektor moneter, mengoordinasikan bauran kebijakan Bank Indonesia dan sinergi dengan bauran kebijakan nasional selama periode 2020-2022. Jabatan tersebut diemban setelah menjadi Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) periode 2018-2022 dan juga Kepala Departemen Internasional periode 2014-2018. Selama memimpin DKEM, Aida S. Budiman berperan dalam penguatan kerangka bauran kebijakan Bank Indonesia, perumusan sektor prioritas

untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, penguatan peran kantor perwakilan Bank Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah, serta penguatan peran digitalisasi UMKM pangan dalam mendukung stabilisasi harga.

Aida S. Budiman juga aktif terlibat di berbagai keanggotaan baik pada forum lintas kementerian dan/atau lembaga maupun dalam organisasi profesional, serta mengajar di berbagai diklat Bank Indonesia dan Sesmenlu. Di kancah internasional, Aida S. Budiman sering mewakili Bank Indonesia dalam berbagai sidang internasional dan *working group* untuk perumusan kebijakan internasional baik bilateral, regional, maupun multilateral, serta pernah bertugas sebagai Wakil Direktur Eksekutif SEAVG, IMF Washington DC, AS.

Aida S. Budiman lahir di Bogor pada tahun 1965. Setelah menempuh pendidikan pada bidang Sosial-Ekonomi Pertanian Agribisnis di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987, Aida S. Budiman melanjutkan pendidikan di *University of Southern California* dan mendapatkan gelar Master di bidang *Economics* pada tahun 1996. Aida S. Budiman kemudian melanjutkan pendidikan di Claremont Graduate University dan mendapat gelar Ph.D. di bidang *Economics* pada tahun 2001.



Filianingsih Hendarta
Deputi Gubernur

FILIANINGSIH HENDARTA ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21/P Tahun 2023 tanggal 15 Maret 2023, dan diambil sumpahnya pada 18 April 2023 untuk masa jabatan 2023-2028.

Filianingsih Hendarta memulai kariernya di Bank Indonesia pada tahun 1986. Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur, Filianingsih berperan sebagai Asisten Gubernur bidang sistem pembayaran yang memimpin transformasi sistem pembayaran nasional. Filianingsih merupakan figur kunci dalam peluncuran Proyek Garuda, yang mengawali eksplorasi desain *Central Bank Digital Currency* (CBDC) Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai Rupiah Digital. Filianingsih juga memimpin implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025, yang bertujuan untuk mempercepat transformasi dan integrasi ekonomi serta keuangan digital guna meningkatkan inklusi ekonomi dan keuangan di Indonesia.

Dengan pengalaman lebih dari 36 tahun di hampir seluruh sektor di Bank Indonesia, Filianingsih telah memimpin berbagai proyek berskala nasional dan internasional, serta mewakili Bank Indonesia di berbagai forum internasional. Atas dedikasi dan prestasinya, ia dipercaya menduduki beberapa posisi strategis, termasuk Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (2019-2023), Kepala

Departemen Kebijakan Makroprudensial (2015-2019), serta Kepala Departemen Pengelolaan Moneter (2013-2015).

Filianingsih Hendarta terlibat aktif dalam berbagai forum lintas Kementerian/Lembaga di tingkat domestik maupun internasional. Filianingsih Hendarta berperan dalam berbagai forum, antara lain Penyusunan Regulasi dan Keuangan Digital dan Elektronifikasi Lintas Kementerian/Lembaga, serta berbagai komite internal Bank Indonesia. Di kancah internasional, Filianingsih Hendarta acapkali mewakili Bank Indonesia dalam berbagai fora, seperti G20, BIS, FSB, IMF, World Bank, ECB, dan EMEAP.

Filianingsih Hendarta lahir di Surabaya pada tahun 1963. Setelah menempuh pendidikan pada bidang Hukum di Universitas Airlangga, Filianingsih Hendarta melanjutkan pendidikan di Boston University dan mendapatkan gelar *Master of Business Administration (Economics and Finance)* pada tahun 1992. Filianingsih Hendarta juga pernah aktif terlibat sebagai pengurus pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) *Focus Group* Moneter dan Makroprudensial pada tahun 2018 - 2021. Saat ini, Filianingsih Hendarta menjabat sebagai Wakil Ketua 1 - Dewan Kehormatan Pengurus Ikatan Alumni Universitas Airlangga periode tahun 2021-2025.

1.3. Organisasi Bank Indonesia

Struktur Organisasi Bank Indonesia

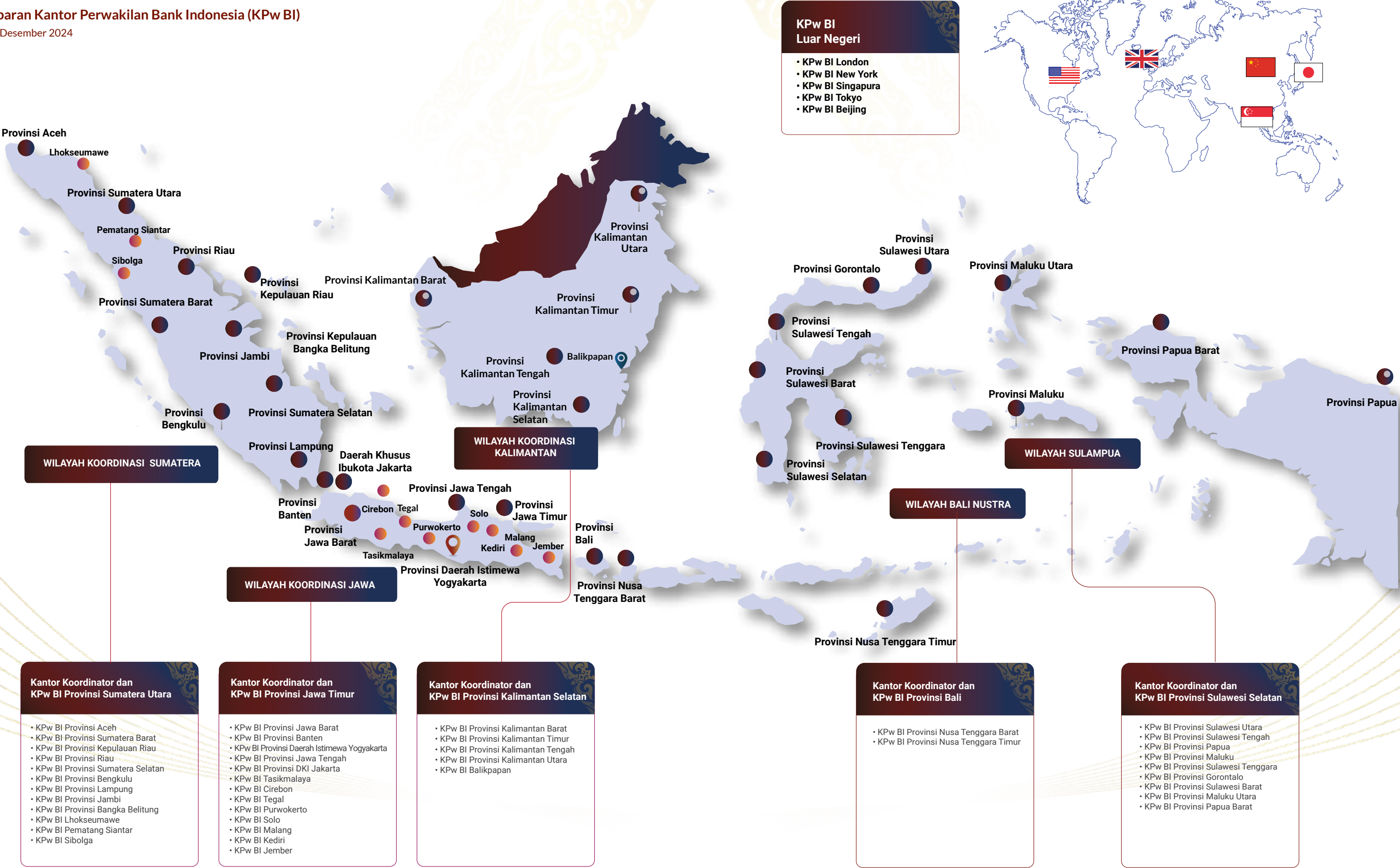
Per Desember 2024



Keterangan:
¹⁾ Komite adalah organ pendukung pengambilan keputusan yang bertanggung jawab melakukan perumusan rekomendasi kebijakan prinsipil dan strategis yang akan diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur
²⁾ Satuan Kerja khusus yang bersifat sementara

Sebaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI)

Per Desember 2024



1.4. Daftar Pemimpin Satuan Kerja Bank Indonesia

Per Desember 2024

KANTOR PUSAT BANK INDONESIA

MONETER	
FIRMAN MOCHTAR	Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter
EDI SUSIANTO	Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas
RAHMATULLAH	Departemen Pengelolaan Devisa
DONNY HUTABARAT	Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
IMAM HARTONO	Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah
MAKROPRUDENSIAL	
SOLIKIN M. JUHRO	Departemen Kebijakan Makroprudensial
Y . BUDIATMAKA	Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan Market
ANTON DARYONO	Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen
ANASTUTY K.	Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau
SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH	
DICKY KARTIKOYONO	Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran
IDA NURYANTI	Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
MARLISON HAKIM	Departemen Pengelolaan Uang
YUDI HARYMUKTI	Unit Khusus Pembangunan Sentra Pengelolaan Uang, <i>Data Center</i> , dan <i>Business Resumption Site</i>
PENDUKUNG KEBIJAKAN	
RUDY BRANDO HUTABARAT	Departemen Internasional
RIZA TYAS U. H.	Departemen Statistik
HERAWANTO	Departemen Jasa Perbankan, Perizinan dan Operasional Tresuri
TEDDY PIRNGADI	Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
DWITYAPOETRA S. BESAR	Departemen Manajemen Risiko
RAMDAN DENNY PRAKOSO	Departemen Komunikasi
PENDUKUNG ORGANISASI	
DODDY ZULVERDI	Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola
IMAM SUBARKAH	Departemen Hukum
M. ANWAR BASHORI	Departemen Sumber Daya Manusia
ENDANG TRIANTI	Departemen Pengembangan dan Inovasi Digital
DIAH ROSDIANA	Departemen Inovasi dan Digitalisasi Data
RETNO PONCO WINDARTI	Departemen Layanan Digital dan Keamanan Siber

RIKA S. DEWI	Departemen Keuangan
HARUM SETIAWATI	Departemen Manajemen dan Advisory Pengadaan
FERRY B. TAMPUBOLON	Departemen Audit Intern
BUDIYONO	Departemen Pengelolaan Aset Perkantoran
HILMAN TISNAWAN	Departemen Pengelolaan Aset Perumahan dan Non Perkantoran
ERNA WIJAYANTI	Departemen Layanan Aset Umum dan Fasilitas
YOGA AFFANDI	Institut Bank Indonesia

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA (KPW BI) DALAM NEGERI

ARIEF HARTAWAN	Departemen Regional
I GEDE PUTU WIRA K.	Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Sumatera Utara
ERWIN GUNAWAN HUTAPEA	Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Jawa Timur
R. ERWIN SOERADIMADJA	Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Bali
FADJAR MAJARDI	Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Kalimantan Selatan
RIZKI ERNADI WIMANDA	Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Sulawesi Selatan
RONY WIDIJARTO P.	KPw BI Provinsi Aceh
MOHAMAD ABDUL MAJID IKRAM	KPw BI Provinsi Sumatera Barat
PANJI ACHMAD	KPw BI Provinsi Riau
WARSONO	KPw BI Provinsi Jambi
RICKY PERDANA GOZALI	KPw BI Provinsi Sumatera Selatan
WAHYU YUWANA HIDAYAT	KPw BI Provinsi Bengkulu
JUNANTO HERDIAWAN	KPw BI Provinsi Lampung
ROMMY SARIU TAMAWIWY	KPw BI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
SURYONO	KPw BI Provinsi Kepulauan Riau
ARLYANA ABUBAKAR	KPw BI Provinsi DKI Jakarta
MUHAMAD NUR	KPw BI Provinsi Jawa Barat
RAHMAT DWISAPUTRA	KPw BI Provinsi Jawa Tengah
IBRAHIM	KPw BI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
AMERIZA MA'RUF MUSA	KPw BI Provinsi Banten
BERRY A. HARAHAHAP	KPw BI Provinsi Nusa Tenggara Barat
AGUS SISTYO WIDJAJATI	KPw BI Provinsi Nusa Tenggara Timur

N. A. ANGGINI SARI	KPw BI Provinsi Kalimantan Barat
YULIANSAH ANDRIAS	KPw BI Provinsi Kalimantan Tengah
BUDI WIDIHARTANTO	KPw BI Provinsi Kalimantan Timur
WAHYU INDRA SUKMA	KPw BI Provinsi Kalimantan Utara
ANDRY PRASMUKO	KPw BI Provinsi Sulawesi Utara
RONY HARTAWAN	KPw BI Provinsi Sulawesi Tengah
DONI SEPTADIJAYA	KPw BI Provinsi Sulawesi Tenggara
DIAN NUGRAHA	KPw BI Provinsi Gorontalo
GUNAWAN PURBOWO	KPw BI Provinsi Sulawesi Barat
RAWINDRA ARDIANSAH	KPw BI Provinsi Maluku
DWI PUTRA INDRAWAN	KPw BI Provinsi Maluku Utara
FATURACHMAN	KPw BI Provinsi Papua
SETIAN	KPw BI Provinsi Papua Barat
PRABU DEWANTO	KPw BI Lhokseumawe
MUQOROBIN	KPw BI Pematang Siantar
RIZA PUTERA	KPw BI Sibolga
ANTON PITONO	KPw BI Cirebon
LAURA RULIDA EKA SARI P.	KPw BI Tasikmalaya
MARWADI	KPw BI Tegal
CHRISTOVENY	KPw BI Purwokerto
DWIYANTO CAHYO SUMIRAT	KPw BI Solo
YAYAT CADARAJAT	KPw BI Kediri
GUNAWAN	KPw BI Jember
FEBRINA	KPw BI Malang
ROBI ARIADI	KPw BI Balikpapan

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA (KPW BI) LUAR NEGERI

WAHYU AGUNG NUGROHO	KPw BI New York
FARIDA PERANGINANGIN	KPw BI London
IMADUDDIN SAHABAT	KPw BI Tokyo
WIDI AGUSTIN S.	KPw BI Singapura
YULIAN WIHANTORO	KPw BI Beijing





Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur

BAB 2

Lingkungan Strategis Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia

2.1. Lingkungan Strategis Perekonomian Global dan Nasional

Selama triwulan IV 2024, divergensi pertumbuhan ekonomi dunia melebar dan ketidakpastian pasar keuangan global berlanjut. Perekonomian Amerika Serikat (AS) diperkirakan tumbuh lebih kuat, didorong oleh stimulus fiskal yang meningkatkan permintaan domestik dan kenaikan investasi di bidang teknologi yang mendorong peningkatan produktivitas. Sebaliknya, ekonomi Eropa, Tiongkok, dan Jepang masih lemah dipengaruhi oleh menurunnya keyakinan konsumen dan tertahannya produktivitas, sementara ekonomi India masih tertahan akibat sektor manufaktur yang terbatas. Arah kebijakan Pemerintah dan bank sentral AS berpengaruh pada ketidakpastian pasar keuangan global. Kuatnya ekonomi AS serta dampak kebijakan tarif menahan proses disinflasi di AS dan berdampak pada menguatnya ekspektasi bahwa penurunan *Fed Fund Rate* (FFR) akan lebih terbatas. Kebijakan fiskal AS yang lebih ekspansif mendorong *yield US Treasury* tetap tinggi, baik pada tenor jangka pendek maupun jangka panjang. Kondisi ini menyebabkan indeks mata uang dolar AS naik tinggi sehingga meningkatkan tekanan depresiatif terhadap berbagai mata uang dunia. Di penghujung tahun 2024, kebijakan *America First* kembali mengemuka yang dapat menyebabkan perubahan besar pada lanskap geopolitik dan perekonomian dunia ke depan. Berbagai perkembangan global ini memerlukan penguatan respons kebijakan dalam memitigasi dampak rambatan global untuk tetap menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

Di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap meningkat. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2024 tercatat sebesar 5,02% (yoy), lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi pada triwulan sebelumnya sebesar 4,95% (yoy). Pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada triwulan IV 2024 didukung oleh aktivitas ekonomi domestik yang tetap terjaga. Konsumsi rumah tangga meningkat seiring dengan aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat yang tinggi selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pertumbuhan investasi tetap kuat didukung oleh realisasi penanaman modal yang meningkat. Konsumsi Pemerintah melanjutkan pertumbuhan seiring dengan penyelesaian belanja akhir tahun. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) tumbuh tinggi sejalan dengan peningkatan aktivitas pada periode Pilkada 2024. Sementara itu, pertumbuhan ekspor ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang tetap tumbuh positif, kenaikan harga beberapa komoditas utama ekspor Indonesia, dan peningkatan ekspor jasa yang didorong oleh kenaikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Secara keseluruhan, pertumbuhan

ekonomi Indonesia pada 2024 mencapai 5,03% dan untuk tahun 2025 diperkirakan akan tumbuh dalam kisaran 4,8–5,6%. Prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2025 dihadapkan pada beberapa tantangan. Ekspor diperkirakan lebih rendah sehubungan dengan melambatnya permintaan negara-negara mitra dagang utama, kecuali AS. Konsumsi rumah tangga juga perlu terus didorong, khususnya golongan menengah ke bawah sehubungan dengan belum kuatnya ekspektasi penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja. Pada saat yang sama, dorongan investasi swasta juga belum kuat karena masih lebih besarnya kapasitas produksi dalam memenuhi permintaan, baik domestik maupun ekspor. Dalam menjawab berbagai tantangan tersebut, Bank Indonesia terus mengoptimalkan bauran kebijakannya untuk tetap menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi stimulus kebijakan makroprudensial dan akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran yang ditempuh Bank Indonesia dengan kebijakan stimulus fiskal Pemerintah. Lebih dari itu, Bank Indonesia mendukung penuh implementasi program-program Pemerintah dalam Asta Cita, termasuk untuk ketahanan pangan, pembiayaan ekonomi, serta akselerasi ekonomi dan keuangan digital.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap sehat sehingga mendukung ketahanan eksternal. Surplus neraca perdagangan berlanjut pada Desember 2024 yang tercatat 2,2 miliar dolar AS dipengaruhi oleh kinerja ekspor komoditas utama Indonesia yang kuat, seperti bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan nabati, serta besi dan baja. Perkembangan ini mendukung transaksi berjalan 2024 tetap sehat dan diperkirakan dalam kisaran defisit rendah 0,1% sampai dengan 0,9% dari PDB. Di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) telah kembali mencatat *net inflows* sebesar 0,27 miliar dolar AS pada Desember 2024 (hingga 27 Desember 2024). Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2024 tercatat tinggi sebesar 155,7 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Ke depan, NPI pada 2025 diperkirakan tetap sehat seiring dengan surplus transaksi modal dan finansial yang berlanjut dan defisit transaksi berjalan yang terjaga dalam kisaran defisit 0,5% sampai dengan 1,3% dari PDB. Surplus neraca transaksi modal dan finansial didukung oleh aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik yang lebih baik dan imbal hasil investasi yang menarik.

Nilai tukar Rupiah tetap terkendali di tengah ketidakpastian global yang tinggi, didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank

Indonesia. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS pada akhir triwulan IV 2024 tercatat mengalami depresiasi sebesar 2,44% dibandingkan dengan nilai tukar pada akhir triwulan III 2024. Ada pun untuk keseluruhan 2024 nilai tukar Rupiah secara rata-rata melemah 3,74% dibandingkan dengan rerata tahun 2023. Perkembangan Rupiah pada tahun 2024 tersebut lebih baik daripada pelemahan yang terjadi pada mata uang sejumlah negara lain, seperti won Korea, peso Mexico, real Brasil, yen Jepang, dan lira Turki. Memasuki awal tahun 2025, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS pada Januari 2025 (hingga 14 Januari 2025) melemah sebesar 1,00% (ptp) dari level nilai tukar akhir 2024. Perkembangan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS pada awal 2025 tersebut juga relatif lebih baik daripada mata uang regional lainnya, seperti rupee India, peso Filipina, dan baht Thailand yang masing-masing melemah sebesar 1,20%, 1,33%, dan 1,92%. Berbeda dengan perkembangan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS yang melemah, perkembangan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang kelompok negara maju di luar dolar AS justru menguat dan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang kelompok negara berkembang bergerak stabil. Perkembangan tersebut sejalan dengan kebijakan stabilisasi BI, didukung oleh aliran masuk modal asing yang masih berlanjut, imbal hasil instrumen keuangan domestik yang menarik, serta prospek ekonomi Indonesia yang tetap baik. Seluruh instrumen moneter terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter *pro-market* melalui optimalisasi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sekuritas Utang Valas Bank Indonesia (SUVBI), untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah.

Stabilitas harga terjaga sebagaimana tecermin pada laju inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2024 yang tercatat 1,57% (yoy), lebih rendah daripada inflasi pada September 2024 sebesar 1,84%, dan masih berada dalam kisaran sasarannya 2,5±1%. Perkembangan ini dipengaruhi oleh inflasi inti yang terkendali pada level 2,26% (yoy), didukung dengan konsistensi suku bunga kebijakan Bank Indonesia (BI-Rate) dalam mengarahkan ekspektasi inflasi sesuai dengan sasarannya. Sementara itu, kelompok *volatile food* (VF) mencatat inflasi 0,12% (yoy) didukung oleh peningkatan pasokan pangan seiring berlanjutnya musim panen, serta eratnya sinergi pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Secara spasial, inflasi IHK di berbagai daerah juga terkendali dalam kisaran sasaran inflasi nasional. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK tetap terkendali dalam sasarannya. Inflasi inti diperkirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons

permintaan domestik, *imported inflation* yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi. Inflasi VF diperkirakan terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dan Pemerintah Pusat dan Daerah. Bank Indonesia terus berkomitmen memperkuat efektivitas kebijakan moneter guna menjaga inflasi tahun 2025 dan 2026 terkendali dalam sasaran 2,5±1%.

Instrumen moneter *pro-market* dioptimalkan untuk memperkuat upaya stabilitas nilai tukar Rupiah dan pencapaian sasaran inflasi. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mempercepat upaya pendalaman pasar uang dan pasar valas serta mendorong aliran masuk modal asing ke dalam negeri. Hingga 31 Desember 2024, posisi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI masing-masing tercatat sebesar Rp923,53 triliun, 1,97 miliar dolar AS, dan 516 juta dolar AS. Penerbitan SRBI telah mendukung upaya peningkatan aliran masuk portofolio asing ke dalam negeri dan penguatan nilai tukar Rupiah. Kepemilikan nonresiden dalam SRBI mencapai Rp224,17 triliun (24,3% dari total *outstanding*). Implementasi *dealer* utama (*primary dealer*) sejak Mei 2024 juga makin meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan *repurchase agreement* (repo) antarpelaku pasar, sehingga memperkuat efektivitas instrumen moneter dalam stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pengendalian inflasi. Ke depan, Bank Indonesia terus mengoptimalkan berbagai inovasi instrumen *pro-market*, baik dari sisi volume maupun sisi daya tarik imbal hasil, guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas, serta mendorong aliran masuk modal asing.

Transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga berjalan baik dalam upaya turut mendukung pertumbuhan ekonomi. Suku bunga pasar uang (IndONIA) bergerak di sekitar BI-Rate, yaitu 6,18% pada 31 Desember 2024. Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan tanggal 27 Desember 2024 tercatat masing-masing pada level 7,18%, 7,21%, dan 7,30%, tetap menarik untuk mendukung aliran masuk modal asing. Imbal hasil SBN tenor 2 tahun dan 10 tahun per 31 Desember 2024, meningkat masing-masing menjadi 6,90% dan 6,97% sejalan kenaikan *yield* UST. Suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit pada Desember 2024 tercatat masing-masing sebesar 4,87% dan 9,20%, relatif stabil dibandingkan dengan level bulan sebelumnya. Sementara itu, suku bunga perbankan tetap terjaga ditopang likuiditas perbankan yang memadai serta efisiensi perbankan dalam pembentukan harga yang makin baik dengan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK).

Peran kredit/pembiayaan pada 2024 tetap kuat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan kredit pada 2024 mencapai 10,39% (yoy), berada dalam kisaran prakiraan Bank Indonesia 10–12%. Dari sisi penawaran,

pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh terjaganya minat penyaluran kredit perbankan, berlanjutnya realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan, tersedianya dukungan pendanaan dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), serta positifnya dampak KLM Bank Indonesia. Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didukung oleh kinerja usaha korporasi yang terjaga di tengah konsumsi rumah tangga yang terbatas. Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi, masing-masing sebesar 8,35% (yoy), 13,62% (yoy), dan 10,61% (yoy). Pembiayaan syariah tumbuh sebesar 9,87% (yoy), sementara kredit UMKM tumbuh 3,37% (yoy). Ke depan, pertumbuhan kredit diperkirakan meningkat dalam kisaran sasaran 11–13% pada 2025 sejalan prospek pertumbuhan ekonomi yang tetap baik dan dukungan kebijakan makroprudensial Bank Indonesia. Berbagai kebijakan insentif dari Pemerintah diperkirakan juga dapat mendorong permintaan kredit lebih lanjut.

Bank Indonesia terus memperkuat efektivitas implementasi KLM yang sejalan dengan pencapaian program Asta Cita. Pada 2025, KLM diarahkan untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan guna mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Mulai 1 Januari 2025, insentif KLM disalurkan pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, yaitu antara lain sektor pertanian, perdagangan dan manufaktur, transportasi, pergudangan dan pariwisata dan ekonomi kreatif, konstruksi, *real estate*, dan perumahan rakyat, serta UMKM, Ultra Mikro, dan hijau. Penyaluran KLM yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja sejalan dengan program Asta Cita 3 “Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur” dan program Asta Cita 4 “Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur”. Hingga minggu kedua Januari 2025, Bank Indonesia telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp295 triliun, atau meningkat sebesar Rp36 triliun dari Rp259 triliun pada akhir Oktober 2024. Insentif dimaksud telah disalurkan kepada kelompok bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp129,1 triliun, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sebesar Rp130,6 triliun, Bank Pemerintah Daerah (BPD) sebesar Rp29,9 triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) sebesar Rp5 triliun. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan dan memperkuat sinergi dengan Pemerintah, otoritas keuangan, Kementerian/Lembaga, perbankan, dan pelaku usaha.

Ketahanan sistem keuangan terjaga baik. Likuiditas perbankan tetap memadai, tecermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) pada Desember 2024 yang tinggi sebesar 25,59%. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) perbankan pada November 2024 tercatat tinggi sebesar 26,87%, tergolong kuat dalam menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit. Risiko kredit tetap terkendali, tecermin dari rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) perbankan pada November 2024 yang terjaga rendah, sebesar 2,19% (bruto) dan 0,75% (neto). Hasil *stress-test* Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan yang tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko, serta ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Transaksi ekonomi dan keuangan digital pada tahun 2024 terus tumbuh didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Volume transaksi pembayaran digital² mencapai 34,5 miliar transaksi atau tumbuh 36,1% (yoy) yang didukung oleh seluruh komponennya. Volume transaksi pada aplikasi *mobile* tumbuh sebesar 39,1% (yoy), demikian pula volume transaksi pada *internet* yang tumbuh sebesar 4,4% (yoy) pada tahun 2024. Di samping itu, volume transaksi pembayaran digital melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) tetap tumbuh pesat sebesar 175,2% (yoy) didukung peningkatan jumlah pengguna dan *merchant*. Pembayaran digital diproyeksikan meningkat 52,3% (yoy) pada tahun 2025. Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST mencapai 3,4 miliar transaksi atau tumbuh 62,4% (yoy) dengan nilai mencapai Rp8,9 triliun pada tahun 2024. Volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI-RTGS mencapai 10,3 juta transaksi atau tumbuh 3,1% (yoy) dengan nilai Rp126,3 ribu triliun, meningkat 17,6% (yoy) pada tahun 2024. Pada tahun 2025, volume transaksi BI-FAST diperkirakan tumbuh 34,1% (yoy) dan nilai transaksi BI-RTGS diperkirakan tumbuh 11,4% (yoy). Sementara itu, dari sisi pengelolaan uang Rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 9,3% (yoy) menjadi Rp1.204,5 triliun pada akhir Desember 2024 dan diperkirakan tumbuh 5,7% (yoy) pada tahun 2025.

Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga, ditopang oleh struktur industri yang sehat dan infrastruktur yang stabil. Dari sisi infrastruktur, stabilitas sistem pembayaran tecermin pada penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) yang lancar dan andal serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai pada Desember 2024. Dari sisi struktur industri, interkoneksi antarpelaku

² Pembayaran digital terdiri atas transaksi melalui aplikasi *mobile* dan *internet*.

dalam sistem pembayaran terus menguat diikuti oleh ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) yang meluas. Transaksi pembayaran berbasis Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) juga meningkat sejalan dengan perluasan tingkat adopsi. Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah Terdepan, Terluar, Terpencil (3T).

2.2. Lingkungan Strategis Kebijakan dan Kelembagaan

Selain dinamika perekonomian global dan nasional di atas, Bank Indonesia juga terus mencermati perubahan lingkungan strategis yang memerlukan penguatan kerangka kerja kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia sebagai bank sentral dan lembaga publik. Dalam konteks Indonesia, lingkungan strategis yang memerlukan penguatan respons dan transformasi kebijakan dan kelembagaan dimaksud termasuk tindak lanjut implementasi UU P2SK, meningkatnya dampak negatif rambatan global, serta cepatnya digitalisasi dengan sejumlah manfaat dan risikonya.

Penerbitan UU P2SK memperkuat landasan hukum bagi tujuan Bank Indonesia dalam memelihara stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam kaitan itu, UU memberikan mandat bagi Bank Indonesia untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial. UU P2SK juga mempertegas kewenangan Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing, pengaturan lalu lintas devisa, Rupiah digital, dan pengawasan transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar. Selain itu, UU P2SK juga semakin menegaskan pentingnya penerapan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional serta dukungan kelembagaan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia dimaksud. Penguatan kewenangan Bank Indonesia dalam UU P2SK tersebut perlu ditindaklanjuti, baik melalui pembuatan ketentuan yang diamanatkan kepada Bank Indonesia maupun diimplementasikan secara bertahap.

Perlunya bauran kebijakan bank sentral untuk memitigasi dampak ketidakpastian pasar keuangan global. Seperti dikemukakan di atas, kuatnya mata uang dolar AS dan tingginya *yield* US *Treasury* berdampak negatif kepada negara-negara *Emerging Markets* (EMs), termasuk Indonesia, yaitu terjadinya aliran keluar investasi portfolio asing dan tekanan depresiasi nilai tukar, yang keduanya berdampak pada stabilitas moneter, sistem keuangan, dan

makroekonomi. Keharusan untuk fokus pada stabilitas inilah yang membatasi kemampuan kebijakan moneter dalam turut mendukung pertumbuhan. Di sinilah pentingnya bauran kebijakan bank sentral, khususnya antara kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial. Dari sisi kebijakan moneter, kebijakan suku bunga untuk pencapaian sasaran inflasi perlu didukung dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar melalui intervensi di pasar valuta asing. Hal ini agar stabilitas Rupiah tetap terjaga dan berdampak positif pada pengendalian inflasi, stabilitas sistem keuangan, dan keberlanjutan fiskal di dalam negeri. Sementara itu, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan bagi pertumbuhan ekonomi serta tetap terjaganya stabilitas sistem keuangan. Bauran kebijakan bank sentral tersebut perlu dirumuskan ke dalam kerangka kerja dan pengaturan sebagai acuan dalam merumuskan respon yang diperlukan sesuai dengan dinamika perekonomian global dan nasional yang berkembang.

Perlunya bauran kebijakan ekonomi nasional untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional dari dampak perlambatan ekonomi global. Seperti dikemukakan di atas, ketidakpastian global meningkat disertai dengan prospek pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat. Di sinilah pentingnya bauran kebijakan ekonomi nasional yang mencakup kebijakan fiskal dan sektor riil oleh Pemerintah, kebijakan moneter dan makroprudensial oleh Bank Indonesia, serta kebijakan stabilitas sistem keuangan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Koordinasi fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ditempuh melalui pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar dan pasar keuangan, serta pengelolaan defisit dan pembiayaan fiskal yang terjaga. Sementara itu, koordinasi dalam mendorong pertumbuhan ditempuh melalui pemberian insentif fiskal dari Pemerintah dan insentif likuiditas makroprudensial dari Bank Indonesia pada sektor-sektor prioritas pendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Yang sangat penting ditempuh adalah kebijakan transformasi sektor riil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, termasuk melalui pembangunan infrastruktur konektivitas fisik dan digital, perbaikan iklim investasi untuk peningkatan penanaman modal asing dan dalam negeri, hilirisasi sumber daya alam untuk nilai tambah perekonomian, dan juga hilirisasi pertanian untuk ketahanan pangan.

Perlunya sinergi dalam digitalisasi ekonomi keuangan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Digitalisasi berkembang sangat cepat di Indonesia, khususnya transaksi ekonomi dan keuangan digital secara ritel. Bank Indonesia berperan penting dalam mempercepat digitalisasi itu melalui digitalisasi pembayaran, terutama setelah peluncuran BSPI pada tahun 2019, bersinergi erat dengan Pemerintah, KSSK, dan Asosiasi Sistem Pembayaran

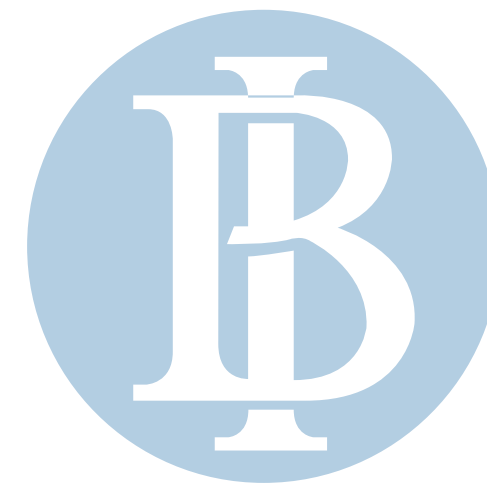


Press Conference Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Triwulan IV 2024 di Jakarta

Indonesia (ASPI). Cepatnya digitalisasi sistem pembayaran itu ditandai dengan keharusan penggunaan QRIS sebagai satu-satunya QR transaksi pembayaran di Indonesia, yang sekarang telah pula diperluas dengan kerjasama QR antar negara. Pada area infrastruktur sistem pembayaran ritel, kehadiran BI-FAST memungkinkan transaksi ritel antar rekening nasabah di perbankan menjadi lebih cepat melalui layanan yang tersedia selama 24/7, yang sebagian besar pengguna adalah *merchant* UMKM. Interkoneksi transaksi pembayaran antar pelaku industri juga semakin meningkat dengan penerapan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP). Demikian pula, pengembangan *platform* pusat data memungkinkan pemrosesan dan analisis terhadap *big data* menjadi lebih akurat dalam rangka mendukung proses pengambilan yang tepat dan terkalibrasi setiap saat. Di sisi lain, perkembangan digital dan adopsi teknologi tersebut juga disertai berbagai risiko termasuk peningkatan ancaman dan serangan siber di sektor keuangan. Risiko operasional harus diwaspadai dalam rangka menjaga resiliensi layanan sistem pembayaran dan memitigasi potensi kegagalan yang sistemik, termasuk pada sistem keuangan. Untuk itu, penguatan sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah, KSSK, dan ASPI perlu terus dilakukan untuk semakin mendorong digitalisasi ekonomi keuangan nasional untuk berkontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Digitalisasi juga memberi peluang dan manfaat bagi proses bisnis kebijakan dan kelembagaan yang lebih efektif, efisien, dan berkepatuhan. Cepatnya perkembangan teknologi

digital dan pergeseran demografi pegawai ke generasi milenial dan generasi Z yang semakin besar menuntut Bank Indonesia mempercepat transformasi digital proses bisnis kebijakan dan kelembagaan dengan tetap menjaga tata kelola yang baik dan profesional. Transformasi digital dimaksud ditempuh secara terintegrasi, yang dikenal dengan *Integrated Digital Central Banking* (IDCB). Dalam kaitan ini, digitalisasi proses bisnis dimulai untuk proses bisnis perumusan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dari satuan kerja ke komite dan kemudian ke RDG Bulanan. Proses bisnis yang semula 8 (delapan) tahap dikurangi menjadi hanya 3 (tiga) tahap dengan proses bisnis di dalam satuan kerja dilakukan melalui *Collaborative Digital Work Process* (DWP), dimana para pegawai dapat berinteraksi dan berkolaborasi dalam mempersiapkan bahan yang akan disampaikan ke komite dan RDG. Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) telah dilakukan untuk analisis dan proyeksi sejumlah indikator kunci perekonomian, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, kredit perbankan, dan lainnya. Digitalisasi proses bisnis dilakukan secara *end-to-end*, yaitu dari *input* metadata dan penggunaan AI untuk analisis dan proyeksi sejumlah indikator ekonomi kunci, penyusunan bahan hingga pembahasan di Komite dan RDG. Digitalisasi proses bisnis secara bertahap akan terus diperluas ke area kebijakan dan kelembagaan lainnya sebagai transformasi digital secara menyeluruh dalam mewujudkan visi Bank Indonesia menjadi bank sentral digital terdepan.





Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan

BAB 3

Respons Kebijakan Bank Indonesia



Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan di Jakarta

3.1. Stance Kebijakan Bank Indonesia

Bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2024 difokuskan untuk memperkuat stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan, didukung oleh sinergi yang erat dengan bauran kebijakan ekonomi nasional. Dalam kaitan ini, pada awal tahun 2024, kebijakan moneter difokuskan pada upaya menjaga stabilitas (*pro-stability*), namun sejak September 2024 kebijakan moneter mulai diseimbangkan antara stabilitas (*pro-stability*) dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*). Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*). Arah bauran kebijakan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara menjaga stabilitas menghadapi dampak negatif gejolak global dan mempertahankan momentum pemulihan siklus ekonomi serta keuangan nasional. Sasaran kebijakan moneter pada 2024 difokuskan untuk mengendalikan inflasi dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$ serta stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak gejolak global agar konsisten dengan pengendalian inflasi dan dukungan terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Sementara itu, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, kebijakan makroprudensial longgar terus diarahkan untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan ke sektor-sektor prioritas, dengan turut serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Demikian pula, digitalisasi sistem pembayaran terus diakselerasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui perluasan EKD. Bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran tersebut didukung oleh penguatan kebijakan

pendalaman pasar uang dan valas, pengembangan UMKM, ekonomi-keuangan syariah, serta kebijakan internasional.

Bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2025 akan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan terus memperkuat sinergi dengan kebijakan ekonomi nasional. Dalam kaitan ini, Bauran Kebijakan Bank Indonesia akan tetap fokus pada mitigasi dampak rambatan global terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2025 akan diarahkan untuk menjaga stabilitas dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi (*pro-stability and growth*), dengan sasaran utama yakni inflasi yang terjaga dalam rentang target dan stabilitas nilai tukar Rupiah. Kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran akan tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (*pro-growth*). Kebijakan makroprudensial yang longgar akan dilanjutkan untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan di sektor-sektor prioritas, termasuk UMKM, inklusi ekonomi, dan keuangan hijau, guna menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran akan terus didorong sesuai BPSI 2030 untuk memperkuat industri jasa pembayaran dan mendukung makin berkembangnya EKD. Selain itu, kerja sama sistem pembayaran antarnegara akan diperluas dan pengembangan Rupiah Digital terus dilanjutkan. Bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran akan terus diperkuat dengan kebijakan pendukung yakni pendalaman pasar keuangan, pengembangan ekonomi-keuangan

inklusif untuk UMKM dan ekonomi-keuangan syariah, serta kebijakan internasional. Bank Indonesia juga akan terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan kebijakan Pemerintah, KSSK, industri keuangan, dunia usaha, dan asosiasi, yang diarahkan untuk menjaga stabilitas dan

mendukung transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Arah kebijakan Bank Indonesia tersebut disampaikan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024 yang berlangsung di Jakarta pada 29 November 2024.

Boks 1. Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2024



Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024 di Jakarta

Penyelenggaraan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024 merupakan puncak *high level event* (HLE) Bank Indonesia yang telah diselenggarakan rutin sejak tahun 1969. Mengusung tema "Sinergi Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional", PTBI 2024 yang diselenggarakan di Jakarta, 29 November 2024 dihadiri oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, pimpinan lembaga negara, menteri kabinet, perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), perbankan, akademisi, hingga perwakilan organisasi internasional. PTBI 2024 juga disiarkan secara langsung melalui kanal media sosial Bank Indonesia serta diikuti oleh masyarakat luas di dalam dan luar negeri.

Dalam sesi utama PTBI 2024, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa stabilitas mata uang merupakan wujud kedaulatan negara. Oleh karena itu, apresiasi diberikan kepada Bank Indonesia atas perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah serta kepada Kementerian Keuangan dan OJK atas sinergi yang telah terjalin erat dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Presiden juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam memperkuat stabilitas dan mendorong transformasi ekonomi nasional, guna mewujudkan pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyampaikan optimisme terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah dinamika global yang terus berkembang. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2025 berada dalam kisaran $4,8-5,6\%$, dengan potensi meningkat ke $4,9-5,7\%$ pada tahun 2026, didorong oleh konsumsi swasta, investasi, dan ekspor yang tetap kuat. Selain itu, inflasi diperkirakan akan tetap terkendali dalam target $2,5 \pm 1\%$ pada tahun 2025 dan 2026, seiring dengan sinergi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, serta implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Namun demikian, Bank Indonesia juga menyoroti lima tantangan global yang perlu diantisipasi, yaitu perlambatan pertumbuhan ekonomi global, lambatnya penurunan inflasi dunia, kebijakan suku bunga tinggi di negara maju, penguatan mata uang dolar AS, serta potensi pelarian modal dari pasar negara berkembang. Menghadapi tantangan tersebut, sinergi kebijakan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas dan mempercepat transformasi ekonomi nasional. Bauran kebijakan Bank Indonesia mencakup lima area strategis, yaitu: (i) stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, untuk menjaga ketahanan perekonomian terhadap gejolak eksternal; (ii) peningkatan konsumsi dan investasi domestik, guna mendorong pertumbuhan ekonomi; (iii) peningkatan



Penganugerahan BI Award 2024 pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024 di Jakarta

produktivitas dan kapasitas ekonomi nasional, melalui kebijakan ekonomi inklusif dan penguatan sektor riil; (iv) pendalaman pasar keuangan, sebagai sumber pembiayaan ekonomi yang berkelanjutan; (v) digitalisasi sistem pembayaran dan ekonomi keuangan digital, untuk memperkuat ekosistem ekonomi digital di Indonesia.

Bauran Kebijakan Bank Indonesia pada 2025 diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dalam sinergi erat dengan kebijakan ekonomi nasional. Kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2025 akan tetap difokuskan pada stabilitas dengan terus mencermati ruang untuk mendorong pertumbuhan (*pro-stability and growth*). Sementara itu, keempat kebijakan Bank Indonesia lainnya yaitu kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau akan terus diarahkan untuk dan sebagai bagian dari upaya bersama dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional (*pro-growth*). Bank Indonesia juga akan terus menempuh transformasi kelembagaan secara menyeluruh untuk membangun lembaga bank sentral yang kredibel, profesional, bertata kelola kuat dan transparan.

Sebagai bagian dari strategi memperdalam pasar keuangan, Bank Indonesia meluncurkan *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2025-2030, yang bertujuan untuk menciptakan pasar keuangan yang lebih modern, transparan, dan berstandar internasional. Selain itu, kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan pada akselerasi digitalisasi, dengan target pencapaian 58 juta pengguna *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dan 40 juta *merchant* pada tahun 2025, serta penguatan ekosistem *fast payment* dan *real-time gross settlement* (RTGS). Dalam

bidang ekonomi keuangan inklusif dan hijau, Bank Indonesia terus memperluas inisiatif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta pengendalian inflasi, termasuk melalui penguatan ekonomi syariah sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap mitra strategis yang berkontribusi dalam mendukung kebijakan ekonomi nasional, PTBI 2024 juga dirangkaikan dengan penganugerahan BI Award 2024 kepada 51 mitra strategis, meliputi lembaga keuangan, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), korporasi, UMKM, dan individu yang telah berkontribusi di bidang stabilitas moneter dan sistem keuangan, sistem pembayaran, serta pengembangan ekonomi keuangan syariah.

PTBI 2024 kembali menegaskan peran sentral Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas dan mendukung transformasi ekonomi nasional. Dengan sinergi erat antara kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan, diharapkan perekonomian Indonesia mampu tumbuh lebih kuat dan berdaya saing di tingkat global. Implementasi berbagai kebijakan yang telah disusun, termasuk *Blueprint* Pendalaman Pasar Keuangan serta akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pasar keuangan yang modern dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sebagai forum strategis tahunan, PTBI menjadi wadah bagi para pemangku kebijakan untuk merumuskan arah ekonomi nasional dan menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Dengan komitmen yang kuat dari seluruh mitra kerja, optimisme terhadap prospek perekonomian Indonesia ke depan semakin meningkat, membawa harapan akan stabilitas dan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.

3.2. Respons Bauran Kebijakan Bank Indonesia

Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. Di bidang moneter, Bank Indonesia selama triwulan IV 2024 mempertahankan BI-Rate pada level 6,00%. Keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter dalam mengendalikan laju inflasi sesuai sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2024 dan 2025, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, pada Januari 2025, Bank Indonesia menurunkan suku bunga sebesar 25 bps menjadi 5,75%. Keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya prakiraan inflasi 2025 dan 2026 yang terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$, terjaganya nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental untuk mengendalikan inflasi dalam sasarannya, dan perlunya upaya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi dalam sasarannya dan nilai tukar yang sesuai fundamental, dengan tetap mencermati ruang untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan nasional.

Bank Indonesia terus memperkuat strategi OM *pro-market* untuk menarik berlanjutnya aliran masuk modal asing guna memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dan efektivitas transmisi kebijakan moneter dengan: (i) menjaga struktur suku bunga di pasar uang Rupiah untuk daya tarik imbal hasil bagi aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik; (ii) mengoptimalkan SRBI, SVBI, dan SUVBI; (iii) memperkuat strategi transaksi *term-repo* dan *swap valas* yang kompetitif; dan (iv) memperkuat peran *Primary Dealer* (PD) untuk semakin meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repo antarpelaku pasar. Bank Indonesia juga terus memperkuat strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar valas pada transaksi *spot* dan *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), serta transaksi SBN di pasar sekunder.

Di bidang makroprudensial, Bank Indonesia melaksanakan strategi untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Pada triwulan IV 2024, respons kebijakan makroprudensial Bank Indonesia antara lain:

- a) Penguatan implementasi kebijakan makroprudensial longgar, dengan:
 - i) Memperkuat KLM untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan melalui *refocusing* pada sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja. Implementasi penguatan KLM

tersebut akan mulai diimplementasikan pada 1 Januari 2025;

- ii) Melanjutkan kebijakan Rasio *Loan to Value/Financing to Value* (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti yang longgar, yaitu paling tinggi sebesar 100% dan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor longgar, yaitu paling rendah sebesar 0% sampai dengan 31 Desember 2025;
 - iii) Mempertahankan Rasio *Countercyclical Capital Buffer* (CCyB) sebesar 0%
 - iv) Mempertahankan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran yang akomodatif yaitu sebesar 84-94%;
 - v) Melanjutkan kebijakan Rasio Pembiayaan Luar Negeri Perbankan (RPLN) sebagai opsi sumber *funding* perbankan;
 - vi) Memperkuat publikasi asesmen transparansi SBDK dengan pendalaman pada suku bunga kredit.
- b) Penguatan implementasi kebijakan makroprudensial untuk memperkuat ketahanan sistem keuangan, dengan mempertahankan Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 5% dengan fleksibilitas repo sebesar 5%, dan rasio PLM Syariah sebesar 3,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 3,5%; dan
 - c) Melanjutkan implementasi kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) untuk mendukung pembiayaan inklusif perbankan.

Di bidang sistem pembayaran, kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan, khususnya sektor perdagangan dan UMKM, dengan memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran. Pada triwulan IV 2024, respons kebijakan sistem pembayaran yang ditempuh antara lain:

- a) Perpanjangan kebijakan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan kebijakan Kartu Kredit (KK) sampai dengan 30 Juni 2025 meliputi:
 - i) Tarif SKNBI sebesar Rp1 dari BI ke bank dan tarif SKNBI maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah; dan
 - ii) Kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang KK 5% dari total tagihan dan kebijakan nilai denda keterlambatan sebesar maksimum 1% dari total tagihan serta tidak melebihi Rp100.000.
- b) Penguatan literasi dan edukasi pengguna dan *merchant* QRIS khususnya pada wilayah-wilayah destinasi

utama pariwisata guna memperkuat akseptasi QRIS Antarnegara.

- c) Perluasan layanan BI-FAST yang mencakup layanan transfer secara kolektif (*bulk transfer*), pembayaran atas dasar permintaan (*request for payment*), dan transfer debit secara langsung (*direct debit*) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam transaksi ekonomi dan keuangan yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal terhitung sejak tanggal 21 Desember 2024.
- d) Penguatan akseptasi pembayaran digital melalui optimalisasi pemanfaatan fitur BI-FAST Fase I Tahap 2 yang mencakup layanan transfer secara kolektif (*bulk transfer*), pembayaran atas dasar permintaan (*request for payment*), dan transfer debit secara langsung (*direct debit*).
- e) Penguatan strategi menjaga ketersediaan dan kelancaran sistem pembayaran di seluruh wilayah NKRI untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024, termasuk melalui penyelenggaraan Semarak Rupiah di Hari Natal Penuh Damai (SERUNAI) pada 15-20 Desember 2024.
- f) Penguatan implementasi inisiatif elektronifikasi untuk mendukung program-program Pemerintah melalui digitalisasi program kesejahteraan sosial dan elektronifikasi sektor transportasi.

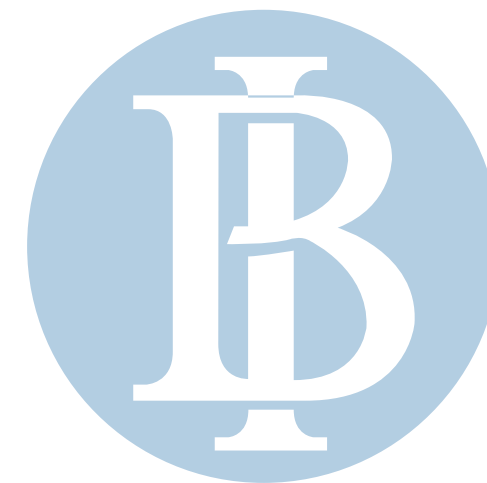
Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program-program dalam Asta Cita.

- a) Pertama, menjaga stabilitas ekonomi, moneter, nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan, termasuk

memastikan nilai tukar Rupiah stabil sejalan dengan dinamika mata uang regional di tengah tekanan dolar AS yang kuat.

- b) Kedua, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal diperkuat dalam pembelian SBN dari pasar sekunder oleh Bank Indonesia melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (*bilateral buyback debt switching*).
- c) Ketiga, dukungan Bank Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan melalui koordinasi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam swasembada pangan, antara lain melalui program GNPIP di berbagai daerah dalam TPIP dan TPID.
- d) Keempat, dukungan Bank Indonesia dalam pembiayaan ekonomi melalui KLM untuk mendorong kredit/ pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas, termasuk pembiayaan inklusi dan hijau.
- e) Kelima, dukungan Bank Indonesia dalam akselerasi transformasi digital Pemerintah, antara lain melalui koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam digitalisasi program kesejahteraan sosial, elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah Daerah, dan elektronifikasi sektor transportasi.

Selain itu, Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan KSSK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia juga memperkuat dan memperluas kerja sama internasional di area kebanksentralan, termasuk melalui konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.





Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah

BAB 4

Transformasi Bank Indonesia

Bank Indonesia memperkuat transformasi yang telah ditempuh sejak tahun 2018 sebagai wujud dukungan terhadap implementasi UU P2SK. UU P2SK telah memperkuat landasan hukum bagi mandat, kebijakan, dan kelembagaan Bank Indonesia dalam mengawal perekonomian nasional. UU P2SK juga mempertegas kewenangan Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing, pengaturan lalu lintas devisa, Rupiah digital, dan pengawasan transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar. Dalam mengimplementasi amanat UU tersebut, selain melakukan penguatan respons kebijakan, Bank Indonesia juga mempertajam sejumlah agenda transformasi melalui pembuatan ketentuan yang diamanatkan dan pelaksanaannya secara bertahap.

Transformasi Bank Indonesia mencakup empat area utama, yaitu Kebijakan, Organisasi dan Proses Kerja, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Budaya Kerja, serta Digital. Transformasi kebijakan mencakup penyempurnaan ketentuan bauran kebijakan utama dan pendukung, perluasan kerja sama baik dengan mitra kerja domestik maupun antarnegara, serta pengembangan berbagai *blueprint/framework* dan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, dengan berlandaskan pada penerapan tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional. Di sisi lain, transformasi organisasi dan proses kerja diarahkan pada penguatan lembaga yang berkinerja optimal dan digitalisasi proses kerja kebijakan dan kelembagaan berbasis efektif, efisien, dan kepatuhan. Sementara itu, transformasi SDM dan budaya kerja ditempuh untuk mendukung pelaksanaan digital *Business Process Reengineering* (BPR) melalui penguatan aspek kepemimpinan SDM Bank Indonesia yang berintegritas, kompeten, profesional, *agile* terhadap perubahan, dan berperilaku mulia. Selanjutnya, transformasi digital diarahkan untuk mendukung proses kerja kebijakan maupun kelembagaan yang semakin efektif dan efisien menuju visi sebagai bank sentral digital terdepan.

4.1. Transformasi Kebijakan

Bank Indonesia melanjutkan penguatan bauran kebijakan yang mengintegrasikan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mencapai tujuan sebagaimana amanat UU. Tantangan perekonomian yang semakin kompleks, termasuk lingkungan strategis internal maupun eksternal, memerlukan transformasi berupa penguatan kerangka kerja Bauran Kebijakan Bank Indonesia (BKBI) yang terintegrasi dalam mencapai tujuan Bank Indonesia. BKBI akan memperjelas integrasi kerangka kerja yang saling melengkapi dan memperkuat antarkebijakan utama, yang terdiri dari kebijakan moneter, kebijakan sistem

pembayaran, dan kebijakan makroprudensial, dengan ditopang oleh kebijakan pendukung. Integrasi ini konsisten dengan pencapaian tujuan Bank Indonesia, yakni mencapai stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penguatan kerangka kebijakan dilakukan beriringan dengan BPR serta digitalisasi kebijakan dan proses kerja, agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan ke depan. Hal ini ditempuh guna mewujudkan organisasi dengan proses bisnis yang lebih sederhana, ringkas, dan standar, serta proses kerja yang *agile* dan sejalan dengan kebutuhan di era digital.

4.1.1. Transformasi di Bidang Moneter

1) Reformasi Regulasi Area Moneter

Bank Indonesia memperkuat kerangka kerja Kebijakan Moneter yang sejalan dengan Bauran Kebijakan Bank Indonesia (BKBI). Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia tengah menyusun pengaturan yang menginduk pada PBI No. 4 Tahun 2024 tentang BKBI, yakni: (i) PBI dan PDG tentang Kebijakan Moneter; (ii) PBI dan PDG tentang Pengendalian Moneter; dan (iii) PDG tentang Pengelolaan Cadangan Devisa Negara. Penyusunan pengaturan tersebut ditujukan sebagai landasan hukum untuk penguatan pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter agar selaras dengan amanat Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam UU BI jo. UU P2SK. Peraturan lebih detail terkait kebijakan moneter dan pelaksanaannya diperlukan dalam penyelenggaraan tugas Bank Indonesia. Penerbitan peraturan tersebut juga dimaksudkan sebagai pedoman dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter, serta sebagai acuan utama bagi publik terkait pelaksanaan kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Indonesia.

Seiring dengan makin tingginya kompleksitas globalisasi dan arus keuangan internasional, disertai pesatnya perkembangan digitalisasi, maka diperlukan pengaturan pengelolaan Lalu Lintas Devisa (LLD) secara lebih komprehensif dan terkini agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian dengan risiko yang tetap terkendali, sehingga tidak mengganggu stabilitas perekonomian nasional. Oleh karena itu, Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lalu Lintas Devisa (PBI LLD) pada tanggal 16 Desember 2024 yang ditujukan untuk mencapai LLD yang mendukung: (i) pencapaian Stabilitas Nilai Rupiah, pemeliharaan Stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga SSK dalam rangka mendukung pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan; (ii) pemeliharaan Stabilitas Makroekonomi serta pencegahan dan penanganan krisis Sistem Keuangan; dan (iii) kelancaran lalu lintas perdagangan, investasi, dan pembayaran dengan luar negeri.

2) Integrasi Pengelolaan Moneter dan Pengembangan Pasar Keuangan melalui Pendekatan Holistik 3I

Bank Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter dalam memastikan terkendalinya inflasi serta stabilitas nilai tukar Rupiah. Upaya tersebut dilakukan secara konsisten dengan mengoptimalkan pelaksanaan OM *pro-market* yang terintegrasi guna mengembangkan pasar uang dan pasar valas, serta mendukung upaya menarik *portfolio inflows*.

Sepanjang triwulan IV 2024, Bank Indonesia melanjutkan berbagai upaya dalam rangka mengintegrasikan pengelolaan moneter dengan pengembangan pasar keuangan melalui instrumen OM *pro-market* sebagai berikut:

a) Penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)

Bank Indonesia terus mengoptimalkan instrumen OM *pro-market* melalui penerbitan SRBI untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter, memperdalam pasar uang, dan mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah. SRBI merupakan surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga milik Bank Indonesia. Selain sebagai salah satu instrumen OM, SRBI juga menjadi alternatif instrumen di pasar uang dan menjadi sarana dalam menarik aliran masuk modal asing ke dalam negeri. Sampai dengan triwulan IV 2024, total *outstanding* SRBI mencapai Rp923,53 triliun turun dibandingkan posisi akhir triwulan III sebesar Rp927,61 triliun. Total volume transaksi di pasar sekunder selama triwulan IV mencapai Rp869,13 triliun atau 94,11% dibanding *outstanding* SRBI akhir tahun, naik dibandingkan triwulan III 2024 sebesar Rp627,34 triliun atau 67,63%. Penurunan *outstanding* SRBI dan kenaikan volume transaksi sejalan dengan meningkatnya kebutuhan likuiditas di akhir tahun. Kepemilikan nonresiden pada akhir triwulan IV mencapai Rp224,17 triliun atau 24,27% dari *outstanding* SRBI, turun dibandingkan posisi akhir triwulan III 2024 sebesar Rp254,22 triliun (27,41% dari

outstanding). Penurunan kepemilikan nonresiden pada triwulan IV 2024 sejalan dengan sentimen *risk-off* di pasar keuangan global pasca hasil pemilu Amerika Serikat dan prospek kebijakan moneter bank sentral AS yang *less dovish*.

Lebih lanjut, dalam rangka mengembangkan pasar uang dan pasar valas yang modern dan maju serta meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, Bank Indonesia menginisiasi transaksi OM melalui *dealer* utama di PUVA sejak tanggal 17 Mei 2024. Penggunaan *dealer* utama dalam transaksi OM dimulai dari lelang penerbitan SRBI. Penguatan implementasi *dealer* utama terus dilakukan untuk mendukung pengembangan pasar uang dan pasar valas serta penerapan OM *pro-market*, dengan mendorong peningkatan pemenuhan kewajiban *dealer* utama di pasar uang antara lain transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repo antarpelaku pasar.

b) Penerbitan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI)

Bank Indonesia juga menerbitkan SVBI dan SUVBI dalam rangka memperkuat pelaksanaan kebijakan moneter. Karakteristik SVBI dan SUVBI yang "*pro-market*" diharapkan dapat mengakselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas Indonesia, serta mendukung upaya menarik *portfolio inflows* yang pada akhirnya memperkuat pencapaian stabilitas nilai tukar rupiah. SVBI adalah surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga dalam valuta asing milik Bank Indonesia. Sementara itu, SUVBI adalah sukuk dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga dalam valuta asing berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia. SVBI dan SUVBI diterbitkan dengan tenor paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan, dengan suku bunga SVBI dan tingkat imbalan SUVBI mempertimbangkan harga pasar (*market rate*). SVBI dan SUVBI dapat diperdagangkan di pasar sekunder oleh residen dan nonresiden. Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia juga telah melakukan asesmen pengayaan fitur instrumen Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) dalam rangka memperkuat pelaksanaan OM *Pro Market* dan mendukung pendalaman pasar uang syariah.

4.1.2. Transformasi di Bidang Makroprudensial

1) Reformasi Regulasi Area Makroprudensial

Bank Indonesia memperkuat kerangka kerja Kebijakan Makroprudensial yang sejalan dengan BKBI. Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia telah menerbitkan PBI No. 13 Tahun 2024 tentang Kebijakan Makroprudensial (PBI KMP) pada 31 Desember 2024 yang merupakan bagian dari ketentuan-ketentuan yang menginduk pada PBI No. 4 Tahun 2024 tentang BKBI. Penerbitan PBI KMP ditujukan sebagai pedoman bagi perumusan dan pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial agar sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam pencapaian tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang, serta menjadi acuan bagi pihak eksternal dalam pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial. Selanjutnya, dalam memperkuat pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial, Bank Indonesia juga tengah menyusun ketentuan internal tentang Kebijakan Makroprudensial. Penyusunan ketentuan dimaksud diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengaturan maupun pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial di Bank Indonesia.

2) Pengembangan Supervisory Technology (Suptech)

Bank Indonesia melakukan penguatan pengawasan terintegrasi secara *end-to-end* melalui pengembangan Suptech dalam rangka memastikan pelaksanaan Bauran Kebijakan Bank Indonesia berjalan efektif dan optimal sesuai sasaran. Pengembangan Suptech dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menciptakan pengawasan yang lebih *agile* dan responsif dalam menjawab tantangan dari pelaksanaan transformasi Bank Indonesia. Dalam upaya mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan, telah disusun *roadmap* pengembangan *suptech data collection* dan *data analytics*. Pengembangan kedua aspek tersebut dilakukan untuk menangkap dinamika kompleksitas sistem keuangan dan perubahan model bisnis yang terjadi baik dalam level individu pelaku maupun industri secara menyeluruh.

Pada Triwulan IV 2024, Bank Indonesia telah melakukan pengembangan lanjutan *suptech analytics* untuk mengidentifikasi risiko pada sistem keuangan. Pengembangan *suptech analytics* yang dilakukan antara lain mencakup alat proyeksi arus kas perbankan berdasarkan perilaku historis dengan pemanfaatan AI, *network analysis* untuk mengidentifikasi dan memantau perkembangan struktur dan interkoneksi pelaku pasar keuangan dan penyedia jasa sistem pembayaran, serta pengembangan *suptech* lanjutan terhadap *early warning*

tools dalam mendeteksi potensi tekanan likuiditas melalui penyempurnaan model untuk meningkatkan akurasi interpretasi dalam pengawasan sistem keuangan. Di samping itu, pengembangan *suptech* juga dilakukan terhadap *behavior analysis* yang dapat mendukung asesmen terhadap proyeksi pertumbuhan kredit bank dalam kondisi *baseline* maupun berdasarkan hasil *stress testing* sebagai salah satu upaya pencapaian kredit yang optimal. Sepanjang triwulan IV 2024 juga dilakukan pengembangan *cashflow projection* menggunakan model *autoregressive* dan indikator harian berupa USD-IDR harian, serta suku bunga IndONIA sebagai pendukung data proyeksi yang lebih akurat.

Pengembangan *suptech analytics* dimaksud diharapkan dapat berkontribusi dalam proses identifikasi risiko sistemik dan pemantauan perilaku entitas dalam sistem keuangan, serta asesmen terintegrasi. Selain itu, telah dilakukan pengembangan lanjutan *surveillance mobile application* yang berfungsi sebagai *platform* untuk menyajikan data dan informasi pengawasan secara lebih interaktif, dinamis, dan terkini. Pengembangan tersebut mencakup antara lain penyediaan berbagai *chart* historis *behavior* neraca bank berdasarkan hasil perhitungan dengan pemanfaatan AI. Aplikasi tersebut telah terintegrasi dengan DWP sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih efisien.

4.1.3. Transformasi di Bidang Sistem Pembayaran

1) Reformasi Regulasi Area Sistem Pembayaran

Bank Indonesia memperkuat kerangka kerja Kebijakan Sistem Pembayaran yang sejalan dengan BKBI. Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia tengah menyusun pengaturan PBI dan ketentuan internal tentang Kebijakan Sistem Pembayaran yang merupakan bagian dari ketentuan-ketentuan yang menginduk pada PBI No. 4 Tahun 2024 tentang BKBI. Pengaturan dimaksud diharapkan dapat menjadi pedoman bagi perumusan dan pelaksanaan Kebijakan Sistem Pembayaran agar sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam pencapaian tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang, serta menjadi acuan bagi pihak eksternal dalam pelaksanaan Kebijakan Sistem Pembayaran.

2) Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Sistem Pembayaran

Bank Indonesia terus memperkuat infrastruktur sistem pembayaran yang berdaya tahan dan terintegrasi guna mendukung ekosistem ekonomi keuangan digital nasional. Pengembangan

infrastruktur sistem pembayaran terus dilanjutkan untuk memfasilitasi kebutuhan transaksi lintas negara (*cross-border*) yang lebih cepat, mudah, murah, dan andal. Infrastruktur sistem pembayaran diimplementasikan melalui: (i) penguatan stabilitas, skalabilitas, dan sinergi infrastruktur sistem pembayaran ritel dan *wholesale*; (ii) pengembangan BI-Payment Clear untuk memperkuat manajemen risiko dan pemenuhan integritas transaksi; (iii) pengembangan BI-RTGS Generasi III; serta (iv) pengembangan infrastruktur data melalui pengembangan Payment ID, sistem data *capturing*, dan BI-Payment Info.

Pada triwulan IV 2024, pengembangan infrastruktur sistem pembayaran difokuskan pada penguatan stabilitas, skalabilitas, dan sinergi infrastruktur sistem pembayaran ritel dan *wholesale*. Perkembangan transaksi yang menggunakan infrastruktur sistem pembayaran terus tumbuh positif. Perkembangan positif ini tidak terlepas dari dukungan Bank Indonesia yang menyediakan berbagai kemudahan. Implementasi BI-FAST, yang didukung dengan fitur serta merta (*real time*) dan beroperasi tanpa henti (24/7), terus diperluas. Beberapa fitur dalam pengembangan infrastruktur sistem pembayaran yang memberikan kemudahan bagi pengguna mencakup kepesertaan yang terbuka, opsi penyediaan infrastruktur secara independen maupun bersama (*sharing*), penetapan batas maksimal transaksi sebesar Rp250 juta per transaksi, serta skema harga BI-FAST sebesar maksimal Rp2.500 per transaksi kepada nasabah pengirim dengan biaya Bank Indonesia ke peserta pengirim sebesar Rp19 per transaksi. Lebih lanjut, sampai dengan triwulan IV 2024, BI-FAST juga telah menyediakan tiga layanan baru, yakni layanan transfer secara kolektif (*bulk transfer*), pembayaran atas dasar permintaan (*request for payment*), dan transfer debit secara langsung (*direct debit*). Pengembangan infrastruktur sistem pembayaran dimaksud mendorong transaksi BI-FAST tumbuh positif sebesar 57,47% (yoy) atau mencapai Rp2.678 triliun pada triwulan IV 2024.

Pada Triwulan IV 2024, pengembangan infrastruktur sistem pembayaran yang mencakup infrastruktur retail, *wholesale* dan pusat data masih berada pada tahap konsepsi dan eksplorasi. Pada tahap ini, Bank Indonesia melakukan kajian menyeluruh untuk memastikan bahwa setiap aspek pengembangan dapat mendukung stabilitas, keamanan, dan efisiensi sistem pembayaran nasional. Tahap konsepsi ini melibatkan analisis kebutuhan pasar, pengujian konsep teknis, serta identifikasi risiko dan tantangan yang mungkin muncul dalam implementasi. Bank Indonesia juga menjalin komunikasi dengan berbagai pemangku

kepentingan dan industri guna mendapatkan masukan yang relevan dan membangun sinergi yang lebih kuat dalam mendukung keberlanjutan sistem pembayaran yang andal dan inovatif.

3) Penataan Struktur Industri Sistem Pembayaran

Kebijakan sistem pembayaran dalam BSPI 2025 telah mendorong transformasi digital perbankan secara progresif. Hampir seluruh bank umum di Indonesia telah membuka kanal *mobile digital* yang terhubung dengan QRIS untuk melayani kebutuhan transaksi masyarakat. QRIS kini berhasil menghubungkan 31,65 juta UMKM di seluruh Indonesia dari berbagai sektor dengan layanan keuangan digital domestik maupun lintas negara (Thailand, Malaysia dan Singapura). Arah Kebijakan Struktur Industri Sistem Pembayaran ke depan ditujukan untuk mendorong konsolidasi struktur industri melalui penataan akses dan *entry policy* sesuai profil risiko pelaku, penguatan manajemen risiko, dan reformasi regulasi. Konsolidasi struktur diperlukan guna memperkuat kapasitas industri dalam pengendalian risiko sekaligus memperkuat daya saing industri sistem pembayaran. Lebih lanjut, Bank Indonesia telah menerbitkan BSPI 2030 yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pembayaran Indonesia yang berdaya tahan dalam struktur sistem pembayaran yang lebih konsolidatif. Penerbitan BSPI 2030 juga dilakukan sebagai bagian dari komitmen Bank Indonesia dalam memenuhi amanat UU P2SK.

Pada triwulan IV 2024, penguatan struktur industri sistem pembayaran dilakukan melalui peningkatan implementasi sertifikasi kompetensi di bidang sistem pembayaran dan penyusunan kriteria kepesertaan industri dalam penataan struktur industri sistem pembayaran. Aspek Transaksi, Interkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko, dan Infrastruktur Teknologi (TIKMI) digunakan sebagai kriteria dalam penataan aktivitas, kepesertaan infrastruktur sistem pembayaran, dan *interlink* Penyelenggara Sistem Pembayaran (PSP).

Lebih lanjut, dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaku industri di bidang Sistem Pembayaran, Bank Indonesia telah menerbitkan PADG No.17 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran pada 19 November 2024. Penerbitan ketentuan dimaksud dilakukan sebagai pengaturan pelaksanaan dari PBI tentang Standardisasi Kompetensi di bidang Sistem Pembayaran yang mengatur mengenai mekanisme dan hal teknis terkait Standardisasi Kompetensi di bidang Sistem Pembayaran. Standardisasi Kompetensi

di bidang Sistem Pembayaran dilakukan melalui penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Sistem Pembayaran (SKKNI Bidang SP) dan Jenjang Kualifikasi Sistem Pembayaran yang ditetapkan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Sistem Pembayaran.

4) Pengembangan Inovasi dan Perluasan Akseptasi

Bank Indonesia terus berupaya untuk mendukung inovasi dan akseptasi di industri sistem pembayaran. Standardisasi merupakan langkah penting dalam mewujudkan "Satu Bahasa" untuk ekosistem sistem pembayaran digital, yang terus diperluas melalui inisiatif seperti perluasan QRIS Antarnegara dan SNAP yang mendukung implementasi QRIS antarnegara. Implementasi QRIS antarnegara dan pembentukan *working group* ISO 20022 dilakukan dalam rangka meningkatkan transparansi dan efisiensi sistem pembayaran antarpelaku. Implementasi QRIS antarnegara memungkinkan pengguna atau nasabah lembaga keuangan melakukan pembayaran ritel antarnegara dengan mudah dan lancar menggunakan aplikasi pembayaran yang dimiliki. Inisiatif pengembangan tersebut merupakan bagian dari implementasi BSPI 2025, yang telah dilanjutkan menjadi BSPI 2030. Arah strategis perluasan inovasi dan akseptasi ke depan adalah membangun kolaborasi antara Bank Indonesia dengan industri dalam mendorong inovasi dan akseptasi secara seimbang dengan perlindungan konsumen, integritas, stabilitas dan persaingan usaha yang sehat. Tujuan ini akan dicapai melalui tiga besaran kebijakan, yaitu: (i) mendorong inovasi layanan pembayaran; (ii) memperkuat literasi dan akseptasi digital masyarakat; serta (iii) memperkuat aspek manajemen risiko dan perlindungan konsumen. Ketiga besaran strategi ini akan diimplementasikan dalam wadah yang kolaboratif antara Bank Indonesia dengan industri.

Pada Triwulan IV 2024, Bank Indonesia juga telah mengembangkan inovasi fitur dan layanan instrumen pada kanal pembayaran antara lain meliputi persiapan implementasi QRIS Tap yang menggunakan teknologi *Near Field Communication* (NFC) sebagai solusi pembayaran yang lebih praktis dan efisien. Progres pengembangan QRIS Tap NFC telah memasuki tahap uji coba penerapan yang melibatkan 15 PJP dan 4 Penyelenggara Infrastruktur Pembayaran (PIP), serta Perum DAMRI.

Perluasan akseptasi digitalisasi sistem pembayaran juga diperkuat melalui penerapan *Merchant Discount Rate* (MDR) QRIS 0% untuk transaksi sampai dengan

Rp500.000 pada *merchant* Ultra Mikro (Umi) yang berlaku efektif mulai 1 Desember 2024. Selanjutnya, Bank Indonesia juga melakukan QRIS Jelajah Indonesia sebagai terobosan kampanye akseptasi dan literasi digitalisasi di seluruh Indonesia melalui 46 kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada triwulan IV 2024, kampanye QRIS dilakukan sebagai rangkaian kegiatan Indonesia *Sharia Economic Festival* (ISEF) 2024. Kegiatan ini juga memberikan dampak terhadap peningkatan literasi masyarakat untuk sistem pembayaran digital, termasuk QRIS, BI-FAST, dan Kartu Kredit Indonesia (KKI). Selain itu, QRIS Jelajah Indonesia juga mendorong percepatan integrasi ekonomi dan keuangan digital melalui perluasan pemanfaatan instrumen, kanal, dan infrastruktur pembayaran.

5) Pengembangan Konektivitas Sistem Pembayaran Lintas Negara

Bank Indonesia terus melanjutkan komitmen untuk memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas batas melalui kesepakatan kerja sama dengan beberapa bank sentral. Kerja sama dilakukan dalam rangka mewujudkan konektivitas pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif. Kerja sama tersebut juga berpotensi membuka akses pasar bagi para pelaku usaha Indonesia ke kawasan. Bank Indonesia akan terus melakukan perluasan kerja sama *Regional Payment Connectivity* (RPC) dengan negara lainnya. Ke depan, arah strategis dari inisiatif internasional ditujukan untuk mendorong interkoneksi lintas negara beserta perluasannya dalam koridor yang menjamin kepentingan nasional. Inisiatif ini akan diwujudkan melalui dua besaran kebijakan yaitu: (i) memperluas cakupan kerjasama QRIS antarnegara; dan (ii) mempersiapkan infrastruktur sistem pembayaran nasional untuk siap terkoneksi antarnegara. Prinsip yang terkandung dalam kerangka RPC akan menjadi landasan bagi inisiatif ini dalam mengimplementasikan kedua besaran kebijakan tersebut.

Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia tengah menyusun konsep usulan terkait partisipasi Indonesia dalam *Project Nexus*, khususnya dalam pengembangan Tahap 4. Dalam konsep tersebut, Bank Indonesia merekomendasikan strategi dan langkah-langkah untuk memperkuat peran Indonesia dalam sistem pembayaran lintas negara, yang diharapkan dapat memperkuat daya saing ekonomi, serta mendorong pertumbuhan perdagangan dan investasi di Indonesia melalui rencana keterlibatan Indonesia dalam pengembangan Proyek Nexus Tahap 4. Ada pun langkah penguatan peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran lintas negara merupakan kelanjutan

dari partisipasi Bank Indonesia dalam Proyek Nexus Tahap 3 yang menghasilkan Nexus *Blueprint*. Selain itu, pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia telah menyelesaikan *Sandbox* untuk kerjasama QRIS *Cross Border* dengan Jepang. *Sandboxing* dilakukan guna memastikan interoperabilitas sistem pembayaran antarnegara dengan mempertimbangkan aspek risiko operasional terutama dari keamanan. Hasil dari *sandboxing* akan menjadi dasar untuk pengembangan dan penyempurnaan lanjutan guna mendukung pembayaran digital antarnegara yang lebih inklusif dan terintegrasi.

Pengembangan konektivitas sistem pembayaran lintas negara ini bertujuan untuk menghadirkan solusi pembayaran yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif, terutama dalam layanan remitansi, yang berperan penting dalam mendukung perekonomian global. Selain itu, inisiatif ini memastikan bahwa inovasi sistem pembayaran tetap mengedepankan keamanan dan keandalan yang sejalan dengan standar internasional dan regulasi domestik, guna memperkuat integrasi ekonomi digital.

6) Pengembangan Rupiah Digital

Bank Indonesia terus melanjutkan eksplorasi dan eksperimentasi terkait pengembangan Rupiah Digital melalui berbagai langkah strategis. Pengembangan Rupiah Digital akan diarahkan pada eksperimentasi lanjutan dengan fokus pada replikasi fungsi pasar *wholesale* dan pendalaman pasar keuangan. Tujuan ini dicapai melalui besaran strategi sebagai berikut: (i) eksperimentasi penerbitan (*issuance*), pemindahan (*transference*), dan penarikan (*redemption*) *securities ledger*; (ii) eksperimentasi pemanfaatan sekuritas digital dalam *use case* OM dan transaksi keuangan lainnya; serta (iii) eksplorasi pemanfaatan keunggulan *programmability*, *composability*, dan *tokenization* untuk pendalaman pasar keuangan.

Salah satu langkah penting yang telah dilakukan untuk pengembangan Rupiah Digital yaitu peluncuran Laporan Konsultasi Publik, yang merupakan kompilasi dari semua masukan masyarakat terkait konsep pengembangan Rupiah Digital sebagaimana tertuang dalam *Consultative Paper* (CP) Rupiah Digital Tahap I. Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia telah menyelesaikan *Proof of Concept* (PoC) Rupiah Digital untuk tahap pertama *immediate state - wholesale cash ledger* sebagai upaya dalam menguji kesiapan teknologi dalam mendukung pengembangan model bisnis Rupiah Digital. Pengujian dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek teknis yang kritis, keamanan

transaksi, serta interoperabilitas dengan sistem pembayaran dan infrastruktur keuangan yang ada. Ketiga aspek tersebut menjadi fokus mendalam pada perancangan PoC, dengan tujuan memastikan bahwa sistem yang dikembangkan mampu menghadirkan layanan yang efisien, aman, dan andal. Penerbitan laporan PoC ini merupakan bentuk keterbukaan dan kolaborasi Bank Indonesia bersama mitra kerja terkait dalam eksplorasi dan eksperimentasi desain Rupiah Digital. Selanjutnya, Bank Indonesia, melalui Proyek Garuda, melakukan *benchmarking* dan mengkaji desain *Central Bank Digital Currency* (CBDC) untuk memastikan penerapan yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan pasar domestik, serta menyusun CP Proyek Garuda *Intermediate State* sebagai tahapan lanjutan dari CP Rupiah Digital Tahap I.

4.1.4. Transformasi di Bidang Kebijakan Pendukung

1) Reformasi Regulasi pada Area Kebijakan Pendukung

Bank Indonesia senantiasa memperkuat pengaturan kebijakan pendukung melalui penerbitan ketentuan sejalan dengan UU P2SK. Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan terkait data dan informasi untuk memastikan ketersediaan data dan informasi yang berkualitas untuk mendukung perumusan kebijakan yang efektif, kredibel, dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Disamping itu, Bank Indonesia juga menerbitkan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan PUVA yang modern dan maju, yang selanjutnya akan mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi nasional.

Dari sisi regulasi PUVA, Bank Indonesia tengah menyusun peraturan yang menginduk pada PBI No. 4 Tahun 2024 tentang BKBI, diantaranya pengaturan PDG tentang kebijakan PUVA dalam rangka mendukung perumusan terkait pengaturan, pengembangan, dan pengawasan PUVA di internal Bank Indonesia. Melalui penyusunan peraturan tersebut, diharapkan dapat dirumuskan kebijakan PUVA yang didukung dengan kerangka kerja yang memadai, sehingga dapat mengakselerasi pencapaian sasaran Bank Indonesia dalam melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan PUVA, yaitu membangun PUVA yang modern dan maju dalam mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi.

Pada 29 November 2024, Bank Indonesia meluncurkan *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta

Asing (BPPU) 2030. BPPU 2030 dimaksudkan untuk menavigasi arah pendalaman PUVA yang modern dan maju, guna mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pembiayaan ekonomi nasional. BPPU 2030 merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam memenuhi amanat UU PPSK. Sesuai UU PPSK, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan PUVA.

Arah transformasi pendalaman PUVA dalam BPPU 2030 yang dijabarkan lebih lanjut dalam visi BPPU 2030 merupakan penguatan dari arah transformasi dalam BPPU 2025. Penguatan arah transformasi PUVA dalam BPPU 2030 mempertimbangkan dinamika perkembangan PUVA dan berbagai kebijakan terkini sebagai fondasi penting dalam visi BPPU 2030, yaitu:

1. membangun PUVA yang modern dan maju serta terintegrasi dengan OM *pro-market* untuk mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pembiayaan ekonomi nasional;
2. mengembangkan dan mendorong inovasi produk PUVA yang variatif dan likuid, memiliki harga (*pricing*) yang efisien dan kredibel, serta didukung pelaku pasar yang aktif dan kompeten;
3. mengembangkan dan memperkuat infrastruktur PUVA yang memenuhi prinsip interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi (3i) sehingga andal, efisien, dan aman;
4. mengembangkan digitalisasi data PUVA yang granular, *real-time*, dan aman, untuk mendukung pendalaman PUVA, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan; dan
5. memperkuat pengaturan dan pengawasan PUVA sesuai kaidah internasional dan mendukung kerjasama antarnegara dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Selanjutnya, **milestone** pendalaman PUVA yang berhasil dicapai Bank Indonesia pada BPPU 2025 menjadi landasan dalam menetapkan sasaran strategis pendalaman PUVA tahap selanjutnya. Prioritas pendalaman PUVA disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pendalaman PUVA ke depan. Untuk itu, Bank Indonesia menetapkan sasaran strategis BPPU 2030 pada aspek 3P+I, meliputi: (i) sasaran strategis pengembangan produk (*product*); (ii) sasaran strategis pengembangan harga (*pricing*) yang efisien dan kredibel; (iii) sasaran strategis pengembangan pelaku (*participant*) PUVA yang aktif dan kompeten;

serta (iv) sasaran strategis pengembangan infrastruktur (*infrastructure*) PUVA yang 3i. Masing-masing strategi tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam inisiatif-inisiatif yang akan diimplementasikan secara bertahap sampai dengan tahun 2030. PUVA yang berkembang dan efisien akan mendukung pengembangan pasar SBN serta mampu memfasilitasi manajemen likuiditas dan kebutuhan lindung nilai (*hedging*) risiko suku bunga dan nilai tukar bagi dunia usaha dan pembiayaan perekonomian.

Sementara itu, dalam menyediakan data dan informasi yang berkualitas, Bank Indonesia melakukan perolehan, pemrosesan, serta diseminasi data dan informasi. Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan pihak eksternal. UU P2SK telah memperkuat kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan perolehan data dan informasi serta penegasan kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pemrosesan dan diseminasi data dan informasi. Selain itu, UU P2SK juga mengamanatkan pengaturan lebih lanjut terkait data dan informasi dimaksud dalam PBI.

Menindaklanjuti hal tersebut, pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia telah menerbitkan PBI Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia (PBI DIBI). Tujuan pengaturan kebijakan DIBI adalah untuk: i) memastikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan DIBI sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam pencapaian tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang; ii) menjadi acuan bagi pembentukan ketentuan pelaksanaan terkait DIBI; dan iii) menjadi acuan bagi pihak eksternal mengenai pelaksanaan kebijakan DIBI. Kebijakan DIBI dilaksanakan untuk mencapai sasaran ketersediaan data dan informasi yang berkualitas guna memenuhi: i) kebutuhan perumusan dan pelaksanaan BKBI; ii) komitmen nasional dan internasional; dan iii) penyediaan data dan informasi bagi publik. Pelaksanaan kebijakan DIBI didasarkan pada prinsip relevansi, mengacu pada standar profesional dan praktik yang terbaik, berbasis teknologi yang tepat, perlindungan data dan informasi, serta koordinasi dan sinergi dengan pihak eksternal.

2) Pengembangan Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA)

a) Pengembangan Produk dan Pricing Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Langkah reformasi pengaturan PUVA diiringi dengan upaya Bank Indonesia untuk terus mengoptimalkan pengembangan berbagai instrumen moneter *pro-market*. Langkah tersebut

dilakukan untuk memperkuat upaya pendalaman PUVA serta mendukung aliran masuk modal asing ke dalam negeri. Pengembangan PUVA terus dilanjutkan dengan fokus pada aspek *product*, *pricing*, pelaku, dan infrastruktur (3P+1I) dalam rangka mewujudkan pasar uang Rupiah dan valas yang modern, likuid, efisien, transparan, dan berintegritas melalui pengembangan instrumen-instrumen sebagai berikut:

i) Pengembangan Instrumen Repo

Bank Indonesia melanjutkan implementasi *dealer* utama di PUVA yang sejalan dengan akselerasi integrasi pengelolaan moneter dan pengembangan PUVA. Sejak 17 Mei 2024, Bank Indonesia telah menetapkan 18 bank sebagai *dealer* utama PUVA dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter sekaligus mendorong pengembangan PUVA yang lebih likuid, dalam, inklusif, dan kontributif terhadap stabilitas moneter dan sistem keuangan. *Dealer* utama PUVA memiliki hak dan kewajiban dalam mendorong transaksi PUVA sebagai *market maker*, melakukan distribusi likuiditas, dan mendukung masuknya aliran dana asing (*inflow*). Pada tahap inisiasi, kewajiban *dealer* utama PUVA fokus pada peningkatan transparansi harga transaksi repo dan SRBI di pasar sekunder untuk mendorong terbentuknya *price discovery* dan efisiensi harga repo dan harga SRBI di pasar sekunder.

Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja *dealer* utama PUVA, termasuk penyusunan strategi implementasi tahap lanjutan berupa penguatan kewajiban *dealer* utama PUVA. Implementasi penguatan kewajiban dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kesiapan perbankan terutama dari sisi strategi manajemen likuiditas dan risiko operasional. Area penguatan kewajiban tersebut meliputi batasan minimum kepemilikan *counterparty line* antar sesama *dealer* utama PUVA dan antar *dealer* utama PUVA juga diberikan tambahan kewajiban untuk meningkatkan transaksi repo dan transaksi SRBI di pasar sekunder. Rincian kewajiban bagi *dealer* utama PUVA secara lengkap telah dipublikasikan dalam laman Bank Indonesia.

Pada triwulan IV 2024, Rata-Rata Harian (RRH) *outstanding* repo tumbuh signifikan sebesar Rp 70,6 triliun dibandingkan posisi

pada triwulan sebelumnya yang mencapai Rp 56,8 triliun. Pangsa jumlah pelaku repo terhadap total perbankan juga tercatat mengalami peningkatan menjadi sebesar 70% pada triwulan IV 2024 dari sebelumnya sebesar 64% pada triwulan III 2024. RRH transaksi repo dengan *underlying* SRBI masih relatif terbatas, tercatat sebesar Rp1,65 triliun atau 4% dari total transaksi repo pada triwulan IV 2024. Sementara itu, *spread* kuotasi *bid-ask* transaksi repo semakin menyempit pasca implementasi *dealer* utama PUVA yang menunjukkan pembentukan harga di pasar repo yang semakin efisien.

ii) Pengembangan Instrumen DNDF

Bank Indonesia terus mengembangkan DNDF sebagai salah satu instrumen lindung nilai (*hedging*) di pasar valuta asing dalam rangka mendukung stabilitas nilai tukar sejalan dengan arah strategi pengembangan PUVA pada BPPU 2030. Bank Indonesia senantiasa melakukan koordinasi dan sosialisasi sebagai bentuk upaya pengembangan DNDF di pasar valas domestik, salah satunya melalui pembahasan evaluasi secara intensif dengan mitra kerja terkait dalam mengembangkan transaksi DNDF yang dikliringkan melalui *Central Counterparty* (CCP).

Dalam pengembangan BPPU 2030, pengembangan produk pasar valuta asing tetap difokuskan pada pengembangan DNDF. Beberapa inisiatif pengembangan DNDF, yaitu: (i) penguatan peran *dealer* utama PUVA dalam transaksi DNDF melalui jaringan dan akses *dealer* utama PUVA ke berbagai segmen pasar baik antarbank maupun institusi sehingga ditargetkan mampu meningkatkan likuiditas harga DNDF; (ii) penguatan peran *market making* DNDF oleh *dealer* utama PUVA guna meningkatkan interkoneksi *line* DNDF dengan bank lain dan meningkatkan volume transaksi DNDF; serta (iii) pengembangan fitur produk DNDF melalui perluasan *underlying* dan kontrak DNDF.

Sosialisasi dan koordinasi secara *targeted* juga telah dilakukan guna mendorong perkembangan implementasi kebijakan PUVA termasuk sosialisasi dan koordinasi untuk pengembangan DNDF. Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia melakukan sebanyak 4 (empat) kali sosialisasi di Kota Jayapura, Medan, Yogyakarta dan Bali. Sosialisasi

ditargetkan untuk korporasi potensial dengan eksposur valas yang besar untuk mendorong pemanfaatan lindung nilai termasuk DNDF. Rangkaian sosialisasi dan koordinasi juga dilakukan kepada perbankan untuk meningkatkan pemahaman terkait reformasi regulasi transaksi di pasar valuta asing termasuk penguatan pengaturan DNDF. Bank Indonesia akan melanjutkan kegiatan sosialisasi *targeted* kepada pelaku potensial dan

lembaga pendukung transaksi DNDF di tahun 2025. Pada triwulan IV 2024, peningkatan pemanfaatan DNDF pada triwulan laporan didorong oleh peningkatan kebutuhan lindung nilai valas oleh para pelaku pasar sejalan dengan dampak perlambatan ekonomi di negara maju yang mendorong peningkatan *capital inflow* dan dukungan inisiatif pengembangan DNDF oleh Bank Indonesia.

digitalisasi, dan kolaborasi lintas lembaga guna menciptakan ekosistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan.

Melalui pendekatan *end-to-end*, BPPU 2030 menargetkan transaksi repo mencapai Rp30 triliun per hari dan transaksi DNDF mencapai 1 miliar dolar AS per hari pada 2030.

BPPU 2030 diharapkan menjadi katalisator transformasi pasar keuangan Indonesia menuju ekosistem yang lebih modern, maju, dan inklusif.

Melalui inovasi produk, pembentukan harga yang kredibel, penguatan pelaku dan infrastruktur, serta sinergi antar pemangku kepentingan, implementasi BPPU 2030 diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam mendukung perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan konsistensi dan komitmen bersama, BPPU 2030 akan memperkuat stabilitas sistem keuangan, mengoptimalkan transmisi kebijakan moneter, dan membuka peluang baru bagi pembiayaan ekonomi nasional yang lebih kuat dan inklusif.

Boks 2. Peluncuran *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030



Peluncuran *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2025-2030 di Jakarta

Dengan semangat "Sinergi Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional", Bank Indonesia secara resmi meluncurkan *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030 pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) tanggal 29 November 2024. Dengan tema besar "Mengkakselerasi Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA)", BPPU 2030 diharapkan memperkuat peran pasar keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Peluncuran BPPU dalam agenda PTBI turut dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, jajaran pimpinan lembaga negara, menteri kabinet, kepala daerah, pimpinan industri keuangan, akademisi, media nasional, serta perwakilan lembaga internasional, mencerminkan sinergi lintas pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Peluncuran ini menjadi momentum dalam mendorong inovasi, kolaborasi, dan pertumbuhan ekonomi.

BPPU 2030 hadir untuk menavigasi arah pendalaman PUVA guna mewujudkan PUVA Asing yang modern

dan maju ditengah berbagai tantangan strategis seperti ketidakpastian global, percepatan digitalisasi, serta kebutuhan pembiayaan ekonomi yang semakin kompleks. Strategi utama BPPU 2030 mencakup tiga pilar, yakni:

1. Pengembangan Produk dan Harga: Inovasi produk seperti DNDF dan repo diarahkan untuk meningkatkan volume transaksi dan mendukung pembentukan harga yang kredibel dan transparan, antara lain melalui penguatan peran market making dealer utama dan pengembangan *money market curve* dan *fx forward curve*.
2. Pendalaman Pelaku dan Infrastruktur: Fokus pada penguatan kompetensi pelaku pasar melalui sertifikasi dan kode etik, serta pengembangan infrastruktur berbasis teknologi terkini yang memenuhi prinsip interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi.
3. Sinergi dan Koordinasi: Penyelarasan kebijakan moneter dengan pendalaman pasar PUVA,

iii) Reformasi Suku Bunga Rupiah

Sejalan dengan rencana implementasi penghentian publikasi *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR) yang akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2026, Bank Indonesia bekerjasama *Bloomberg Index Service Limited* (Bloomberg) telah mempublikasikan *fallback rate* JIBOR yang telah memenuhi standar yang berlaku di pasar keuangan global pada tanggal 31 Oktober 2024. Bloomberg telah ditunjuk oleh *The International Swaps and Derivatives Association* (ISDA) sebagai lembaga yang menghitung dan memublikasikan *fallback rate* termasuk *spread adjustment*, menggunakan metode perhitungan yang dikembangkan setelah berkonsultasi dengan pelaku pasar keuangan global. *Fallback rate* JIBOR dihitung menggunakan *Compounded INDONIA* ditambah dengan *spread adjustment*. Sementara itu, perhitungan *spread adjustment* dilakukan menggunakan metodologi ISDA (*5 years median spread* JIBOR - INDONIA). Adapun *fallback rate* dapat digunakan sebagai suku bunga pengganti JIBOR khususnya untuk kontrak keuangan *legacy* JIBOR yang akan jatuh tempo setelah JIBOR tidak lagi dipublikasikan.

iv) Pengembangan Produk PUVA Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank Indonesia terus mendorong pengembangan instrumen dan transaksi PUVA syariah untuk mendukung pendalaman pasar keuangan dan manajemen likuiditas. Bank Indonesia senantiasa berkoordinasi dengan *Self Regulatory Organization* (SRO) PUVA, asosiasi profesi tresuri syariah, dan

pelaku pasar uang syariah untuk mendorong transaksi pasar uang syariah yang mencakup transaksi Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA), transaksi Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA), transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA), dan repo syariah. Upaya ini antara lain ditempuh melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama SiPA, sosialisasi *Islamic Financial Market Code of Conduct* (ICoC) dan ketentuan PUVA syariah, serta *refreshment* tresuri syariah kepada pelaku pasar.

b) Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Bank Indonesia melanjutkan upaya pengembangan pelaku PUVA dalam rangka mewujudkan pelaku PUVA yang kompeten, berintegritas, aktif, dan kolaboratif. Pengembangan kompetensi dan integritas pelaku PUVA diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi bersama Asosiasi Pasar Uang dan Valuta Asing Indonesia (APUVINDO). Setelah ditetapkan sebagai SRO PUVA sejak 5 Maret 2024, APUVINDO telah berperan aktif dalam mendukung program peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku PUVA. APUVINDO sebagai mitra strategis Bank Indonesia juga secara aktif mendorong pelaku PUVA untuk memenuhi kewajiban kepemilikan sertifikat tresuri sesuai jenjang jabatan dan mendaftarkan tresuri *dealernya* ke Bank Indonesia sesuai mandat UU P2SK dan PBI PUVA. Selain itu, *Association Cambiste Internationale Financial Market Associations* (ACI FMA) Indonesia sebagai penyelenggara Sertifikasi Profesi Tresuri terus melanjutkan pelaksanaan



High Level Meeting Bank Indonesia dan Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia (APUVINDO) di Jakarta

ujian dan *refreshment* program sertifikasi bagi *dealer* dalam rangka mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam mewujudkan pelaku PUVA yang kompeten dan berintegritas.

Bank Indonesia melanjutkan upaya pengembangan pelaku PUVA melalui kepemilikan sertifikasi *tresuri*. Sepanjang triwulan IV 2024 telah dilakukan 7 (tujuh) kali pembekalan sertifikasi *tresuri* oleh APUVINDO untuk jenjang 5 (dasar), 6 (menengah), dan 7 (lanjut). Program tersebut meliputi pelaksanaan pembekalan dalam rangka persiapan pelaksanaan sertifikasi *tresuri* bagi *dealer*. Sejalan dengan hal tersebut, APUVINDO terus berkoordinasi secara erat dengan ACI FMA Indonesia sebagai penyelenggara sertifikasi *tresuri* dalam upaya penguatan kualitas penyelenggaraan sertifikasi profesi *tresuri* antara lain melalui standardisasi skema, modul, dan asesor.

Bank Indonesia juga memperkuat konsolidasi pelaku PUVA melalui evaluasi implementasi *dealer* utama PUVA dan penguatan peran APUVINDO sebagai mitra strategis Bank Indonesia di PUVA. *Dealer* utama PUVA telah menjalankan perannya dalam melakukan redistribusi likuiditas di pasar uang, menjadi *market maker*, serta mendukung *inflow* non residen di pasar keuangan domestik. Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia telah melakukan penguatan peran dan kewajiban *dealer* utama PUVA melalui

implementasi kewajiban baru berupa penetapan mekanisme pemberian fasilitas untuk *dealer* utama PUVA yang telah memenuhi kewajiban. Di samping itu, untuk mewujudkan ekosistem pelaku PUVA yang kolaboratif, APUVINDO terus melakukan penguatan kelembagaan sebagai mitra strategis Bank Indonesia dalam pengembangan PUVA. Pada 5 Desember 2024, APUVINDO bersama Bank Indonesia, telah menyelenggarakan sosialisasi dengan topik *onboarding* keanggotaan pelaku PUVA yang terdiri dari perbankan, pialang pasar uang, asosiasi profesi, dan penyelenggara infrastruktur, serta kode etik pasar (*Market Code of Conduct* atau MCoC) kepada pelaku PUVA yaitu bank dan pialang pasar uang.

Bank Indonesia juga berperan aktif dalam *Global Foreign Exchange Committee* (GFXC) dalam upaya mewujudkan pengembangan PUVA yang kredibel dan berintegritas. Bank Indonesia, sebagai *associate member* GFXC, hadir dalam *bi-annual meeting* GFXC yang diselenggarakan pada 5-6 Desember 2024 dengan topik pembahasan terkait pengkinian *FX Global Code* ('*The Code*') dan isu terkini di pasar keuangan global. Pada kegiatan tersebut, Bank Indonesia bersama APUVINDO juga hadir sebagai narasumber untuk menyampaikan perkembangan pasar keuangan domestik dan upaya yang telah dilakukan untuk penerapan kode etik pasar uang. '*The Code*' versi terbaru yang akan menjadi panduan penerapan

kode etik global direncanakan untuk diterbitkan pada awal tahun 2025. Ke depan, Bank Indonesia dan APUVINDO akan melakukan penginian MCoC sebagai panduan kode etik pasar untuk pelaku PUVA Indonesia yang diselaraskan dengan '*The Code*' versi terbaru. Sejalan dengan upaya tersebut, APUVINDO juga akan berperan sebagai *public register* surat pernyataan komitmen terhadap kode etik pasar untuk pelaku PUVA sebagai bentuk pengakuan dan komitmen nyata pelaku PUVA dalam upaya penerapan praktik terbaik di PUVA.

c) Pembentukan Kelembagaan dan Pengembangan CCP untuk Transaksi Suku Bunga dan Nilai Tukar

Bank Indonesia terus mendukung penyelenggaraan CCP. CCP merupakan infrastruktur pasar keuangan yang menyediakan jasa kliring, penjaminan, dan manajemen risiko untuk transaksi antar bank di PUVA. Bank Indonesia berkoordinasi dengan penyelenggara CCP untuk memastikan pengembangan CCP sesuai dengan peraturan yang berlaku dan standar internasional *Principles for Financial Market Infrastructures* (PFMI) yang dikeluarkan *Committee on Payments and Market Infrastructures* dan *International Organization of Securities Commissions* (CPMI-IOSCO). Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung tata kelola dan manajemen risiko CCP yang komprehensif. Penyelenggaraan CCP juga dilakukan dengan memperhatikan aspek 3I (interkoneksi, interoperabilitas dan integrasi) dengan infrastruktur pasar keuangan lainnya, termasuk mendukung pengembangan Rupiah Digital dan *Digital Securities* yang akan diakomodasi pada *Central Bank Digital Currency - CBDC Platform*. Bank Indonesia terus melakukan koordinasi teknis dengan penyelenggara CCP, perbankan, dan penyedia *electronic trading platform* untuk memastikan berjalannya konektivitas sistem CCP yang *straight-through processing* (STP), termasuk dengan BI-RTGS dan BI-SSSS yang merupakan sistem setelmen dana dan surat berharga. Di samping itu, Bank Indonesia terus berkoordinasi dan bersinergi dengan OJK mengenai implementasi pengaturan transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar antar bank yang tidak dikliringkan melalui CCP (*Non-Centrally Cleared Derivative* atau NCCD) dan *capital requirement* bank atas eksposur bank terhadap CCP yang diterbitkan oleh OJK.

Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia melanjutkan koordinasi dan sinergi dengan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sebagai penyelenggara CCP, Bursa Efek Indonesia (BEI), 8 (delapan) bank anggota CCP serta APUVINDO untuk mengupayakan penguatan terhadap sejumlah aspek implementasi CCP. Seiring dengan dimulainya operasional PT KPEI sebagai penyelenggara CCP pada 30 September 2024, PT KPEI telah mengadakan sosialisasi kepada pelaku pasar, termasuk bank devisa dan asosiasi, pada hari Senin, 25 November 2024. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan jumlah partisipan dalam CCP terutama bank devisa yang telah banyak melakukan transaksi DNDF. Selanjutnya, pada hari Senin, 2 Desember 2024, Bank Indonesia juga melaksanakan *workshop* dengan narasumber ISDA. *Workshop* dilakukan dalam rangka mengeksplorasi berbagai pandangan atas implikasi operasional dan legal dari *central clearing* kepada pelaku pasar, termasuk pandangan tentang peran Bank Indonesia, KPEI dan pelaku pasar dalam mewujudkan transisi yang lancar (*seamless*). *Workshop* dihadiri oleh OJK, LPS, KPEI, bank *dealer* utama PUVA, APUVINDO dan PERBINA. *Workshop* telah berhasil mengelaborasi sejumlah topik penting antara lain aspek legal dan operasional *central clearing*, *indirect clearing* dan implikasinya serta pengakuan dari yurisdiksi global untuk CCP yang diakui secara resmi (*recognized CCP*) dari yurisdiksi global untuk CCP yang bermanfaat dalam pengembangan bisnis CCP ke depan. Koordinasi level teknis terkait kesiapan aspek operasional serta rencana peningkatan kliring transaksi melalui CCP secara intensif terus dilakukan untuk mengevaluasi implementasi CCP pada tahap awal. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung peran dan kontribusi CCP dalam mengakselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing, termasuk mendukung efektivitas kebijakan moneter dan peningkatan kapasitas pembiayaan perekonomian.

Lebih lanjut, Bank Indonesia telah memberikan status *Qualifying CCP* (QCCP) kepada KPEI yang dinilai telah memenuhi standar internasional, yaitu *Principles for Financial Market Infrastructures* dan juga telah mengakomodasi penyelesaian secara *close-out netting*. Selain itu, KPEI juga telah mengakomodasi mekanisme *close-out netting*, yaitu penyelesaian transaksi keuangan dengan menghitung kewajiban pembayaran secara bersih jika terjadi *default* atau gagal bayar dari salah satu

pihak. Pada tahap awal implementasi, CCP masih berfokus pada kliring instrumen DNDF dan repo, dengan implementasi penambahan produk yang akan diperluas secara bertahap mempertimbangkan volume transaksi dan kesiapan pasar, termasuk infrastruktur. Ke depan, Bank Indonesia juga akan mendukung penuh rencana pengajuan pengakuan CCP menjadi *recognized* CCP dari yurisdiksi global di tahun 2025, dalam bentuk kesetaraan kerangka regulasi pengaturan dan pengawasan CCP. Status *recognized* CCP ini diperlukan untuk memperluas cakupan bisnis dengan menyediakan layanan kliring kepada anggota yang berada pada lingkup yurisdiksi tersebut.

4.2. Transformasi Kelembagaan

Sejalan dengan penerbitan UU P2SK Pasal 58 yang menegaskan pentingnya penerapan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional, serta dukungan kelembagaan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan, Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka Bauran Kebijakan Kelembagaan (BKK). Penguatan kerangka BKK merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh elemen kelembagaan Bank Indonesia mampu mendukung pencapaian tujuan institusi secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip kepatuhan. Selanjutnya, penguatan kerangka BKK diwujudkan melalui reformasi regulasi berupa penyusunan ketentuan internal tentang BKK dan penyusunan/*revisit* ketentuan turunan lainnya di area kelembagaan.

Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia telah menetapkan pokok-pokok ketentuan internal tentang BKK yang mengintegrasikan bauran kebijakan kelembagaan pada tiga lingkup kelembagaan yakni dukungan organisasi, sumber daya, dan tata kelola guna mewujudkan kinerja efektif, efisien, dan berkepatuhan. Penerapan BKK dilakukan melalui strategi 3P, yaitu perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap masing-masing kebijakan di area kelembagaan yang dilaksanakan secara terintegrasi. Ketentuan internal tentang BKK juga disusun sebagai acuan untuk mengintegrasikan keseluruhan proses BKK dengan BKBI, sehingga dapat menyelaraskan strategi jangka menengah dan tahunan antara area kelembagaan dengan area kebijakan. Lebih lanjut, pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia melakukan penajaman agenda transformasi di area kelembagaan yang mencakup 3 area yaitu: (i) organisasi dan proses kerja; (ii) SDM dan budaya kerja; dan (iii) digital. Transformasi kelembagaan diarahkan pada penguatan

organisasi yang optimal, digitalisasi proses kerja yang efektif dan efisien, serta pengembangan SDM yang berintegritas, kompeten, dan adaptif. Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat proses kerja kebijakan dan kelembagaan guna mewujudkan visi sebagai bank sentral digital terdepan melalui *Digital Business Process Reengineering* (BPR).

4.2.1. Organisasi dan Proses Kerja

Pada area organisasi dan proses kerja, fokus transformasi diarahkan untuk mendukung penguatan kerangka BKK Bank Indonesia melalui reformulasi regulasi kelembagaan serta penyempurnaan proses bisnis dan organisasi. Hal ini ditempuh guna mewujudkan organisasi yang profesional dan bertata kelola baik dengan didukung ketentuan serta proses bisnis dan organisasi yang terstandarisasi, tersimplifikasi, dan tersistemisasi, serta sejalan dengan kebutuhan di era digital.

1) Reformasi Regulasi pada Area Organisasi dan Proses Kerja

Reformasi regulasi pada area organisasi dan proses kerja merupakan langkah transformatif yang dilakukan untuk meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan efisiensi proses bisnis di Bank Indonesia sehingga dapat terus beradaptasi dengan dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks. Reformasi regulasi juga dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan maupun pelaksanaan tugas pada area organisasi dan proses kerja dapat berjalan secara optimal. Untuk itu, pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia melakukan penguatan ketentuan mencakup: (i) ketentuan turunan BKK, yang menitikberatkan pada keselarasan dan integrasi kebijakan di area kelembagaan; (ii) ketentuan mengenai Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber (KKS), yang bertujuan melindungi sektor keuangan nasional dari ancaman siber; serta (iii) ketentuan mengenai Pengaturan Informasi Bank Indonesia (PIBI), yang memastikan pengelolaan informasi secara transparan dan bertanggung jawab.

Bank Indonesia memperkuat kerangka kerja area kelembagaan yang sejalan dengan BKK. Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia telah melakukan penyempurnaan landasan hukum pada masing-masing fungsi di area kelembagaan. Penyempurnaan dilakukan dengan penyusunan ketentuan turunan BKK terkait dukungan organisasi, sumber daya dan tata kelola. Pertama, terkait dukungan organisasi, penyusunan ketentuan mencakup: (i) manajemen strategis dan program kerja yang terintegrasi; serta (ii) manajemen proses bisnis dan fungsi organisasi yang terintegrasi, selaras, dan lengkap. Kedua, terkait sumber daya,

penyusunan ketentuan mencakup: (i) manajemen sumber daya keuangan yang terukur; serta (ii) pengelolaan kekayaan yang akuntabel dan transparan. Dan ketiga, terkait tata kelola, penyusunan ketentuan mencakup: (i) pengendalian risiko yang handal melalui manajemen risiko; (ii) pengendalian internal melalui manajemen audit intern; serta (iii) kecukupan dan kepatuhan terhadap ketentuan melalui manajemen fungsi hukum. Keseluruhan penguatan dilakukan untuk memastikan keselarasan integrasi antarkebijakan dalam BKK maupun keselarasan masing-masing kebijakan di area kelembagaan dengan ketentuan BKK sebagai ketentuan induknya.

Selanjutnya, sebagai upaya mitigasi risiko siber, Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber bagi penyelenggara sistem pembayaran, pelaku PUVA, serta pihak lain yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. Hal ini dilakukan Bank Indonesia sebagai upaya dalam mendukung akselerasi ekonomi keuangan digital yang berkelanjutan. Di samping itu, penguatan ketentuan dimaksud dilakukan sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko siber dimana digitalisasi pada sektor keuangan tidak hanya membantu pertumbuhan ekonomi keuangan digital yang berkelanjutan, tetapi juga menimbulkan dampak lain berupa peningkatan eksposur risiko siber. Insiden siber yang terjadi pada sektor keuangan dapat menimbulkan kerugian keuangan dan mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Terkait hal tersebut, pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan internal yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber di Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia telah menerbitkan PADG No.24 Tahun 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber bagi PSP, Pelaku PUVA, serta Pihak Lain yang Diatur dan Diawasi Bank Indonesia pada 31 Desember 2024 sebagai bentuk tindak lanjut dari terbitnya PBI No.2 Tahun 2024 tentang KKS pada 18 April 2024. Penyusunan ketentuan tersebut ditujukan untuk mengatur hal-hal yang bersifat operasional dan memperjelas implementasi KKS bagi internal Bank Indonesia serta eksternal penyelenggara sistem pembayaran serta pihak lainnya.

Sebagai lembaga publik yang akuntabel dan transparan, Bank Indonesia juga melaksanakan pengelolaan Informasi sejalan dengan Pasal 64B ayat (5) UU P2SK, yaitu Bank Indonesia diamanatkan untuk menyusun ketentuan lebih lanjut mengenai kerahasiaan, penggunaan, dan pengungkapan

informasi. Pengaturan terkait pengelolaan informasi, data pribadi, dan keterbukaan informasi diperlukan dalam pelaksanaan kewajiban Bank Indonesia sebagai badan publik untuk melindungi data pribadi yang dikelola sekaligus sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penggunaan data pribadi kepada publik.

Dalam kaitan ini, pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan internal terkait PIBI sebagai kerangka pengaturan payung di area informasi. PIBI bertujuan untuk mengatur penetapan dan penerapan klasifikasi informasi Bank Indonesia guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia sesuai dengan amanat UU P2SK, dengan mempertimbangkan kewajiban menjaga informasi rahasia dan perlindungan data pribadi, serta kewajiban keterbukaan informasi publik. Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia telah menetapkan pokok-pokok rancangan ketentuan internal tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Perlindungan Data Pribadi (PDP).

2) Business Process Re-engineering (BPR)

Sejalan dengan visi organisasi sebagai bank sentral digital terdepan, penyempurnaan DWP terus dilakukan melalui penajaman proses bisnis, evaluasi kebutuhan, pengembangan *platform*, dan pengujian untuk mewujudkan prinsip *one input, one process, multi purposes*. Penyempurnaan DWP pada triwulan IV 2024 berfokus pada pengembangan BPR untuk proses perumusan bauran kebijakan Bank Indonesia. Selain itu, upaya perbaikan yang berkelanjutan terus dilakukan untuk memastikan kehandalan dari DWP dalam menunjang pekerjaan pegawai.

Pada triwulan IV 2024, telah diimplementasikan pemanfaatan *Digital Workplace* dalam proses perumusan kebijakan Bank Indonesia yang dimulai pada November 2024. Selain itu, intensifikasi rencana penyempurnaan *Digital Workplace* ke depan bagi proses perumusan kebijakan Bank Indonesia juga telah dilakukan secara bertahap. Penyempurnaan akan dilakukan dengan menerapkan prinsip ruang kerja kolaboratif (*collaborative platform*) didukung materi yang terintegrasi (*straight-through process* dari pusat data) dengan tetap mengutamakan aspek tata kelola (*governance*). Dalam memudahkan pegawai untuk menggunakan *Digital Workplace*, telah dilaksanakan sosialisasi, pembaruan dokumen pedoman, infografis, dan *Frequently Asked Question* (FAQ) secara berkala serta ketersediaan tim layanan untuk membantu pengguna. Ke depan, pengembangan *Digital Workplace* akan

terus dilakukan untuk *business process reengineering* pengambilan keputusan lainnya.

4.2.2. Transformasi SDM dan Budaya Kerja

Pelaksanaan digital BPR juga didukung penguatan aspek manusia melalui penguatan kepemimpinan, pengembangan kapabilitas baru, serta penguatan *Employee Value Proposition* (EVP). Transformasi SDM dilakukan melalui penerapan sistem kerja unggul di era digital yang didukung oleh fasilitas fisik dan digital untuk mencapai kinerja organisasi yang optimal. Sistem kerja ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja di seluruh lini organisasi. Selain itu, sistem kerja unggul di era digital diharapkan dapat memperkuat EVP Bank Indonesia yang pada akhirnya berdampak positif terhadap upaya memenuhi SDM dengan talenta terbaik dan menciptakan suksesi kepemimpinan yang berkelanjutan.

1) Penguatan Strategi Perencanaan SDM dan Suksesi Kepemimpinan

Bank Indonesia terus mendorong SDM yang berkinerja tinggi dan berakhlak mulia guna mewujudkan visi menjadi bank sentral digital terdepan. Dalam kaitan itu, Bank Indonesia mengoptimalkan strategi pengelolaan SDM yang didukung oleh *Digital Business Process* (DBP). Hal ini diharapkan dapat menghasilkan SDM yang unggul baik dari sisi kompetensi teknis maupun kompetensi perilaku, guna menciptakan calon pemimpin Bank Indonesia yang profesional dengan memiliki aspek 3-Smart, yaitu: berkompetensi (*book smart*), berpengalaman (*street smart*), dan berperilaku mulia (*spiritual smart*).

Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia telah menyusun perencanaan SDM jangka menengah serta strategi pemenuhan SDM dalam rangka akselerasi pencapaian aspek 3-Smart. Dari aspek kuantitas, perencanaan SDM ditempuh melalui evaluasi atas kelompok talenta (*pool of talent*) untuk pegawai level *officer* dan *non officer* yang mencakup asesmen kompetensi, potensi kepemimpinan, dan kesehatan. Lebih lanjut, guna meningkatkan asesmen perencanaan SDM Bank Indonesia, pemetaan kualitas SDM dilaksanakan berdasarkan asesmen potensi yang telah dilakukan untuk pegawai pangkat Asisten Manajer s.d Manajer. Asesmen potensi tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi karakter dan kompetensi kepemimpinan pegawai secara lebih objektif yang dilihat dari 3 aspek, yaitu kemampuan dalam merumuskan visi strategis (*strategic visioning*), kemampuan menuntaskan pekerjaan (*get things done*), dan kemampuan berkoordinasi (*coordination/the power of we*). Hasil

asesmen tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk mempertajam indikator kepemimpinan pegawai Bank Indonesia. Di samping itu, dari aspek kualitas, telah disusun perencanaan melalui penguatan Program Tugas Belajar (PTB) berupa target jumlah kandidat PTB dan program studi yang dituju dengan memperhatikan kebutuhan Bank Indonesia akan keahlian di masa depan (*future skill*). Dalam mendukung akselerasi pencapaian aspek 3-Smart, Bank Indonesia juga telah mengembangkan HR *Super Apps* sebagai *platform* untuk meningkatkan pengalaman pegawai (*employee experience*) dalam melakukan perencanaan karir guna mendorong penguatan kinerja, pengembangan kompetensi, dan pemeliharaan kesehatan pegawai.

2) Penguatan Strategi Pemenuhan SDM

Di tengah disrupsi inovasi era digital yang memengaruhi pola ketenagakerjaan dan keahlian baru, peningkatan pemenuhan SDM berkualitas semakin diperlukan. Bank Indonesia telah melakukan transformasi pada area pemenuhan SDM melalui penyempurnaan strategi rekrutmen dan penguatan manajemen karier pegawai. Hal ini bertujuan agar pegawai memiliki kepemimpinan yang kuat dan dapat bekerja secara optimal di era digital.

Pada triwulan IV 2024, strategi pemenuhan SDM dari eksternal dilakukan dengan: (i) skema *build* melalui rekrutmen Pendidikan Calon Pegawai Muda (PCPM); (ii) skema *buy* melalui rekrutmen *pro-hire* untuk mengisi jabatan yang memerlukan kompetensi khusus; dan (iii) skema *borrow* melalui rekrutmen tenaga kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk pekerjaan yang sifatnya sementara atau berbasis proyek (*project based*), untuk mengisi pekerjaan yang akan selesai dalam waktu tertentu. Pencarian kandidat pegawai, dapat dilakukan dengan cara rekrutmen terbuka (*open recruitment*) dan rekrutmen terarah (*targeted*). Pemenuhan *open recruitment* tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan SDM yang semakin berkualitas khususnya dari sisi keilmuan digital dan mendukung persiapan suksesi kepemimpinan ke depan. Penguatan strategi rekrutmen *targeted* juga dilakukan dengan memperluas kerja sama dalam menjangkau lulusan terbaik, di dalam maupun luar negeri. Pemenuhan lulusan terbaik dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) jalur *campus hiring* dalam negeri dan lembaga pengelola program pendidikan ke luar negeri seperti, Chevening dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Untuk memperoleh calon Pegawai Bank Indonesia yang berkompeten, berperilaku dan berakhlak mulia, terdapat penajaman pada beberapa tahapan seleksi,

antara lain melalui asesmen dinamika kepribadian pada aspek K3 (Kepemimpinan, Kematangan, dan Karakter) serta KISS (Kepercayaan Diri/Konfiden, Konsistensi, Inovasi, Sinergi, dan Syukur). Selain itu, Bank Indonesia melakukan peningkatan keamanan dan keandalan sistem *web* rekrutmen dan tes secara daring, serta kepatuhan terhadap keterbukaan informasi publik dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan data individu pelamar sebagaimana UU Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Selanjutnya, dalam rangka mendukung Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber (KKS) Bank Indonesia, telah dilakukan penyempurnaan pada dokumentasi perjanjian kerja antara Bank Indonesia dengan calon pegawai maupun pihak ketiga sebagai upaya mitigasi risiko siber.

3) Pengembangan Kapabilitas Digital SDM Bank Indonesia

SDM yang kompeten merupakan modalitas utama dalam pelaksanaan mandat Bank Indonesia, terlebih di era digital dan situasi perekonomian global yang penuh dinamika. Untuk itu Bank Indonesia melakukan upaya pengembangan SDM dengan berbagai kapabilitas di area kebijakan utama kebanksentralan dan kebijakan kelembagaan yang didukung kapabilitas digital sebagai kapabilitas pendukung digitalisasi proses kerja di masing-masing area. Kapabilitas ini diperlukan untuk mendukung digitalisasi proses kerja dan meningkatkan adaptasi dan adopsi perubahan teknologi sehingga SDM dapat lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas lembaga di era digital.

Pada triwulan IV 2024, program pengembangan kompetensi yang dilakukan Bank Indonesia telah mencakup berbagai level pegawai baik pegawai *officer* maupun *non-officer*. Pengembangan desain kurikulum Bank Sentral Digital untuk mendukung program pembelajaran dengan penguatan kapabilitas digital kebanksentralan dilakukan sesuai dengan kebutuhan digitalisasi pada masing-masing area bidang tugas. Implementasi program pengembangan kapabilitas didukung dengan infrastruktur pembelajaran yang memadai baik pengajar/narasumber dari dalam dan luar negeri, serta platform pembelajaran *Learning Management System* (LMS) yang dilengkapi dengan modul *e-learning* baik dari internal Bank Indonesia maupun dari pihak eksternal – mitra pembelajaran, serta pengembangan Digital/Cyber Library. Fitur-fitur dalam LMS juga mendorong pegawai untuk belajar secara mandiri, dari mana saja, dan kapan saja sesuai kebutuhannya, sehingga proses pembelajaran dan proses kerja dapat tetap dijalankan secara selaras,

efektif, dan efisien. Pengembangan kapabilitas digital yang dilakukan juga mencakup kompetensi tingkat lanjut (*advance*) terkait pengolahan *big data*, *data analytics*, *data science*, dan penggunaan AI dalam rangka mendukung perumusan kebijakan, pengembangan kapabilitas ekonomi dan keuangan digital, serta kapabilitas ekonomi dan keuangan hijau.

Penguatan kompetensi digital pegawai yang dilakukan Bank Indonesia pada triwulan IV 2024 telah mencakup aspek konseptual digitalisasi serta dampaknya pada ekonomi dan keuangan, aspek teknis analisis indikator utama kebijakan, serta aspek legal dan *ethics* pemanfaatan AI untuk melengkapi *future skills* dan suksesi kepemimpinan Bank Indonesia di era digital. Proses pengembangan dan penguatan kompetensi digital dilakukan melalui berbagai jalur program pendidikan, baik program pengembangan kompetensi untuk calon pegawai dan pegawai potensial, program *in house training* reguler, maupun program peningkatan karir untuk seluruh level pegawai. Upaya penguatan kompetensi dimaksud telah membawa Bank Indonesia mendapatkan re-akreditasi *Corporate Learning Improvement Process* (CLIP) dari *European Foundation for Management Development* (EFMD) dengan akreditasi tertinggi selama 5 (lima) tahun, setelah akreditasi sebelumnya diperoleh pada tahun 2019. Bank Indonesia secara konsisten memperoleh akreditasi dimaksud mempertimbangkan bahwa model pembelajaran dalam pengembangan kapasitas pegawai Bank Indonesia telah mengedukasi seluruh pegawai hingga *top management*.

4.2.3. Transformasi Digital

Transformasi digital Bank Indonesia terus dilakukan untuk mendukung pelaksanaan transformasi kebijakan dan kelembagaan guna tercapainya visi Bank Indonesia menjadi bank sentral digital terdepan. Transformasi digital dilakukan melalui perwujudan inovasi pada tiga area yang meliputi: (i) pengembangan *digital business platform* untuk mendukung digitalisasi di area Sistem Pembayaran dan Pendalaman Pasar Uang (*integrated digital payment system and finance*); (ii) pengembangan pusat data dan AI (*integrated digital central bank*), untuk mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan kelembagaan; serta (iii) peningkatan kapabilitas teknologi dan pengamanan secara menyeluruh (*integrated digital technology*).

1) Pengembangan Digital Business Platform

Bank Indonesia terus melakukan pengembangan *digital business platform* yang diprioritaskan pada digitalisasi sistem pembayaran dan digitalisasi proses pengambilan

keputusan. Digitalisasi sistem pembayaran dilakukan melalui pengembangan perluasan cakupan sistem BI-FAST dan eksplorasi inovasi Rupiah Digital berupa Proyek Garuda. Selain itu, transformasi juga diarahkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan tata kelola dalam proses pengambilan keputusan melalui *platform Digital Workplace* untuk mendukung pelaksanaan RDG yang diimplementasikan secara bertahap.

Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia telah melakukan upaya pengembangan *digital business platform* sebagai berikut:

- a) **Digitalisasi sistem pembayaran dilakukan melalui implementasi pengembangan dan perluasan fitur BI-FAST yang meliputi *direct debit*, *credit bulk*, dan *request for payment*.**

Pengembangan dan perluasan fitur BI-FAST dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan menjaga ketersediaan layanan BI-FAST kepada masyarakat. Sampai dengan triwulan IV 2024, Bank Indonesia telah menyelesaikan pengembangan BI-FAST Fase I Tahap 2 yang mencakup penyediaan tiga layanan baru, yakni layanan transfer secara kolektif (*bulk transfer*), pembayaran atas dasar permintaan (*request for payment*), dan transfer debit secara langsung (*direct debit*). Perluasan fitur dimaksud juga dilaksanakan melalui kerja sama Bank Indonesia bersama industri Sistem Pembayaran dalam mendorong inklusi keuangan dan infrastruktur sistem pembayaran ritel yang lebih efisien.

- b) **Digitalisasi proses kerja dilakukan melalui pengembangan digitalisasi *Decision Making Process* (DMP)**

Bank Indonesia telah menyelesaikan pengembangan *platform* DWP khususnya terkait fungsi-fungsi umum dan juga fungsi pengelolaan konten pada pelaksanaan RDG Bulanan. Pengembangan DWP akan terus dilanjutkan dalam rangka mengakomodasi STP antar tahapan pengambilan keputusan (DMP) yang didukung oleh pemanfaatan kapabilitas analisis data (*data analytics*) dan AI serta untuk memastikan tercapainya pola kerja *hybrid* yang menyeluruh (*end-to-end*).

2) Pengembangan Pusat Data

Bank Indonesia terus melanjutkan pengembangan Pusat Data dalam rangka inovasi data dan digital untuk mendukung ekonomi digital serta mendukung proses bisnis kebijakan dan kelembagaan. Sebagai pusat

perubahan (*epicentrum of change*) dari transformasi digital Bank Indonesia, pengembangan pusat data dan pengelolaan informasi digital tetap berfokus pada langkah nyata untuk mewujudkan Institusi berbasis data (*data-driven Institution*), diantaranya adalah pemanfaatan AI dan *machine learning* (ML) untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Pengembangan pusat data mencakup 2 (dua) besaran tema, yaitu sebagai katalisator proses bisnis di Bank Indonesia dan penguatan kapabilitas pusat data. Kedua tema tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan pusat data secara *end-to-end* dimulai dari pengayaan konten, otomasi pengaliran dan penyiapan data melalui *straight through process* dari pusat data (*data gathering*) ke Power BI untuk mendapatkan visualisasi data (*data factory*), eksplorasi dan inovasi pengolahan data baru termasuk pengembangan AI (*data innovation*), serta pengembangan *platform* dan Infrastruktur Pusat Data (*data platform*) yang seluruhnya berujung pada dukungan untuk menciptakan proses pembuatan keputusan yang lebih tepat dengan menggunakan teknologi berbasis data (*decision led intelligent*).

Pada Triwulan IV 2024, Bank Indonesia terus melanjutkan pengayaan konten dan otomasi pengaliran data dalam menyiapkan AI/ML untuk mendukung *use case data analitik di area kebijakan dan kelembagaan*. Bank Indonesia telah mengimplementasikan penerapan AI/ML yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Penerapan ini akan terus diperkuat dan diperluas seiring dengan perkembangan kebutuhan bisnis dan teknologi di Bank Indonesia.

Dari sisi teknologi, dilakukan pengembangan *platform data secara bertahap*. Saat ini sedang dikembangkan Portal Data agar hasil pengolahan data dapat diakses secara internal dan eksternal. Keberadaan teknologi tersebut bertujuan untuk melengkapi infrastruktur/*platform data* yang saat ini tersedia seperti *Data Lake*, *Data Catalog*, *Data Preparation*, *Data Visualization*, dan *Data Repository Loader and Connector*. Teknologi *Generative AI* (GenAI) juga telah diimplementasikan untuk menghasilkan narasi asesmen terhadap indikator *nowcasting* dan *forecasting*. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkaya konten data dan hasil olahan, termasuk untuk mendukung kebutuhan data statistik dan publikasi kebijakan Bank Indonesia baik dalam bentuk visualisasi bagan (*chart*) maupun dalam bentuk narasi.

3) Peningkatan Kapabilitas Infrastruktur Teknologi

Bank Indonesia mendorong peningkatan kapabilitas infrastruktur teknologi yang bertujuan untuk

meningkatkan kapabilitas dan kualitas Sistem Informasi (SI) dalam mendukung pelaksanaan tugas. Peningkatan kapabilitas infrastruktur teknologi juga dilakukan untuk memitigasi potensi risiko ketahanan dan keamanan siber melalui adopsi teknologi terkini, sertifikasi, dan penguatan monitoring infrastruktur teknologi. Penerapan inovasi baru maupun peremajaan infrastruktur teknologi yang ada (*existing*) terus dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas infrastruktur teknologi.

Pada triwulan IV 2024, peningkatan kapabilitas infrastruktur teknologi terus dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas sistem informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Salah satu upaya yang terus dilakukan adalah mengidentifikasi dan memitigasi ancaman siber serta memperkuat *monitoring tools* perangkat infrastruktur teknologi. Penerapan inovasi teknologi khususnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas, stabilitas dan ketersediaan layanan sistem informasi (SI) Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia terus melakukan penguatan *data center* (DC) melalui penambahan kapasitas ruangan dan penguatan fasilitas pendukung DC dengan mengacu pada standar internasional. Bank Indonesia juga mempersiapkan infrastruktur teknologi SI untuk pembangunan KOPERBI melalui penyiapan perangkat Jaringan Komunikasi Data (JKD) dan perangkat kerja SI (*End User Devices*).

4) Penggunaan Data dan AI dalam Analisis

Bank Indonesia memanfaatkan data dan AI sebagai katalisator dalam transformasi berbagai proses bisnis. Pada triwulan IV 2024, Pusat Data Bank Indonesia terus memberikan layanan penyediaan data rutin berdasarkan Daftar Jadwal Penerbitan (*Advanced Release Calendar*/ARC), serta inovasi data dalam bentuk *forecasting* dan *nowcasting* yang menggunakan AI dan ML yang telah dikembangkan oleh para *engineer*, *data scientist* serta para *economist* Bank Indonesia.

Pemanfaatan AI di Bank Indonesia mengacu pada prinsip VITAL (*Visualizing the outcomes, Theory understood, Algorithm fitted, dan Learn the meaning*) sehingga AI dapat digunakan secara optimal dalam implementasi proses bisnis di Bank Indonesia.

Pemanfaatan AI dan ML telah diimplementasikan pada sektor Moneter, Makroprudensial, dan Sistem Pembayaran. Pemanfaatan AI/ML dalam proses pengambilan keputusan di sektor Moneter dilakukan melalui pengembangan dalam bentuk *forecasting* dan *nowcasting* model prediksi ekonomi yang lebih akurat. Pada sektor moneter, model prediksi dimaksud antara lain proyeksi untuk inflasi (*core dan volatile food*), PDB (komponen konsumsi rumah tangga, perumahan dan perlengkapan, serta transport dan komunikasi), nilai tukar, *yield USD*, dan *portfolio inflows*. Pada sektor Makroprudensial, AI/ML membantu menemukan pola atau tren terkait kredit total, kredit konsumsi, kredit modal kerja, *non performing loan*, *interest coverage ratio*, suku bunga kredit, *yield SBN*, *capital expenditure*, dana pihak ketiga dan rasio AL/DPK untuk melengkapi wawasan asesmen makroprudensial. Sementara itu, pada sektor Sistem Pembayaran, AI dapat menganalisis data dalam skala besar (*big data*) seperti analisis transaksi berbasis simpanan, berbasis uang elektronik, dan berbasis kartu kredit, termasuk interkoneksi antarpelaku transaksi.

Penguatan juga dilakukan dari sisi otomasi aliran data melalui STP sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Melalui STP, data diperoleh secara langsung dari sumber terkait, disiapkan dan diolah di Pusat Data hingga didiseminasikan dalam berbagai bentuk *output*. Seluruh kapabilitas ini juga akan dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan pada BKK yang saat ini telah menyelesaikan tahapan *piloting* sebagai *quick win*. Pengembangan ini dilanjutkan secara bertahap untuk mendukung integrasi *Strategic Management*, *Strategic Finance* dan *Strategic Risk* dalam tata kelola kelembagaan Bank Indonesia.



Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat

BAB 5

Capaian Kinerja Bank Indonesia

Di tengah beratnya tantangan perekonomian global dan domestik, serta tuntutan implementasi dari amanat UU P2SK, Bank Indonesia dapat mencapai berbagai target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan memberikan dampak yang signifikan dan bermakna bagi perekonomian Indonesia. Capaian ini menunjukkan efektivitas respons kebijakan Bank Indonesia yang sejalan dengan perkembangan ekonomi dan lingkungan strategis terkini, didukung oleh penajaman sejumlah agenda transformasi, baik di area kebijakan maupun kelembagaan. Selain itu, upaya menjaga kredibilitas kelembagaan melalui penguatan kerangka dan implementasi sistem tata kelola yang baik dan profesional juga turut mendukung pencapaian kinerja Bank Indonesia. Pencapaian kinerja Bank Indonesia sepanjang triwulan IV 2024 tecermin pada capaian IKU Bank Indonesia dalam 12 Program Strategis (PS) sebagai berikut:

PS 01 Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Bank Indonesia terus berupaya untuk mendorong efektivitas transmisi kebijakan moneter. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui penguatan *framework* bauran kebijakan ekonomi dan moneter yang mendukung efektivitas bauran kebijakan Bank Indonesia. Penguatan *framework* pengelolaan moneter juga diintegrasikan dengan pengembangan pasar uang. Hal ini dilakukan dalam rangka memperkuat pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar sesuai fundamental untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

1) Inflasi yang rendah dan stabil melalui pengendalian inflasi inti sebagai akuntabilitas Bank Indonesia

Inflasi inti 2024 terjaga pada level rendah sebesar 2,26% (yoy). Tingkat inflasi inti tersebut juga berada di kisaran sasaran inflasi IHK sebesar 2,5±1%. Perkembangan ini sejalan dengan ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik, *imported inflation* yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank

Indonesia, serta dampak positif dari pengembangan digitalisasi.

Bank Indonesia menetapkan kebijakan suku bunga secara *forward looking* dan *pre-emptive* untuk memastikan inflasi terjaga dalam kisaran sasarannya. Sepanjang triwulan IV 2024, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga kebijakan BI-Rate sebesar 6,00%, sebagai bentuk konsistensi dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025, serta turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya pada Januari 2025, Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6,50%. Keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya prakiraan inflasi 2025 dan 2026 yang terkendali dalam sasaran 2,5±1%, terjaganya nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental untuk mengendalikan inflasi dalam sasarannya, dan perlunya upaya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi dalam sasarannya dan nilai tukar yang sesuai fundamental, dengan tetap mencermati ruang untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan nasional.

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah). Sinergi bersama Pemerintah dilakukan khususnya untuk swasembada pangan dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan dukungan penuh oleh 46 kantor perwakilan di seluruh wilayah Indonesia. Sinergi kebijakan untuk memperkuat ketahanan pangan tersebut juga merupakan salah satu wujud dukungan Bank Indonesia terhadap program Asta Cita. Dengan konsistensi kebijakan suku bunga dan sinergi kebijakan pengendalian inflasi tersebut, inflasi IHK terus terjaga dalam kisaran sasarannya 2,5±1%. Inflasi IHK pada 2024 tercatat sebesar 1,57% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi IHK pada 2023 sebesar 2,61% (yoy). Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK tetap terkendali dalam sasarannya. Bank Indonesia terus berkomitmen memperkuat efektivitas kebijakan moneter guna menjaga inflasi tahun 2025 dan 2026 terkendali dalam sasaran, dengan tetap mendukung upaya turut mendorong pertumbuhan ekonomi.

2) Terjaganya nilai tukar Rupiah sesuai fundamental dan mekanisme pasar yang tecermin pada rerata nilai tukar Rupiah triwulanan dalam kisaran yang tolerable

Stabilitas nilai tukar Rupiah terjaga sejalan dengan komitmen kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia. Pada triwulan IV 2024, dinamika geopolitik dunia dan pasar keuangan global berubah cepat seiring memanasnya ketegangan politik di Timur Tengah dan hasil Pemilihan Umum di AS. Dinamika tersebut menyebabkan penguatan nilai tukar dolar AS secara luas dan menimbulkan tekanan pelemahan pada seluruh mata uang dunia, termasuk Rupiah. Nilai tukar Rupiah pada akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp16.102 per dolar AS, atau melemah 4,34% (ptp) dibandingkan dengan level akhir 2023. Akan tetapi, tingkat pelemahan Rupiah masih lebih baik dibandingkan dengan mata uang sejumlah negara lain seperti dolar Taiwan, yen Jepang, dan won Korea yang masing-masing melemah sebesar 6,35%, 10,28%, dan 12,49%. Ke depan, nilai tukar Rupiah diperkirakan akan stabil sejalan dengan positifnya kondisi fundamental ekonomi Indonesia, yaitu menariknya imbal hasil, rendahnya inflasi dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta tingginya komitmen kebijakan moneter Bank Indonesia.

Pada awal triwulan I 2025, nilai tukar Rupiah tetap terkendali di tengah ketidakpastian global yang tinggi. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS pada Januari 2025 (hingga 14 Januari 2025) hanya melemah sebesar 1,00% (ptp) dari level nilai tukar akhir 2024. Perkembangan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS juga relatif lebih baik dibandingkan dengan mata uang regional lainnya, seperti rupee India, peso Filipina, dan baht Thailand yang masing-masing melemah sebesar 1,20%, 1,33%, dan 1,92%. Sebaliknya, nilai tukar Rupiah tercatat menguat terhadap mata uang kelompok negara maju di luar dolar AS dan stabil terhadap mata uang kelompok negara berkembang. Perkembangan tersebut sejalan dengan kebijakan stabilisasi Bank Indonesia serta didukung oleh aliran masuk modal asing yang masih berlanjut, imbal hasil instrumen keuangan domestik yang menarik, dan prospek ekonomi Indonesia yang tetap baik.

Nilai tukar Rupiah yang terjaga sejalan dengan komitmen dan konsistensi Bank Indonesia dalam stabilisasi nilai tukar Rupiah. Di tengah ketidakpastian global, nilai tukar Rupiah tetap terkendali dan bahkan relatif lebih baik dibandingkan dengan mata uang sejumlah negara lainnya. Capaian ini didukung oleh kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dan inovasi instrumen kebijakan moneter *pro-market* yang ditempuh oleh Bank Indonesia. Stabilitas nilai tukar Rupiah dicapai melalui kebijakan suku bunga secara konsisten dan terukur, dengan didukung oleh intervensi di pasar valas,

strategi operasi moneter *pro-market*, dan kecukupan cadangan devisa. Kebijakan suku bunga secara *forward looking* dan *pre-emptive* diarahkan agar inflasi terkendali dalam kisaran sasaran dan memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah. Intervensi valas dilakukan pada transaksi *spot*, DNDF, dan pembelian atau penjualan SBN di pasar sekunder (*triple intervention*). Seluruh instrumen moneter *pro-market*, baik SRBI, SVBI, dan SUVBI terus dioptimalkan untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, di samping untuk mempercepat upaya pendalaman pasar uang dan pasar valas serta mendorong aliran masuk modal asing ke dalam negeri. Penerbitan SRBI telah mendukung upaya peningkatan aliran masuk portofolio asing ke dalam negeri dan penguatan nilai tukar Rupiah, tecermin dari kepemilikan nonresiden dalam SRBI pada akhir Desember 2024 yang mencapai 24,3% dari total *outstanding*. Implementasi *primary dealer* sejak Mei 2024 juga makin meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan repo antarpelaku pasar. Perkembangan positif ini memperkuat efektivitas instrumen moneter dalam stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pengendalian inflasi.

Ke depan, nilai tukar Rupiah diperkirakan stabil didukung komitmen Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik. Seluruh instrumen moneter akan terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi OM *pro-market* melalui optimalisasi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI, untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah.

3) Tercapainya suku bunga pasar uang sesuai dengan suku bunga acuan yang ditetapkan Rapat Dewan Gubernur

Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia mengendalikan suku bunga antara lain melalui pelaksanaan OM kontraksi dan ekspansi, serta penguatan proyeksi likuiditas harian. Sejalan dengan pengendalian yang dilakukan oleh Bank Indonesia, suku bunga pasar uang (IndONIA) bergerak dalam kisaran BI-Rate, yaitu 6,18% pada tanggal 31 Desember 2024. Sementara itu, suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9 dan 12 bulan pada tanggal 27 Desember 2024 sebesar 7,18%, 7,21%, dan 7,30%, meningkat dibandingkan hasil lelang 20 Desember 2024 sebesar 7,16%, 7,20% dan 7,29%. Peningkatan suku bunga SRBI dilakukan ditengah suku bunga kebijakan BI-Rate yang dipertahankan sebesar 6,00%, dengan tetap mendorong efektivitas SRBI

sebagai instrumen OM yang *pro-market*. Langkah ini juga mendukung penguatan struktur suku bunga untuk menjaga daya tarik imbal hasil dan mendorong aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu, pengendalian tingkat suku bunga dilakukan melalui penguatan strategi transaksi *term repo* dan *swap* valas yang kompetitif untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan.

4) **Tercapainya kecukupan cadangan devisa sesuai target yang ditetapkan Rapat Dewan Gubernur**

Pada triwulan IV 2024, posisi cadangan devisa mencapai 155,7 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal, stabilitas makroekonomi, dan sistem keuangan.

Sebagai upaya untuk menjaga kecukupan cadangan devisa, Bank Indonesia senantiasa mengedepankan nilai yang terjaga (*preserved value*) dalam pengelolaan cadangan devisa. Bank Indonesia juga terus menyempurnakan pengaturan dalam pengelolaan cadangan devisa melalui restrukturisasi (*restructuring*) dan pemetaan ulang pengaturan (*remapping*), antara lain melalui penerbitan pengaturan Kerjasama Keuangan Internasional (KKI) dan Pedoman Investasi dalam rangka mendukung kecukupan cadangan devisa. Selain itu, Bank Indonesia melakukan penguatan kebijakan strategis dan proses bisnis melalui digitalisasi, sebagai bagian dari penguatan tata kelola, efektivitas, dan efisiensi dalam menjaga kecukupan cadangan devisa. Bank Indonesia juga senantiasa memastikan kecukupan cadangan devisa sesuai standar internasional untuk mendukung pembayaran utang luar negeri Pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah tersebut.

Selanjutnya, Bank Indonesia terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan bank sentral lain di kawasan melalui program KKI dalam rangka mendukung pengelolaan cadangan devisa. Kerja sama Keuangan Internasional tersebut antara lain dilakukan dengan perpanjangan *Local Currency Bilateral Swap Agreement* (LCBSA) dengan Bank Negara Malaysia dan *Monetary Authority of Singapore*. Ke depan, Bank Indonesia memandang jumlah cadangan devisa akan tetap memadai untuk melaksanakan kebijakan moneter dan memenuhi kewajiban internasional di tengah tantangan ekonomi dan pasar keuangan global.

5) **Ketersediaan data dan statistik yang Lengkap, Akurat, Terkini, dan Utuh (LAKU) untuk perumusan kebijakan Bank Indonesia dan publikasi**

Sampai dengan triwulan IV 2024, Bank Indonesia telah menerbitkan rata-rata 53 publikasi statistik setiap bulan melalui *website* Bank Indonesia dan 30 data dan/atau statistik yang disampaikan secara langsung kepada lembaga internasional. Publikasi tersebut antara lain: (i) Laporan NPI periode triwulan III 2024; (ii) Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia periode triwulan III 2024; (iii) Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) periode Agustus-Oktober 2024; (iv) Perkembangan Uang Beredar periode September-November 2024; (v) Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI) periode September-November 2024; (vi) Statistik Keuangan Daerah (SEKDA) periode September-November 2024 untuk 34 Provinsi di Indonesia; (vii) Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) periode September-November 2024; serta (viii) Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan Indonesia (SPIP) periode September-November 2024.

Bank Indonesia juga menyampaikan data dan statistik secara langsung kepada lembaga/fora internasional sebagai pemenuhan komitmen Indonesia dalam *global surveillance*. Data dan statistik yang disampaikan antara lain: (i) kepada BIS, yaitu *Credit and Money*, *Financial Sector Balance Sheets*, *Government Finance*, *Credit to GDP Gaps*, *Interest Rate and Bond Yields*, *Financial Markets Indicator*, *Prices*, *GDP Output and Demand Indicator*, *Labour Market and Earning*, *Balance of Payments and International Trade*, *Exchange Rates*, dan *Locational Banking Statistics*; (ii) kepada IMF, yaitu *Balance of Payments* (BOP), *International Investment Position* (IIP), *Exchange Rates*, *International Reserves and Foreign Currency Liquidity* (IRFCL), *Financial Soundness Indicators* (FSI), *Money and Banking/Standardized Report Forms* (SRFs), *Analytical Accounts of the Banking Sectors*, *Analytical Accounts of the Central Bank*, *International Liquidity*, dan *Survey of Securities Held as Foreign Exchange Reserves* (SEFER); (iii) kepada OECD, yaitu *Consumer Opinion Surveys*, *Business Tendency Survey*, *Interest Rates*, *Share Prices*, dan *Monetary Aggregates*; serta (iv) kepada *World Bank*, yaitu *Quarterly External Debt Statistics*.

Bank Indonesia juga memublikasikan laporan hasil survei secara luas dalam rangka menyediakan berbagai indikator makroekonomi sebagai acuan bagi mitra kerja. Laporan hasil survei yang dipublikasikan tersebut antara lain Survei Konsumen (SK), Survei Penjualan Eceran (SPE), Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Survei Harga Properti Residensial (SHPR),

Perkembangan Properti Komersial (PPKom), Survei Perbankan (SBank), serta *Prompt Manufacturing Index* (PMI)-Bank Indonesia. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan standar publikasi statistik serta ketersediaan data yang berkualitas, termasuk menjaga konsistensi publikasi, Bank Indonesia secara berkesinambungan terus menjalin komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan K/L, industri, akademisi, lembaga internasional, bank sentral, ataupun mitra kerja lain secara luas.

PS 02 Memperkuat sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Bank Indonesia terus melakukan penguatan asesmen, rekomendasi, dan koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah yang efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, baik pada level nasional maupun regional. Hasil dari sinergi tersebut berkontribusi pada: (i) inflasi yang terkendali di dalam rentang sasaran nasional; (ii) transaksi berjalan yang sehat dan mendukung stabilitas eksternal; (iii) pencapaian target inflasi dan pertumbuhan ekonomi; serta (iv) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung sasaran pencapaian *high income country*.

Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

6) **Terjalinnnya koordinasi dengan Pemerintah untuk mendukung pengendalian inflasi dan reformasi struktural**

Konsistensi bauran kebijakan Bank Indonesia dan eratnya sinergi pengendalian inflasi bersama Pemerintah Pusat dan Daerah mendukung pencapaian inflasi 2024 yang terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1%. Respons kebijakan moneter Bank Indonesia yang *pre-emptive* dan *forward looking* secara konsisten mendukung pengendalian inflasi. Sinergi kebijakan yang makin erat antara Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Daerah, serta berbagai mitra kerja, melalui TPIP dan TPID dalam pelaksanaan GNPIP di berbagai daerah memberikan dampak positif dalam pengendalian inflasi dan pembentukan ekspektasi inflasi. Koordinasi pengendalian inflasi pangan menerapkan strategi 4K yakni keterjangkauan

harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dalam implementasi berbagai program sinergi GNPIP termasuk program dukungan ketahanan pangan, budi daya pangan mandiri, Kerjasama Antar Daerah (KAD), fasilitasi distribusi pangan, operasi pasar murah, digitalisasi data, serta koordinasi dan komunikasi publik yang dilakukan secara terus menerus.

Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia bersama Kementerian/Lembaga anggota TPIP serta berbagai mitra kerja melanjutkan sinergi dalam sejumlah kegiatan TPIP antara lain: (i) evaluasi program kerja TPIP 2024 dan koordinasi rencana program kerja TPIP 2025; (ii) pemantauan risiko inflasi hingga akhir tahun 2024, pembahasan prospek inflasi 2025; serta (iii) koordinasi pengendalian inflasi periode Natal Tahun Baru bersama Kementerian/Lembaga anggota TPIP tingkat Eselon I dan Eselon II Kementerian/Lembaga sebagai persiapan *high level meeting* (HLM) TPIP 2025; serta (iv) koordinasi penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional periode 2025-2027 guna mengawal pencapaian sasaran inflasi di tengah berbagai tantangan struktural maupun siklikal ke depan. Sepanjang triwulan IV 2024, Bank Indonesia juga melaksanakan beberapa Rapat Koordinasi (Rakor) TPIP dan TPID di daerah, antara lain di wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) pada 8 November 2024. Rakor tersebut menyepakati beberapa langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dan efisiensi rantai pasok pertanian termasuk pengendalian inflasi periode Natal Tahun Baru, di antaranya: (i) penguatan sarana produksi-infrastruktur-fasilitas pascapanen; (ii) perlindungan lahan pangan berkelanjutan untuk menjaga ketahanan pangan, peningkatan KAD, peningkatan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR); serta (iii) pengembangan sistem neraca pangan. Ke depan, Bank Indonesia tetap berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama TPIP, TPID, dan mitra kerja lainnya dalam mendukung upaya pengendalian inflasi dan menjaga ekspektasi inflasi melalui berbagai program GNPIP yakni fasilitasi program stabilisasi harga, peningkatan kelancaran distribusi melalui KAD, peningkatan produktivitas melalui dukungan alat mesin pertanian (alsintan), dan penguatan komunikasi kebijakan pengendalian inflasi.

Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi dan sinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di sektor manufaktur. Sampai dengan triwulan IV 2024, Bank Indonesia telah menindaklanjuti 8 tindak lanjut di sektor manufaktur. Hal ini dicapai



Opening Ceremony Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024

melalui pelaksanaan serangkaian program kerja sama dengan Kementerian Perindustrian, meliputi: (i) diskusi terkait penguatan daya saing industri dan pengembangan industri halal, antara lain dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) Optimalisasi Kerja Sama Industri Internasional, FGD Upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), dan FGD *Halal Traceability*; (ii) fasilitasi peningkatan kapasitas UMKM/IKM melalui pengembangan klaster yang mendukung hilirisasi pangan (industri olahan pangan), fasilitasi perluasan akses pasar melalui penyelenggaraan *Indonesia Sharia Economic Festival* (ISEF) 2024, fasilitasi peningkatan akses pembiayaan melalui *business matching*, dan fasilitasi peningkatan literasi digital melalui kegiatan sosialisasi Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK); (iii) penyelenggaraan forum koordinasi implementasi *Local Currency Transaction* (LCT) pada industri otomotif; serta (iv) sosialisasi transisi penghentian publikasi JIBOR kepada pelaku industri. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk melalui pengembangan sektor manufaktur yang kuat dan berdaya saing.

Sinergi dan koordinasi dalam percepatan pengembangan sektor pariwisata khususnya melalui Sekretariat Bersama (Sekber) Pariwisata terus diperkuat. Sampai dengan triwulan IV 2024, Bank Indonesia telah menindaklanjuti 23 tindak lanjut di sektor pariwisata. Koordinasi terus ditempuh dalam rangka memantau kemajuan tindak lanjut kesepakatan

Rakor *High Level* Sekber Pariwisata dan langkah penguatan yang diperlukan untuk mengakselerasi kinerja pariwisata nasional, termasuk peningkatan mobilitas pada akhir tahun dan dukungan kapasitas angkutan udara. Koordinasi Sekber Pariwisata juga difokuskan pada rencana penguatan koordinasi Bank Indonesia dan lintas Kementerian/Lembaga ke depan terutama pada masa transisi pemerintahan baru. Dalam rangkaian rapat koordinasi lintas Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam Sekber Pariwisata pada triwulan IV 2024 disepakati tiga hal penting, yakni: (i) sinergi program yang ditempuh melalui Sekber Pariwisata telah berkontribusi besar dalam mendorong pemulihan pariwisata nasional; (ii) penguatan sinergi program untuk mendorong kinerja pariwisata nasional guna mendukung Asta Cita; serta (iii) penguatan koordinasi Sekber yang selaras dengan struktur kelembagaan dan tata pemerintahan yang baru. Lebih lanjut, sebagai salah satu komitmen tindak lanjut kesepakatan Rakor *High Level* Sekber Pariwisata, telah dilaksanakan puncak penganugerahan kompetisi Inovasi Model Bisnis Desa Wisata Kreatif Unggul (DEWIKU) pada 21 November 2024 sebagai inisiatif untuk mendukung berkembangnya *creative entrepreneurship* di desa wisata.

7) Terjalannya sinergi kebijakan moneter-fiskal untuk menjaga stabilitas makro dan pertumbuhan ekonomi

Bank Indonesia dan Pemerintah terus melanjutkan sinergi kebijakan moneter dan fiskal. Sampai dengan triwulan IV 2024, Bank Indonesia telah menghasilkan

11 rekomendasi pertimbangan kepada Pemerintah. Keberlanjutan sinergi pada triwulan IV 2024 dilakukan melalui penyampaian pandangan Bank Indonesia mengenai evaluasi dan proyeksi pertumbuhan ekonomi, nilai tukar Rupiah, inflasi, serta respons bauran kebijakan Bank Indonesia kepada Pemerintah khususnya Kementerian Keuangan. Pandangan Bank Indonesia tersebut antara lain disampaikan dalam koordinasi mengenai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 dan prospek APBN Tahun Anggaran 2025, termasuk perencanaan pembiayaan, penerbitan dan pengelolaan SBN baik global maupun domestik. Upaya dimaksud di antaranya melalui koordinasi tahunan antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan pada 27 Desember 2024 tentang rencana penerbitan SBN dan operasi moneter tahun 2025. Koordinasi rutin tersebut merupakan bagian dari eratnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk saling memperkuat dalam menjaga stabilitas makroekonomi serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita. Koordinasi dilakukan dalam 7 area kebijakan, yakni: (i) kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dalam memitigasi gejolak global; (ii) koordinasi kebijakan moneter dan fiskal; (iii) upaya mendorong pembiayaan ekonomi melalui KLM; (iv) dukungan dalam mengakselerasi transformasi digital Pemerintah; (v) upaya memperkuat hilirisasi dan ketahanan pangan; (vi) dukungan dalam mendorong pengembangan ekonomi hijau, syariah, dan inklusi; serta (vii) dukungan dalam pembangunan sumber daya manusia.

Disamping itu, penguatan sinergi antara Bank Indonesia dan Pemerintah dilakukan melalui berbagai forum koordinasi. Pada triwulan IV 2024, dilakukan perluasan kerjasama BI – Pemerintah, khususnya dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk mendukung peningkatan iklim investasi dan mendorong daya saing industri, sejalan dengan visi Asta Cita Pemerintah. Penguatan sinergi tersebut diwujudkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) mengenai perizinan terkait sektor keuangan antara Bank Indonesia dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang ditandatangani pada 13 November 2024 sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman (NK) Bank Indonesia dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Kerjasama Bank Indonesia dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bertujuan untuk meningkatkan dan memperlancar pelaksanaan proses perizinan di

sektor keuangan, yang mencakup 3 (tiga) hal utama, meliputi: (i) pemanfaatan data dan informasi perizinan di sektor keuangan; (ii) keterhubungan data; serta (iii) pembahasan proses bisnis, *service level agreement*, atau persyaratan terkait sektor keuangan yang diwujudkan melalui komunikasi, koordinasi, advokasi serta pertukaran data/informasi perizinan di sektor keuangan dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, memperkuat daya saing industri, serta mendorong ekonomi berkelanjutan.

PS03 Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta surveilans makroprudensial untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Bank Indonesia mengimplementasikan kebijakan dan surveilans makroprudensial secara *forward looking* dan inovatif. Hal ini tecermin pada: (i) kisaran pertumbuhan kredit yang sesuai dengan prakiraan makroekonomi; (ii) terjaganya risiko likuiditas 30 bank besar; serta (iii) peningkatan inklusi ekonomi, inklusi keuangan dan keuangan berkelanjutan. Implementasi kebijakan tersebut dimaksudkan untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui upaya mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan dengan tetap memitigasi dan mengelola risiko sistemik, serta mendorong inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan.

Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka mengimplementasikan kebijakan dan surveilans makroprudensial secara *forward looking* dan inovatif sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

8) Tercapainya kisaran pertumbuhan kredit/pembiayaan yang sesuai dengan prakiraan makroekonomi

Pada triwulan IV 2024, kredit perbankan tumbuh sebesar 10,39% (yoy), sedikit lebih tinggi daripada periode yang sama tahun lalu sebesar 10,38% (yoy). Dari sisi penawaran, pertumbuhan kredit didorong oleh terjaganya minat penyaluran kredit perbankan, perbaikan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dibandingkan tahun lalu, berlanjutnya realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan, serta dampak positif dari dukungan kebijakan Bank Indonesia (insentif KLM). Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didukung oleh kinerja usaha korporasi yang terjaga, di tengah konsumsi rumah tangga yang terbatas. Secara sektoral, pertumbuhan kredit pada sebagian besar sektor ekonomi tetap kuat, khususnya pada sektor Industri Pengolahan, Jasa Dunia Usaha, Pertambangan, dan Pengangkutan. Berdasarkan kelompok penggunaan,

pertumbuhan kredit terjadi pada kredit konsumsi, dan kredit investasi, sementara kredit modal kerja mengalami perlambatan. Ke depan, pertumbuhan kredit diperkirakan meningkat dalam kisaran sasaran 11–13% pada 2025 sejalan prospek pertumbuhan ekonomi yang tetap baik dan dukungan kebijakan makroprudensial Bank Indonesia yang diperkuat sejak Januari 2025. Penguatan tersebut dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan kredit kepada sektor ekonomi yang dapat mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Berbagai kebijakan insentif dari Pemerintah diperkirakan dapat mendorong permintaan kredit lebih lanjut.

Bank Indonesia terus memperkuat implementasi kebijakan makroprudensial longgar untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan yang sejalan dengan program Asta Cita serta dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Hingga Desember 2024, Bank Indonesia telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp251,3 triliun, yaitu kepada kelompok bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp117,5 triliun, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sebesar Rp106,9 triliun, Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp24,0 triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) sebesar Rp2,9 triliun. Insentif KLM tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu Sektor Hilirisasi, Sektor Otomotif, Perdagangan, Listrik, Gas, dan Air (LGA), sektor Perumahan, sektor terkait Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Usaha Ultra Mikro, serta Keuangan Inklusif dan Hijau. Selain itu, Bank Indonesia juga mempertahankan kebijakan rasio CCyB sebesar 0%, RIM pada kisaran 84–94%, rasio LTV/FTV paling tinggi sebesar 100% dan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor paling rendah 0%, PLM sebesar 5% dengan fleksibilitas repo sebesar 5% dan rasio PLM syariah sebesar 3,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 3,5%, serta melanjutkan implementasi kebijakan RPLN dan RPIM. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial akomodatif dan mempererat sinergi dengan Pemerintah, KSSK, perbankan, serta dunia usaha agar dapat mendukung peningkatan kredit/pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

9) Terjaganya risiko likuiditas 30 Bank Besar (BB)

Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia turut mendukung terjaganya ketahanan sistem keuangan, khususnya perbankan, di tengah berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global. Berdasarkan asesmen yang dilakukan, perbankan mampu

melanjutkan intermediasi dengan tetap menjaga likuiditas. Hal ini tecermin pada indikator rasio Alat Likuid per Dana Pihak Ketiga yang mencapai 25,59%. Perkembangan tersebut sejalan dengan kenaikan penghimpunan DPK di tengah berlanjutnya akselerasi penyaluran kredit yang diperkuat oleh *stance* kebijakan OM *pro-market* yang mendukung pengelolaan likuiditas dengan tetap mendorong pendalaman pasar uang melalui perbankan. Ke depan, Bank Indonesia akan terus menjaga kecukupan likuiditas sehingga dapat menopang penyaluran kredit/pembiayaan perbankan secara optimal serta memperkuat sinergi dengan KSSK untuk memitigasi berbagai risiko ekonomi akibat dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global yang berpotensi mengganggu ketahanan sistem keuangan domestik.

Bank Indonesia senantiasa mendorong intermediasi yang optimal melalui pelaksanaan *surveilans* dan pengawasan yang mendukung pencapaian sasaran kebijakan makroprudensial seiring dengan implementasi UU P2SK. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap sistem keuangan dengan menggunakan pendekatan *Dynamic Systemic Risk Surveillance* (DSRS) yang bersifat *integrated* dengan mempertimbangkan hasil pengawasan pada pilar moneter-market dan sistem pembayaran. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh elemen sistem keuangan, baik individual maupun industri, termasuk pengawasan terhadap infrastruktur yang mendukung kelancaran sistem keuangan yang dapat berpengaruh terhadap potensi terjadinya risiko sistemik, serta pemantauan perkembangan intermediasi. DSRS diperkuat oleh aspek *risk appetite* dan perilaku bank dalam menganalisis pembiayaan/intermediasi yang disertai dengan *forward looking analysis* untuk melihat pencapaian target intermediasi dengan mempertimbangkan dampak terhadap risiko kredit, likuiditas, dan permodalan. Pendekatan pengawasan DSRS didukung oleh *tools* pengawasan, antara lain *interconnectedness*, *stress test*, dan *contagion analysis*, dengan pemanfaatan teknologi dalam mendukung pelaksanaan *surveilans* dan pengawasan (*Suptech*). Pengawasan terhadap sistem keuangan dimaksud dilakukan sebagai upaya mendorong intermediasi, memitigasi risiko sistemik, dan meningkatkan inklusi keuangan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.

Bank Indonesia juga mengambil *stance* kebijakan OM *Pro Market* yang didukung dengan kerangka pengawasan secara menyeluruh terhadap aspek 3P+I (*product*, *pricing*, *participant*, *infrastructure*) dengan

pendekatan *risk*, *behavioral*, dan *compliance-based* sebagai upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan salah satunya melalui pendalaman pasar keuangan. Selanjutnya, pengawasan DSRS, yang diselaraskan dengan penilaian TIKMI dengan pendekatan *risk-based*, ditujukan sebagai materi asesmen terhadap kegiatan dan aktivitas *dealer* utama PUVA. Hal ini diharapkan dapat turut membangun PUVA yang modern dan maju untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi secara berkelanjutan.

10) Pangsa kredit yang inklusif dan/atau hijau

Bank Indonesia terus mendorong pembiayaan kepada UMKM dalam rangka mendorong inklusi ekonomi dan keuangan. Pada triwulan IV 2024, kredit UMKM tumbuh sebesar 3,37% (yoy). Bank Indonesia terus berupaya mendorong kontribusi bank secara optimal dalam pembiayaan UMKM melalui kebijakan RPIM sebesar 33,55% dan pemberian insentif KLM kepada bank penyalur kredit/pembiayaan untuk UMKM dan KUR, maupun UMi.

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan K/L terkait dalam pengembangan model bisnis dan fasilitasi *business matching* pembiayaan UMKM. Penguatan sinergi dalam rangka mendorong akselerasi pengembangan ekonomi keuangan inklusif dan hijau dalam rangka peningkatan kapasitas dan produktivitas UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan sinergi yang erat antara Bank Indonesia dengan K/L, serta Lembaga Keuangan, dalam pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024 tercatat adanya komitmen *Business Matching* pembiayaan sebesar Rp188,2 miliar (antara 180 UMKM dengan 15 Lembaga Keuangan). Sejalan dengan itu, Bank Indonesia juga memberikan apresiasi kepada bank yang mendukung pembiayaan inklusif.

PS 04 Memperkuat sinergi kebijakan serta pengawasan makroprudensial dengan KSSK dan otoritas terkait untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Bank Indonesia terus melakukan penguatan sinergi kebijakan dan pengawasan makroprudensial antara BI dengan KSSK dan otoritas lain. Sinergi kebijakan makroprudensial yang dilakukan mampu mendukung pertumbuhan kredit yang seimbang dan berkualitas. Selain itu, sinergi dalam pelaksanaan *surveilans* juga mendukung ketahanan sistem keuangan, termasuk pencegahan dan penanganan krisis. Sinergi kebijakan dan pengawasan

dilakukan untuk mendorong peningkatan pembiayaan inklusif dan keuangan berkelanjutan.

Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan serta pengawasan makroprudensial dengan KSSK dan otoritas terkait sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

11) Terjalannya sinergi kebijakan untuk mendukung intermediasi yang seimbang dan berkualitas

Bank Indonesia terus bersinergi dengan OJK melalui harmonisasi kebijakan dan pengaturan untuk mendukung intermediasi yang seimbang dan berkualitas. Sampai dengan triwulan IV 2024, Bank Indonesia telah menyelesaikan 4 tindak lanjut kesepakatan dengan otoritas terkait. Tindak lanjut yang telah dilakukan pada triwulan IV antara lain melakukan proses revisit pengaturan terkait KLM sebagai upaya mendorong intermediasi yang seimbang sejalan dengan upaya pencapaian program Asta Cita. Revisit pengaturan terkait KLM dimaksud bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas likuiditas perbankan sehingga dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsi intermediasi.

Dalam mendukung efektivitas KLM, diperlukan penguatan pengaturan guna memastikan mekanisme insentif yang diberikan tetap terarah dan selaras dengan kondisi sistem keuangan. Persiapan penguatan pengaturan dilakukan melalui pembahasan bersama Komite Kerja Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (KKD) yang dilakukan pada level teknis pada 30 Oktober 2024. Selain koordinasi, harmonisasi rancangan ketentuan bersama OJK dilakukan melalui pemberian tanggapan tertulis terhadap rancangan ketentuan khususnya terkait pandangan yang lebih luas pada aspek mikroprudensial, sehingga proses transmisi dalam rangka mendorong intermediasi yang seimbang dan berkualitas dapat berjalan lebih efektif.

12) Terjalannya sinergi kebijakan untuk mendukung ketahanan sistem keuangan, termasuk pencegahan dan penanganan krisis

Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi lintas otoritas sektor keuangan melalui KSSK. Sampai dengan triwulan IV 2024, Bank Indonesia telah menghasilkan 6 kesepakatan bersama otoritas terkait. Pada 18 Oktober 2024, Bank Indonesia bersama lembaga anggota KSSK menyelenggarakan Rapat Berkala KSSK IV 2024. Rapat Berkala diawali dengan rangkaian *Focus Group Discussion* (FGD) bersama *Chief Economist*

lembaga anggota KSSK untuk berbagi pandangan mengenai *outlook* perekonomian dan kebijakan di masing-masing lembaga. Berdasarkan hasil asesmen kondisi terkini dan analisis *forward looking*, Rapat Berkala KSSK triwulan IV 2024 menyepakati bahwa status SSK nasional pada triwulan III 2024 tetap terjaga, didukung oleh kondisi makroekonomi dan sektor keuangan yang stabil. Namun, ke depan KSSK sepakat untuk memperkuat *coordinated policy*

response dan kewaspadaan terhadap perekonomian dan sektor keuangan dalam negeri. Selain itu, Bank Indonesia bersama lembaga anggota KSSK juga bersinergi menindaklanjuti hasil Simulasi Krisis Nasional (Simkrisnas) yang telah dilaksanakan pada 23 Agustus 2024. Tindak lanjut tersebut dilakukan untuk memperkuat mekanisme penilaian kondisi krisis sistem keuangan dan menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penanganan krisis sistem keuangan.

Boks 3. Hasil Rapat Berkala KSSK IV 2024 Triwulan IV 2024



Press Conference Rapat Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) Triwulan IV 2024 di Jakarta

Gubernur Bank Indonesia bersama Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjaminan Simpanan pada 18 Oktober 2024 bertempat di area Kantor Pusat Bank Indonesia menyelenggarakan konferensi pers hasil Rapat Berkala KSSK IV 2024. Pada Rapat Berkala yang telah dilaksanakan tersebut, KSSK menyatakan bahwa Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) pada triwulan III 2024 tetap terjaga sejalan dengan meredanya tekanan pasar keuangan global serta pelonggaran kebijakan di berbagai negara utama.

Pada akhir triwulan III 2024, meredanya ketidakpastian pasar keuangan global didukung pelonggaran kebijakan moneter beberapa negara utama, seperti AS, Eropa, dan Tiongkok, sejalan dengan tekanan inflasi yang melambat. Namun demikian, memasuki Oktober 2024, sejalan dengan eskalasi geopolitik di wilayah Timur Tengah, risiko ketidakpastian pasar keuangan global kembali meningkat sehingga perlu terus dicermati.

Meski demikian, di tengah dinamika risiko global tersebut, perekonomian Indonesia tetap baik. Pada triwulan III 2024, perekonomian domestik diperkirakan tumbuh di atas 5% secara *year-on-year*. Nilai tukar Rupiah

terus menguat didukung oleh konsistensi bauran kebijakan moneter Bank Indonesia serta meningkatnya aliran masuk modal asing. Sementara itu, inflasi tetap rendah sebesar 1,84% yoy, di dalam kisaran sasaran 2,5±1%.

Dari sisi fiskal, kinerja APBN sampai dengan Agustus 2024 tetap terjaga dengan defisit terkendali. Realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.777,0 triliun atau 63,4% dari target APBN 2024, berkontraksi 2,5% yoy. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp1.930,7 triliun, tumbuh tinggi sebesar 15,3% yoy. Adapun realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp291,9 triliun atau 55,8% dari APBN 2024.

Stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah pelonggaran kebijakan moneter. Kinerja industri perbankan domestik terjaga stabil didukung tingkat permodalan yang tetap kuat. Likuiditas perbankan berada pada level memadai. Kinerja pasar saham domestik pada triwulan III 2024 menguat seiring sentimen positif tren pelonggaran kebijakan moneter bank sentral utama dunia. Sementara itu, perasuransian, perusahaan penjaminan, perusahaan pembiayaan, industri *fintech peer-to-peer lending* terus

tumbuh dengan risiko terkendali. Dari sisi penjaminan simpanan, jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya oleh LPS hingga akhir Agustus 2024 mencapai 99,94% dari total rekening.

Mencermati perkembangan ekonomi dan sistem keuangan, respons kebijakan KSSK dibutuhkan guna memitigasi dampak rambatan global terhadap perekonomian domestik. Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pemerintah terus mengoptimalkan peran APBN sebagai *shock absorber* untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. OJK terus melanjutkan penguatan pengaturan dan

pengawasan sektor jasa keuangan, perlindungan konsumen, pengembangan industri keuangan syariah, serta penerbitan sejumlah peta jalan di sektor keuangan. Sementara itu, LPS terus memastikan terjalannya stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat pada industri perbankan dan asuransi, serta mendorong kinerja ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan. KSSK berkomitmen meningkatkan sinergi dalam mengantisipasi risiko ketidakpastian ekonomi global dan potensi ketegangan geopolitik dunia yang eskalatif terutama rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik, termasuk memperkuat *coordinated policy response* dan kewaspadaan untuk memitigasi berbagai risiko bagi perekonomian dan SSK.

13) Terjalannya sinergi kebijakan dalam rangka mendorong pembiayaan inklusif dan/atau keuangan berkelanjutan

Bank Indonesia turut memperkuat koordinasi dengan mitra kerja dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan berkelanjutan. Sinergi dengan mitra kerja terkait telah menghasilkan 2 kesepakatan. Pada triwulan IV 2024, tepatnya 2 Oktober 2024, Bank Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dengan dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) meluncurkan aplikasi

Kalkulator Hijau sebagai *tools* untuk mendukung upaya perhitungan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) perbankan dan pelaku usaha. Peluncuran aplikasi Kalkulator Hijau juga dilakukan sebagai upaya untuk mencapai target penurunan emisi GRK sesuai komitmen nasional serta sebagai bagian dari laporan tahunan perusahaan yang selaras dengan *International Financial Reporting Standard* (IFRS). Kalkulator Hijau diharapkan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan emisi oleh perbankan dan pelaku usaha, sekaligus menjadi panduan strategis untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau.

Boks 4. Peluncuran Buku Kajian Stabilitas Keuangan dan Kalkulator Hijau



Peluncuran Buku Kajian Stabilitas Keuangan No. 43 dan Kalkulator Hijau di Jakarta

Bank Indonesia bersama dengan Kemenko Marves meluncurkan aplikasi dan buku panduan Kalkulator Hijau. Peluncuran dilaksanakan pada 2 Oktober 2024

bersamaan dengan peluncuran Buku Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) 42. Peluncuran buku panduan dan aplikasi Kalkulator Hijau dilaksanakan dalam

rangka mendukung upaya pengembangan Keuangan Berkelanjutan melalui penghitungan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) oleh perbankan dan pelaku usaha.

Perubahan iklim membawa risiko fisik seperti cuaca ekstrem, banjir, dan kenaikan permukaan laut, serta risiko transisi yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan keuangan. Dampak-dampak tersebut mencakup penurunan nilai aset, penurunan kemampuan bayar korporasi dan rumah tangga akibat perubahan preferensi konsumen, serta kesulitan pembiayaan bagi korporasi yang tidak menerapkan prinsip berkelanjutan. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya transisi menuju keberlanjutan, di mana sektor keuangan memiliki peran penting. Pembiayaan dari sektor publik hanya mampu menutupi sebagian kecil kebutuhan investasi berkelanjutan, sehingga kebijakan keuangan yang mendukung pembiayaan transisi sangat dibutuhkan.

Perbankan memiliki posisi strategis dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon, mengingat dominasi bank dalam sektor keuangan Indonesia sekaligus kontribusinya terhadap emisi GRK. Upaya perbankan untuk meningkatkan pembiayaan rendah emisi akan mendorong selektivitas dalam pemberian kredit, memberikan insentif kepada debitur rendah emisi, serta disinsentif bagi debitur tinggi emisi. Langkah ini tidak hanya mendukung pengurangan emisi karbon,

tetapi juga mendorong transformasi debitur untuk lebih hijau. Ketersediaan data dan informasi yang akurat, termasuk laporan keberlanjutan, menjadi aspek penting untuk menyelaraskan pembiayaan dengan agenda transisi emisi GRK yang lebih rendah. Standar pengungkapan keberlanjutan global diperlukan untuk memastikan data yang dapat dibandingkan antarperusahaan dan negara.

Sebagai respon terhadap tantangan dalam penghitungan emisi, Bank Indonesia bersama Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi mengembangkan aplikasi Kalkulator Hijau. Alat ini dirancang untuk mendukung penghitungan emisi karbon dengan pendekatan yang ramah pengguna, tidak berbiaya, dan bersifat sukarela. Versi awal (v1.0) fokus pada emisi dari bahan bakar (*Scope 1*) dan listrik (*Scope 2*), dengan rencana pengembangan lebih lanjut untuk mencakup *Scope 3* sesuai standar global. Ke depan, ruang lingkup pengembangan kalkulator hijau akan terus diperluas secara bertahap agar sejalan dengan perkembangan global, termasuk terkait pengukuran emisi tidak langsung yang terjadi pada rantai nilai entitas, baik hulu (pemasok) maupun hilir (penjualan/pelanggan). Secara lebih spesifik, sumber emisi, formula, dan faktor emisi pada Kalkulator Hijau akan terus diperbaharui agar semakin lengkap sejalan dengan perkembangan kapasitas dan kemampuan perusahaan serta perkembangan standar global.

PS 05 Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, pengelolaan uang Rupiah, dan percepatan ekonomi keuangan digital untuk memelihara stabilitas sistem pembayaran dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Bank Indonesia terus melakukan penguatan dan implementasi kebijakan Sistem Pembayaran, termasuk dalam pengelolaan uang Rupiah. Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai stabilitas Sistem Pembayaran melalui digitalisasi Sistem Pembayaran untuk efisiensi transaksi dan ekosistem EKD, terselenggaranya sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman dan andal, serta tersedianya uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya.

Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, pengelolaan uang Rupiah, dan percepatan ekonomi keuangan digital untuk memelihara stabilitas sistem pembayaran dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

14) Infrastruktur Sistem Pembayaran yang terintegrasi, interkoneksi, dan interoperabilitas, serta aman dan handal

Tingkat kestabilan dan tingkat ketersediaan layanan infrastruktur sistem pembayaran, baik untuk transaksi nilai besar maupun ritel, masih tetap terjaga. Secara umum, tingkat kestabilan dan ketersediaan layanan seluruh Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, yaitu BI-RTGS, SKN BI dan BI-FAST, hingga saat ini masih berjalan dengan baik dalam melayani kebutuhan transaksi masyarakat. BI-FAST merupakan perwujudan komitmen Bank Indonesia dalam melakukan modernisasi infrastruktur ritel yang bersifat *national driven*, memiliki fitur *real-time*, beroperasi tanpa henti (24/7), serta memungkinkan transfer dana dengan biaya rendah.

Pada triwulan IV 2024, total volume transaksi BI-FAST tercatat sebesar 1.042 juta transaksi dengan total nominal transaksi sebesar Rp 2.678 triliun, atau masing-masing tumbuh positif sebesar 57,5% (yoy) dan 53,2% (yoy). Di samping itu, jumlah peserta BI-FAST sampai dengan triwulan IV 2024 telah mencapai

126 peserta, yang terdiri dari 123 Bank, 2 Lembaga selain Bank (LSB), dan 1 pihak lain yang disetujui Bank Indonesia. Pada Triwulan IV Bank Indonesia menyediakan 3 layanan baru pada BI-FAST yang merupakan tahapan pengembangan BI-FAST Fase I Tahap 2 pada 21 Desember 2024. Ketiga layanan baru tersebut yakni layanan transfer secara kolektif (*bulk transfer*), pembayaran atas dasar permintaan (*request for payment*), dan transfer debit secara langsung (*direct debit*). Penguatan layanan BI-FAST merupakan salah satu upaya Bank Indonesia untuk terus mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional melalui infrastruktur *fast payment* yang akan menjadi *game changer* untuk mengantisipasi perkembangan transaksi digital ke depan, termasuk dalam memfasilitasi transaksi lintas negara.

15) Terwujudnya ketahanan industri Sistem Pembayaran untuk mendorong industri Sistem Pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif berdasarkan praktik pasar yang sehat, efisien, dan wajar

Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia terus berupaya menjaga ketahanan industri sistem pembayaran agar tetap kuat dengan tingkat ketersediaan layanan sistem pembayaran oleh industri yang terjaga dengan baik. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pengawasan terhadap industri sistem pembayaran dan memastikan kepatuhan pelaku industri terhadap ketentuan. Bank Indonesia juga secara berkelanjutan mewujudkan kerja sama dengan ASPI dan industri dalam rangka terus meningkatkan kualitas implementasi manajemen risiko serta standar keamanan sistem informasi dari produk dan layanan jasa pembayaran, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen.

Tingkat *availability* infrastruktur TI pendukung layanan Sistem Pembayaran (SP) terjaga sejalan dengan sistem pendukung SP untuk mengatasi gangguan pada layanan SP yang dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat dengan tingkat rerata ketersediaan layanan (*availability*) infrastruktur teknologi informasi yang terjaga. Penyelenggara Sistem Pembayaran terus melakukan langkah-langkah mitigasi dan perbaikan antara lain berupa pememajaan internal *firewall*, pengadaan perangkat PAM, serta penerapan *tools* keamanan siber.

Lebih lanjut, dalam rangka *reinforcement* ketentuan, Bank Indonesia secara rutin melakukan sosialisasi kepada industri Sistem Pembayaran. Pada 29 November 2024, Bank Indonesia mengadakan sosialisasi ketentuan terkait KKS kepada seluruh

Penyelenggara Sistem Pembayaran, untuk memastikan terjaganya kerahasiaan dan ketersediaan informasi dan/atau Sistem Informasi Penyelenggara dari serangan siber dan terjaganya kelangsungan bisnis Penyelenggara melalui tindakan antisipatif, adaptif, dan proaktif terhadap ancaman siber serta kemampuan Penyelenggara untuk melakukan respons dan pemulihan dengan cepat terhadap insiden siber.

Bank Indonesia juga senantiasa melaksanakan pengawasan pada area sistem pembayaran. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan surveilans pada area sistem pembayaran, secara rutin Bank Indonesia melakukan pemantauan ketat (*close monitoring*) terhadap Penyelenggara Sistem Pembayaran agar layanan SP tidak digunakan untuk memfasilitasi aktivitas ilegal, khususnya perjudian *online*, melalui pelaksanaan *cyber patrol*, serta mendorong Penyelenggara Sistem Pembayaran untuk melakukan *cyber patrol* mandiri. *Cyber patrol* tersebut merupakan patroli yang dilakukan Bank Indonesia dalam rangka mempercepat identifikasi *website* dan/atau rekening yang terindikasi terlibat dalam perjudian *online*, untuk kemudian dikomunikasikan kepada PJP/PIP terkait secara rutin. Selanjutnya, PJP/PIP melakukan verifikasi terhadap *website* dan/atau rekening tersebut serta menindaklanjuti melalui penutupan/pemblokiran rekening dan melaporkan *website* tersebut ke Kementerian terkait untuk dilakukan penutupan.

16) Dukungan instrumen pembayaran digital untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia mendorong perkembangan transaksi, pengguna, dan *merchant* QRIS agar terus berakselerasi dan melampaui target. Total pengguna QRIS secara keseluruhan tercatat sebanyak 55,4 juta. Selain itu, terdapat peningkatan jumlah *merchant* QRIS menjadi 35,9 juta. Akselerasi QRIS juga terus berlanjut dengan kenaikan volume transaksi mencapai 175,17% (yoy) dan nominal transaksi mencapai 166,36% (yoy), sehingga sampai dengan triwulan IV 2024 volume transaksi QRIS mencapai 6,46 miliar transaksi.

Dalam mendukung perkembangan transaksi pembayaran digital tersebut, Bank Indonesia terus mendorong digitalisasi instrumen dan kanal sistem pembayaran untuk perluasan ekonomi dan keuangan digital serta penguatan stabilitas sistem dan layanan pembayaran. Upaya ini dilakukan antara lain melalui:

- Akselerasi QRIS berupa: (i) perluasan kerjasama QRIS Antarnegara dengan Jepang, Korea Selatan, India, dan UAE ; (ii) pemanfaatan teknologi QRIS

Tap Berbasis NFC yang telah memasuki tahap uji coba sebagai alternatif alat pembayaran transportasi di Jabodetabek; iii) mengkaji penyesuaian kebijakan tarif MDR QRIS secara progresif dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi salah satunya melalui implementasi kebijakan MDR QRIS sebesar 0% untuk transaksi Rp500.000 di *merchant* usaha mikro; serta (iv) perluasan akseptasi QRIS melalui sosialisasi secara *targeted* kepada komunitas prioritas dan bersinergi dengan inisiatif lainnya, antara lain melalui penyelenggaraan FEKDI X KKI dan QRIS Jelajah Indonesia;

- b) Pengembangan KKI pada segmen ritel semakin diperluas melalui uji coba implementasi QRIS Tap NFC, yang dilakukan pada 20 Desember 2024 di moda transportasi DAMRI di Jakarta. Uji coba ini merupakan langkah lanjutan dari pelaksanaan *soft launch* QRIS Tap berbasis NFC, yang bertujuan untuk menguji kesiapan teknis dan memastikan tingkat keberhasilan yang optimal;
- c) Menyusun langkah-langkah implementasi BSPI 2030 yang berfokus pada aspek pengembangan infrastruktur dan konsolidasi struktur industri; dan
- d) Mendorong konsolidasi struktur industri dalam ekosistem EKD dalam rangka memperkuat interkoneksi antar pelaku dan memitigasi risiko *shadow banking*.

17) Terpeliharanya kelancaran dan efisiensi transaksi lintas negara

Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia terus melanjutkan komitmen untuk memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas batas. Hingga akhir tahun 2024, transaksi *cross border* telah mencapai 2,08 juta transaksi. Hal ini dicapai melalui upaya optimalisasi kerja sama sistem pembayaran antarnegara melalui penyelenggaraan sosialisasi QRIS *Cross Border*. Penguatan kerja sama konektivitas sistem pembayaran lintas negara telah dilakukan antara Bank Indonesia dengan India, Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok melalui persiapan teknis dan diskusi dengan masing-masing negara. Kerja sama ditujukan untuk menghubungkan sistem pembayaran antarnegara guna memfasilitasi sistem pembayaran yang lebih cepat, efisien, transparan, dan terjangkau, yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan ekonomi di kedua negara.

18) Pengembangan Rupiah Digital *Wholesale Central Bank Digital Currency* (CBDC) sesuai rencana

Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia terus melakukan eksplorasi dan uji coba dalam proses pengembangan Rupiah Digital dengan berbagai langkah strategis. Bank Indonesia telah menyelesaikan PoC *Wholesale Rupiah Digital Cash Ledger* sebagai upaya dalam menguji kesiapan teknologi dalam mendukung pengembangan model bisnis Rupiah Digital, serta melakukan *benchmarking* dan penajaman topik dalam rangka mendukung Proyek Garuda. Bank Indonesia juga tengah mengkaji desain CBDC untuk memastikan penerapan yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan pasar domestik dan menyusun CP Proyek Garuda *Intermediate State* sebagai tahapan lanjutan dari CP Rupiah Digital Tahap I.

19) Ketersediaan Rupiah untuk mendukung kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia terus berkomitmen untuk menjamin ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai, dan kualitas yang prima di seluruh wilayah NKRI. Sebagai manifestasi upaya tersebut, Bank Indonesia memperkuat kegiatan layanan kas kepada perbankan dan masyarakat. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya Bank Indonesia untuk terus menjaga ketersediaan uang Rupiah di seluruh wilayah NKRI yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk di wilayah 3T.

Khusus untuk wilayah 3T, telah dilaksanakan upaya untuk terus menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas layak edar melalui kas keliling, distribusi ke kas titipan, dan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) yang berhasil dilaksanakan pada 276 wilayah 3T di wilayah NKRI. ERB merupakan bentuk sinergi antara Bank Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dalam kegiatan layanan kas di wilayah 3T. Pelaksanaan kegiatan layanan kas melalui ERB juga dirangkaikan dengan kegiatan kampanye "Cinta, Bangga, Paham Rupiah (CBP)" untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak merusak Rupiah dengan melipat, mencoret, menstapler, meremas, atau membasahi uang Rupiah. Kegiatan dimaksud diharapkan dapat ikut menjaga ketersediaan uang layak edar (ULE) diseluruh wilayah NKRI. Di samping itu, sejalan dengan dilaksanakannya perayaan Natal dan Tahun Baru pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia turut berupaya untuk memastikan ketersediaan uang tunai sebesar Rp 133,7 triliun untuk diedarkan ke seluruh wilayah Indonesia yang dilaksanakan melalui kegiatan SERUNAI 2024.

Bank Indonesia terus berkomitmen untuk menyediakan ULE bagi masyarakat yang tecermin pada tingkat



Bank Indonesia dan Angkatan Laut (TNI AL) dalam Penyelenggaraan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2024 di Maluku

standar kelayakan uang Rupiah (*soil level*). Berdasarkan hasil survei pada semester II tahun 2024, tercatat *soil level* uang pecahan besar (UPB) dan pecahan kecil (UPK) masing-masing pada tingkat 9,4 dan 7,0.

Dalam upaya mewujudkan komitmen terhadap uang yang layak edar, Bank Indonesia melakukan kegiatan pengolahan dan pemusnahan terhadap uang tidak layak edar, termasuk melalui kegiatan meracik. Terkait hal ini, Bank Indonesia menginisiasi pengolahan Limbah Racik Uang Kertas (LRUK) dengan metode *Waste to Energy* (WTE) atau disebut sebagai program Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) yang lebih ramah

lingkungan. Pada Triwulan IV 2024, telah dilakukan penandatanganan dokumen kerja sama di tingkat pusat yaitu Berita Acara Kesepahaman tentang Pemanfaatan Limbah Racik Uang Rupiah antara Bank Indonesia dengan PT PLN Indonesia Power. Penandatanganan tersebut diharapkan mendorong pemanfaatan LRUK sebagai bahan bakar alternatif kegiatan *co-firing* di jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT PLN Indonesia Power yang tersebar di seluruh Indonesia. Di sisi lain, kegiatan uji coba penggunaan LRUK untuk PLTU juga telah dilakukan di beberapa KPwDN antara lain KPwBI Provinsi Kalimantan Timur dan KPwBI Balikpapan dengan PLTU Teluk, Balikpapan.

Boks 5. Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2024



Pelepasan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2024 di Maluku

Sebagai wujud nyata komitmen Bank Indonesia dalam menjaga kedaulatan Rupiah di daerah terdepan, terluar, dan terpencil (3T) NKRI, Bank Indonesia kembali

menggelar Ekspedisi Rupiah Berdaulat di wilayah Maluku. Kegiatan ini berlangsung pada 19 s.d. 25 Oktober 2024 dengan menggunakan KRI Teluk Lada-521, mengunjungi

5 pulau 3T di Maluku, yaitu Banda, Gorom, Geser, Buru, dan Manipa. Salah satu momen penting dalam ekspedisi ini adalah kehadiran Deputi Gubernur Bank Indonesia – Ibu Aida S. Budiman, yang secara langsung meninjau dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat pengedaran Rupiah di wilayah 3T serta meningkatkan literasi masyarakat terhadap Rupiah. Pada kesempatan ini, Ibu Aida S. Budiman menekankan bahwa Rupiah bukan sekadar alat transaksi, tetapi juga simbol kedaulatan negara yang harus dijaga bersama. Oleh karena itu, Bank Indonesia terus melakukan berbagai inisiatif untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk di wilayah 3T, memiliki akses terhadap uang tunai berkualitas dan layanan keuangan yang inklusif.

Ekspedisi Rupiah Berdaulat bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan uang Rupiah yang layak edar di seluruh pelosok negeri, termasuk daerah 3T. Melalui kerja sama dengan TNI Angkatan Laut, Bank Indonesia mendistribusikan uang tunai ke berbagai wilayah kepulauan di Maluku, yang memiliki tantangan geografis dalam akses ke layanan perbankan. Selain distribusi uang tunai, kegiatan ini juga mencakup edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah serta bantuan layanan kesehatan kepada masyarakat bekerja sama dengan dinas kesehatan TNI Angkatan Laut. Selain itu, dalam kesempatan yang sama, diselenggarakan juga kegiatan *open ship*, yang memberikan kesempatan bagi masyarakat di sekitar pulau-pulau tersebut untuk mengenal lebih dekat alat utama sistem persenjataan (alutsista) buatan dalam negeri yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Kegiatan *open ship* ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan

meningkatkan rasa cinta tanah air, khususnya bagi para pelajar di wilayah yang dikunjungi.

Dalam pelaksanaan Ekspedisi Rupiah Berdaulat tersebut, juga disalurkan bantuan sosial dari Bank Indonesia yang diberikan kepada sekolah, rumah ibadah, dan kelompok masyarakat untuk menunjang pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat di pulau-pulau tersebut. Bantuan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan ekonomi, sehingga mampu mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Ekspedisi ini tidak hanya berdampak pada pengedaran uang, tetapi juga memperkuat sinergi antara Bank Indonesia dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan komunitas setempat. Dengan adanya sosialisasi dan edukasi Cinta, Bangga, Paham Rupiah, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya penggunaan uang secara bijak serta cara merawat Rupiah dengan baik.

Melalui kegiatan ini, diharapkan ketersediaan uang Rupiah yang layak edar semakin merata, meningkatkan literasi masyarakat terhadap Rupiah, serta mendorong inklusi keuangan di wilayah 3T. Dengan semakin luasnya jangkauan pengedaran Rupiah dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap peran Bank Indonesia, kegiatan Ekspedisi Rupiah Berdaulat dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan nasional. Bank Indonesia akan terus berinovasi dan bersinergi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa Rupiah tidak hanya beredar luas, tetapi juga menjadi alat transaksi utama yang dipercaya dan dihargai oleh seluruh masyarakat Indonesia.

dilakukan guna mewujudkan: (i) efisiensi transaksi dan ekosistem EKD; (ii) terselenggaranya sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman dan andal; serta (iii) tersedianya uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya.

Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan dan pengawasan Bank Indonesia dengan Pemerintah, KSSK, dan otoritas terkait untuk percepatan ekonomi dan keuangan digital serta pengelolaan uang Rupiah sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

20) Terjalinnnya sinergi dalam rangka mendukung percepatan ekonomi dan keuangan digital

Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia terus mendorong percepatan digitalisasi sistem pembayaran untuk efisiensi transaksi dan

perluasan ekosistem EKD. Program sinergi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dilakukan dalam berbagai program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP), diantaranya dalam transaksi Pemerintah Daerah (Pemda), sektor transportasi, dan penyaluran bantuan sosial sejalan dengan program Asta Cita. Sebagai tindak lanjut atas arah kebijakan P2DD dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) tahun 2024 yang telah diselenggarakan pada 23 September 2024, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) P2DD pada 7 November 2024 untuk menindaklanjuti pokok arahan terkait penguatan *framework* P2DD dan penguatan ekosistem transaksi digital pemda melalui penguatan peran BPD.

Selanjutnya, Bank Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, BPD, Bank Himbara, dan ASPI berkomitmen untuk melakukan percepatan implementasi SNAP pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) modul penerimaan yang akan terkoneksi dengan PSP (BPD dan Bank Himbara). Sementara itu, dari sisi transaksi belanja pemerintah, perluasan implementasi KKI segmen pemerintah terus didorong, antara lain melalui pengembangan fitur *online payment* yang dapat digunakan untuk transaksi belanja pemerintah pada *platform* daring yang telah diluncurkan pada triwulan lalu. Selain itu, Bank Indonesia juga turut mendukung upaya penguatan kapasitas TP2DD melalui kegiatan *capacity building* ETPD bagi pemda, Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dan KPwDN BI pada tanggal 30 – 31 Oktober 2024. Berbagai upaya yang dilakukan telah berkontribusi terhadap capaian jumlah pemda di tahap Digital pada tahun 2024 yang mencapai 90,7% pemda (495 pemda).

21) Terjalinnnya sinergi kebijakan terkait penerapan prinsip Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) dan pengawasan Sistem Pembayaran untuk mendorong stabilitas sistem pembayaran

Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran berkomitmen penuh dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM). Komitmen tersebut selaras dengan visi BSPI 2025, yang telah dilanjutkan dengan BSPI 2030, yaitu menjamin keseimbangan antara inovasi sistem pembayaran dengan integritas sistem keuangan melalui penerapan Prinsip APU/PPT/PPSPM. Bank Indonesia berkontribusi penuh untuk melaksanakan

berbagai rencana aksi *Mutual Evaluation by the Financial Action Task Force* (ME FATF), di antaranya melalui penguatan kerja sama internasional dengan otoritas mitra mengenai penerapan APU-PPT serta koordinasi bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui *joint audit* terhadap Penyelenggara Sistem Pembayaran, termasuk Penyelenggara Sistem Pembayaran yang diduga memfasilitasi transaksi ilegal (judi *online* dan pinjaman *online* ilegal).

Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia telah menyelesaikan 3 rekomendasi dan 3 tindak lanjut terkait penerapan prinsip APU/PPT dan pengawasan SP. Hal ini dicapai melalui upaya Bank Indonesia dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap Penyelenggara Sistem Pembayaran yang disepakati dari *joint audit* dengan PPATK serta pengawasan dan surveilans terkait kepatuhan penerapan APU PPT oleh PJP LSB dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB). Dalam rangka penguatan kapabilitas internal untuk melakukan pengawasan atas implementasi Program APU-PPT oleh PJP, Bank Indonesia bekerja sama dengan PPATK menyelenggarakan kegiatan *capacity building* kepada Pengawas Sistem Pembayaran baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri. Kegiatan dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas pengawas terkait risiko TPPU dan TPPT, terutama tindak pidana yang berisiko tinggi.

PS 07 Mengatur, mengawasi, dan mengembangkan pasar uang dan pasar valas untuk mendukung efektivitas kebijakan BI serta memperkuat sinergi dengan otoritas terkait untuk pengembangan pasar keuangan dan pembiayaan ekonomi

Bank Indonesia terus mendorong pasar uang Rupiah dan valas yang modern, likuid, efisien, transparan, dan berintegritas. Pasar uang dan pasar valas yang modern dan maju adalah dasar untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi nasional.

Pada triwulan IV 2024 Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka mengatur, mengawasi, serta mengembangkan pasar uang dan pasar valas untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta memperkuat sinergi dengan otoritas terkait untuk pengembangan pasar keuangan dan pembiayaan ekonomi sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

22) **Pasar uang Rupiah dan valas yang variatif, likuid, efisien, transparan, dan berintegritas untuk mendukung efektivitas transmisi kebijakan Bank Indonesia**

Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia melanjutkan upaya pengembangan transaksi repo melalui penguatan peran *dealer* utama PUVA. Pertama, penguatan dilakukan melalui peningkatan jumlah *dealer* utama PUVA yaitu dari 18 bank menjadi 20 bank pada triwulan IV 2024. Kedua, penguatan dilakukan melalui perluasan kewajiban *dealer* utama PUVA dalam melakukan aktivitas transaksi SRBI dan repo di pasar sekunder. Perluasan kewajiban juga didukung oleh mekanisme penyediaan fasilitas untuk *dealer* utama PUVA yang telah memenuhi seluruh kewajiban. Ketiga, penguatan dilakukan melalui penerbitan PADG No. 23 Tahun 2024 tentang *dealer* utama PUVA yang menjabarkan lebih lanjut terkait kriteria, mekanisme persetujuan, kewajiban dan aktivitas serta pengawasan dan evaluasi atas *dealer* utama PUVA. Berbagai upaya dimaksud telah berkontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan RRH transaksi repo pada triwulan IV 2024 yang mengalami akselerasi sehingga mencapai Rp 15 triliun dibandingkan posisi pada triwulan sebelumnya yang sebesar Rp 11,8 triliun. Pangsa *outstanding* transaksi repo terhadap total *outstanding* transaksi pasar uang Rupiah adalah sebesar 54% atau relatif sama dengan triwulan III 2024, sedangkan pangsa jumlah pelaku repo terhadap total perbankan tercatat mengalami peningkatan menjadi sebesar 70% pada triwulan IV 2024 dari sebelumnya sebesar 64% pada triwulan III 2024.

Bank Indonesia juga melanjutkan pengembangan DNDF sebagai salah satu instrumen lindung nilai (*hedging*) di pasar valuta asing dalam rangka mendukung stabilitas nilai tukar. Seiring dengan rangkaian pelaksanaan sosialisasi terkait instrumen derivatif termasuk DNDF, terdapat peningkatan kebutuhan lindung nilai valas oleh para pelaku pasar sejalan dengan dampak perlambatan ekonomi di negara maju yang mendorong peningkatan *capital inflow*. Ke depan, Bank Indonesia akan terus melanjutkan pengembangan DNDF melalui penguatan pengaturan, serta sosialisasi dan koordinasi *targeted* dengan pelaku potensial.

Penguatan pengaturan DNDF telah dilakukan dalam bentuk penerbitan PADG. PADG dimaksud mengatur aspek *product*, *pricing*, dan infrastruktur yang berperan penting dalam pencapaian mandat Bank Indonesia dalam mengatur, mengembangkan, dan mengawasi PUVA, serta selaras dengan arah transformasi Bank

Indonesia. Dari tiga PADG tersebut, dua PADG merupakan PADG perubahan, yaitu:

1. PADG No. 14 Tahun 2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Perubahan Kedua Atas PADG No. 22/20/PADG/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Antara Indonesia dan Jepang Menggunakan Rupiah dan Yen Melalui Bank; dan
2. PADG No.15 Tahun 2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Perubahan atas PADG No. 23/16/PADG/2021 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Tiongkok Menggunakan Rupiah dan Yuan melalui Bank.

Penyempurnaan kedua PADG dimaksud dilakukan untuk meningkatkan penyelesaian transaksi bilateral dengan menggunakan mata uang lokal antara Indonesia dan Tiongkok, serta Indonesia dan Jepang. Penyempurnaan ketentuan meliputi kriteria Bank *Appointed Cross Currency Dealer* (ACCD), penyesuaian mekanisme pembukaan rekening transaksi bilateral rupiah dan yuan, penetapan *threshold*, dan/atau penyesuaian kuota harga. Pelaksanaan kerja sama antara Bank Indonesia dengan kedua otoritas di negara tersebut diharapkan dapat berjalan semakin baik dengan penyempurnaan pengaturan ini.

Ketentuan selanjutnya yakni PADG No. 23 Tahun 2024 tentang *Dealer* PUVA, yang merupakan penyempurnaan atas PADG No. 2 Tahun 2024 tentang *Dealer* utama. Penyempurnaan ketentuan mengenai *Dealer* utama PUVA dilakukan sebagai salah satu strategi untuk membentuk Pelaku PUVA yang aktif dan kompeten. Beberapa aspek penguatan *Dealer* utama PUVA meliputi penguatan kegiatan dan aktivitas *Dealer* utama PUVA, termasuk penyalarsan dengan ketentuan dalam PBI PUVA.

Bank Indonesia juga terus mendorong pengembangan instrumen dan transaksi PUVA syariah untuk mendukung pendalaman pasar keuangan dan manajemen likuiditas. Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan pelaksanaan PUVA syariah berupa PADG Nomor 16 Tahun 2024 tanggal 6 November 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah. PADG ini mengatur mengenai produk, harga acuan (*pricing*), jenis transaksi, *underlying* transaksi, dokumen transaksi, pembatasan transaksi, serta penyelesaian transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah. Di samping itu, Bank Indonesia juga menerbitkan PADG No. 20 Tahun 2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Transaksi Pasar Uang Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah. Penerbitan ketentuan ini sebagai upaya Bank

Indonesia untuk mengembangkan Pasar Uang Syariah yang *modern* dan maju, tertata dan berfungsi secara baik (*well-functioning money market*). Kedua pengaturan tersebut menjadi payung hukum inovasi produk PUVA syariah baru antara lain instrumen Surat Berharga Komersial Syariah dan transaksi lindung nilai syariah melalui bursa komoditi. Melalui penerbitan ketentuan dimaksud, pelaku PUVA syariah memiliki lebih banyak opsi dalam memperoleh pembiayaan jangka pendek baik rupiah maupun valas.

23) **Infrastruktur pasar uang yang integrasi, interkoneksi dan interoperabilitas, serta aman dan andal**

Dalam rangka mengakselerasi persiapan implementasi *Electronic Trading Platform Multimatching Systems* (ETP MMS) sebagai sarana transaksi PUVA sesuai tahapan pengembangan, Bank Indonesia melanjutkan koordinasi secara intensif dengan calon penyelenggara ETP MMS, *Central Counter Party* (CCP), maupun pelaku pasar. Pada triwulan IV 2024, telah dilaksanakan integrasi *trading platform bilateral* (*advance dealing*) dengan CCP melalui mekanisme *post trade clearing*. Interkoneksi ETP MMS dengan CCP sebagai sarana kliring dan manajemen risiko yang terintegrasi memungkinkan pelaku pasar keuangan bertransaksi secara *seamless*. Proses transaksi dapat terotomasi secara *end-to-end* dan meminimalkan adanya intervensi manual. Hal ini pada akhirnya akan menciptakan efisiensi pelaksanaan transaksi yang mendukung pengembangan pasar keuangan di Indonesia. Ke depan, Bank Indonesia telah merencanakan pengembangan ETP MMS secara lebih lanjut dan akan dilaksanakan secara bertahap. Hal ini merupakan bagian dari langkah nyata untuk menciptakan infrastruktur yang lebih maju dan inklusif di bidang keuangan guna mendukung pencapaian Asta Cita.

Bank Indonesia juga telah menerbitkan beberapa ketentuan untuk mendukung implementasi CCP dan ETP MMS sebagai salah satu infrastruktur pasar uang. Adanya pengaturan tersebut diharapkan dapat mewujudkan PUVA yang lebih tertata dan berfungsi secara baik (*well functioning money market and foreign exchange market*). Bank Indonesia melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan infrastruktur pasar uang untuk memastikan agar CCP dan ETP MMS tersebut diselenggarakan dengan memenuhi prinsip keamanan, efektivitas, efisiensi, dan keandalan. Selain itu, penyelenggaraan CCP dan ETP MMS telah memperhatikan aspek interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi dengan infrastruktur pasar keuangan lainnya, serta selaras dengan prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku, antara

lain *Principles for Financial Market Infrastructures*, ISO 20022, dan/atau ISO/IEC 27001.

24) **Sinergi Bank Indonesia dengan otoritas terkait untuk mendukung pembiayaan perekonomian dan pengelolaan risiko pasar keuangan**

Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi antar lembaga dalam rangka mendorong pembiayaan perekonomian serta koordinasi pengawasan pasar keuangan dalam rangka pengelolaan risiko pasar keuangan. Sampai dengan triwulan IV 2024, Bank Indonesia telah menyelesaikan 7 tindak lanjut dari kesepakatan Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) dan 2 tindak lanjut dari kesepakatan koordinasi pengawasan pasar keuangan. Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia melanjutkan sinergi dengan Kemenkeu, OJK, dan LPS melalui pertemuan FK-PPPK yang dilaksanakan pada tanggal 20 – 21 November 2024 serta 6 – 7 Desember 2024 dengan kesepakatan yang dihasilkan mencakup monitoring pencapaian *key performance indicator* (KPI), *strategic action plan* (SAP), dan program prioritas koordinasi otoritas pasar keuangan, serta pembahasan Pembaruan Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK).

Lebih lanjut, pada triwulan IV 2024, pemeriksaan PUVA dilakukan sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam tukar menukar informasi antara Bank Indonesia dan OJK. Pemeriksaan PUVA dilakukan terhadap lembaga keuangan atau bank. Setelah pemeriksaan dilakukan, Bank Indonesia akan menyampaikan pokok-pokok hasil pemeriksaan kepada OJK/otoritas terkait sebagai upaya dalam memperkuat dan menjaga pasar keuangan di Indonesia. Koordinasi juga dilakukan dalam rangka persiapan pengalihan pengaturan dan pengawasan transaksi *futures* PUVA dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sesuai dengan mandat UU P2SK. Kedepan, tantangan pengawasan PUVA semakin meningkat seiring dengan bertambahnya objek dan cakupan pemeriksaan terkait infrastruktur pasar keuangan (CCP) dan pasar FX *Futures* yang akan berpindah pengawasannya dari BAPEPTI ke Bank Indonesia pada tahun 2025.

Sinergi antara Bank Indonesia bersama Kemenkeu, OJK, dan LPS juga diperkuat dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan program Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like It) tahun 2024. Like It merupakan program prioritas FK-PPPK yang pertama kali dilakukan pada Agustus 2021 sebagai upaya memperluas basis investor ritel domestik

terutama yang berasal dari generasi muda. Program tersebut juga dilaksanakan sejalan dengan program Asta Cita khususnya terkait penguatan Sumber Daya

Manusia. Pada triwulan IV 2024, rangkaian kegiatan Like It telah diselenggarakan melalui 3 seri kegiatan secara bergantian oleh anggota FK-PPPK.

Boks 6. Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE-IT!) 2024



Opening Ceremony Like-It! 2024 di Jakarta

Pada 6-9 November 2024 di Jakarta, telah diselenggarakan acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like-It!) oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Keempat lembaga ini, yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK), mengajak generasi muda untuk mempersiapkan masa depan finansial yang lebih cerah. Para pemimpin dari masing-masing lembaga hadir memberikan motivasi dan edukasi tentang pentingnya berinvestasi di pasar keuangan, agar generasi muda bisa membangun ketahanan finansial yang solid dan mandiri dalam jangka panjang.

Acara Like-It! 2024 sendiri terdiri dari tiga seri yang diselenggarakan secara bergantian oleh anggota FK-PPPK. Seri pertama, yang diadakan pada 1 Oktober 2024, dibuka oleh Kementerian Keuangan dengan tema "SDG Talks dan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like It!): *Smart Investing for a Better Tomorrow - Youth and Sustainable Finance for the SDGs*". Lalu, pada 5 Oktober 2024, OJK menggelar Seri ke-dua dengan tema "GENCARKAN Investasi bagi Generasi Muda Menuju Indonesia Maju". Seri ke-tiga yang diadakan antara 6 hingga 9 November 2024 oleh Bank Indonesia mengangkat tema "Generasi Muda Menuju Masa Depan Cerah dengan Berinvestasi di Pasar Keuangan". Untuk menyemarakkan kegiatan sekaligus

memberikan pengalaman langsung bagi pengunjung dalam melakukan pilihan investasi, kegiatan Like It! dilengkapi dengan pameran produk investasi yang menyediakan informasi produk investasi ritel yang dapat diakses langsung oleh peserta sehingga para peserta dapat memahami dan berkontribusi langsung dalam pembiayaan pembangunan negeri melalui investasi di pasar keuangan.

Investasi kini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan generasi muda, khususnya milenial dan Gen Z. Melalui kemajuan teknologi dan akses yang lebih mudah, investasi telah menjadi bagian dari gaya hidup yang semakin digemari oleh kalangan muda. Meski demikian, kemudahan dalam berinvestasi juga membawa tantangan tersendiri. Akses yang lebih mudah ke berbagai platform investasi jika tidak diimbangi dengan pemahaman yang cukup mengenai prinsip-prinsip investasi dan manajemen risiko maka akan berpotensi mengalami kerugian. Oleh karena itu, edukasi keuangan yang tepat melalui penyelenggaraan Like It! menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan dapat memberi manfaat yang optimal.

Dalam kesempatan tersebut, Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengingatkan pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang dan mengajak generasi muda untuk mengadopsi prinsip 3C: Cerdas, Cermat, dan Cuan. Cerdas berarti memiliki

pengetahuan yang cukup sebelum berinvestasi, cermat berarti mengambil keputusan berdasarkan riset yang matang, dan cuan mengacu pada pencapaian keuntungan yang optimal melalui keputusan yang bijak. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga menekankan pentingnya literasi keuangan bagi generasi muda. Ia menjelaskan bahwa dengan meningkatkan literasi keuangan, generasi muda dapat memperkuat kemandirian finansial, membuat keputusan investasi yang lebih bijak, dan mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik. Selain itu, dalam acara tersebut, Suahasil memperkenalkan Surat Berharga Negara

(SBN) Ritel sebagai salah satu instrumen investasi yang dapat diakses oleh generasi muda.

Ke depan, penting bagi generasi muda untuk tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga untuk terus belajar dan memahami cara berinvestasi yang benar. Dengan pemahaman yang cukup, investasi dapat memberikan manfaat yang besar bagi kestabilan keuangan di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan upaya secara berkelanjutan dalam meningkatkan literasi keuangan agar dapat memanfaatkan peluang investasi secara bijak dan bertanggung jawab demi menciptakan masa depan finansial yang lebih cerah.

PS 08 Merumuskan kebijakan dan melaksanakan program Bank Indonesia serta memperkuat sinergi untuk meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, keuangan berkelanjutan, dan perlindungan konsumen baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah

Bank Indonesia terus mendorong peningkatan inklusi ekonomi keuangan, ekonomi keuangan syariah, termasuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia, serta penguatan perlindungan konsumen. Hal ini dilakukan sebagai kontribusi Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sepanjang triwulan IV 2024 Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka merumuskan kebijakan dan melaksanakan program Bank Indonesia serta memperkuat sinergi untuk meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, keuangan berkelanjutan, dan perlindungan konsumen, baik

secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

25) Kontribusi Bank Indonesia dalam mendorong pembiayaan syariah

Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia melanjutkan upaya untuk mendorong pertumbuhan pembiayaan syariah melalui sinergi dan kolaborasi dengan K/L terkait dan industri keuangan syariah baik yang berasal dari sektor keuangan sosial maupun keuangan komersial. Sinergi dan kolaborasi dilakukan dalam bentuk ISEF 2024 yang diselenggarakan pada 30 Oktober sampai dengan 3 November 2024. Perhelatan syariah terbesar tersebut berhasil mencatat transaksi temu bisnis senilai hampir Rp2 triliun yang mencerminkan perkembangan dan potensi ekonomi syariah di Indonesia yang cukup signifikan. Dalam penyelenggaraan ISEF, Bank Indonesia juga

WORLD ZAKAT AND WAQF FORUM ANNUAL MEETING AND CONFERENCE 2024

OPENING CEREMONY AND GALA DINNER WZWF 2024 LAUNCH MONTAGE



Opening Ceremony World Zakat and Waqf Forum Annual Meeting and Conference 2024 di Jakarta

berkolaborasi bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Pemerintah, Industri dan berbagai pihak terkait lainnya. Rangkaian kegiatan ISEF 2024 terdiri dari kegiatan *Road to Fesyar*, *Road to ISEF* berupa Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah (Fesyar) yang diselenggarakan di berbagai daerah, serta Bulan Pembiayaan Syariah (BPS).

Bank Indonesia juga terus mendorong produk perbankan syariah yang menonjolkan keunikan perbankan syariah dengan mengembangkan model bisnis pembiayaan melalui skema *investment account*. Pada triwulan IV 2024 produk *Sharia Restricted Investment Account* (SRIA) secara resmi telah diluncurkan di *Opening Ceremony* ISEF 2024. Seluruh upaya ini telah berkontribusi pada angka pertumbuhan pembiayaan syariah yang tercatat relatif tumbuh tinggi sebesar 9,87% (yoy) di triwulan IV 2024.

Lebih lanjut, Bank Indonesia terus aktif mendorong pengembangan keuangan sosial syariah sebagai alternatif sumber pembiayaan melalui integrasi keuangan komersial dan sosial syariah serta mendorong implementasi peran bank syariah sebagai *nazhir/pengelola wakaf*. Promosi atau kampanye peran strategis zakat dan wakaf telah dilaksanakan di berbagai kesempatan seperti keterlibatan aktif

Bank Indonesia dalam konferensi dan pertemuan tahunan *World Zakat and Waqf Forum* (WZWF) dengan tema *New Zakat dan Waqf Global Order: United Global Community Grounded in Justice, Compassion and Shared Prosperity*, pada tanggal 1 November di Jakarta. Melalui WZWF, Bank Indonesia bersama Kementerian Agama RI, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), serta Badan Wakaf Indonesia (BWI) berkolaborasi dalam mendorong peran Indonesia dalam keuangan syariah pada tingkat global. Di sisi lain, dalam rangka mendukung peningkatan inklusifitas ekonomi, Bank Indonesia bersinergi dengan otoritas/regulator dan mitra kerja terkait lainnya seperti Kementerian Agama RI, Kementerian ATR/BPN RI, BAZNAS, dan Badan Wakaf Indonesia menginisiasi pengembangan data Zakat Infak Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) terintegrasi. Optimalisasi potensi keuangan sosial syariah melalui pengembangan data ZISWAF terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan inklusifitas perekonomian melalui pemanfaatan data zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang lengkap, akurat, dan *reliable*. Akselerasi perluasan akseptasi digitalisasi keuangan sosial syariah juga terus dilakukan dengan mendorong *onboarding* para *nazhir* pada aplikasi SatuWakaf Indonesia yang telah *dilaunching* pada 2023.

Boks 7. Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024



Opening Ceremony Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 di Jakarta

Penyelenggaraan ISEF merupakan perwujudan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka di dunia. Pada tanggal 30 Oktober 2024 – 3 November 2024 di Jakarta Convention Center telah dilaksanakan ISEF ke-11. ISEF sendiri menjadi forum bisnis Eksyar terbesar hal ini diwujudkan dengan penyelenggaraan rangkaian *Business Meetings and Business Linkages* 2024

melalui *intensive bootcamp* yang berkolaborasi dengan Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI), *Indonesia Fashion Chamber* (IFC) dan Kementerian Luar Negeri RI, sehingga menghadirkan *potential buyers* dari 9 (sembilan) negara yakni Malaysia, Jepang, Thailand, Filipina, Papua Nugini, Afrika Selatan, Brunei Darussalam, Uni Emirat Arab, dan Saudi Arabia. Lebih lanjut, berbagai kegiatan inklusif juga diselenggarakan pada ISEF 2024 antara lain: penyelenggaraan 3rd



Opening Ceremony Indonesia International Halal Chef Competition (IN2HCC) 2024 di Jakarta

Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MF), 2nd Indonesia International Halal Chef Competition (IN2HCC), 1st Indonesia International Islamic School Expo (IN2ISE), ISEF Family Run, forum internasional dan domestik serta kegiatan inklusif lainnya.

Sebagai cerminan kepemimpinan Bank Indonesia di ranah ekonomi syariah, Bank Indonesia memperkuat inovasi dan sinergi pada pelaksanaan ISEF 2024. Penguatan strategi yang dilakukan yakni: (i) penguatan sinergi dengan berbagai event dan *flagship* forum baik nasional maupun internasional, a.l. melalui 33rd Governing Board Meeting IILM yang dirangkaikan dengan kegiatan *High Level Seminar dan Expert Meeting*, serta *World Zakat & Waqf Forum Annual Meeting*; (ii) penyelarasan kegiatan FESyar dan ISEF seperti Bulan Pembiayaan Syariah (BPS), Kompetisi Ekonomi Syariah Nasional (KESN), dan IN2HCC; serta (iii) pemanfaatan analisis *big data* dalam penyusunan strategi komunikasi ISEF inovatif dan efektif.

ISEF ke-11 tahun 2024 mengangkat tema "Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Memperkuat Ketahanan dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan" yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dan anggota Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Berbagai insiatif strategis juga telah diluncurkan melalui ISEF dalam upaya memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Pertama, peluncuran aplikasi *Halal Traceability* yang dirancang untuk mempercepat proses sertifikasi dan pengawasan produk halal melalui pengembangan sistem informasi penelusuran bahan produk dari hulu hingga ke konsumen, sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik. Kedua, pengembangan produk *Sharia Restricted Investment Account* (SRIA) sebagai perwujudan amanat UU P2SK, yang tidak hanya memperkuat diferensiasi dan daya saing

perbankan syariah, tetapi juga memperbesar kontribusi keuangan syariah bagi Indonesia. Ketiga, peluncuran Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (SNLIEKSI) yang bertujuan mengakselerasi peningkatan literasi dan inklusi Ekosistem Syariah (Eksyar) secara kolaboratif dan komprehensif, sehingga tercipta masyarakat yang cerdas dan inklusif dalam mengakses layanan keuangan syariah. Keempat, penguatan ekosistem usaha syariah diwujudkan melalui digitalisasi pondok pesantren, mencakup digitalisasi budidaya (*digital farming*), akses pemasaran (*virtual market*), serta manajemen dan tata kelola, yang bersama-sama mendorong transformasi digital di sektor ekonomi syariah.

Penyelenggaraan ISEF ke-11 tahun 2024 semakin mengakselerasi posisi Indonesia di tingkat internasional, khususnya terkait industri *modest fashion* dan *leadership* dalam fora internasional. Salah satu bentuk akselerasi industri *modest fashion* diwujudkan melalui penyelenggaraan *Indonesia International Modest Fashion Festival* (IN2MF), yang menampilkan koleksi busana berbasis wastra terbanyak dan berhasil meraih rekor MURI sebagai *Festival Busana Berkarakter Berbasis Wastra* terbesar. Selain itu, ISEF ke-11 juga semakin memperkuat *leadership* Bank Indonesia dalam fora internasional melalui penyelenggaraan 3 forum kesepakatan. Pertama, penyelenggaraan 33rd Governing Board (GB) Meeting IILM yang menghasilkan kesepakatan, yaitu: (i) melakukan diversifikasi produk dan meningkatkan *issuance size* instrumen likuiditas syariah; (ii) mengintegrasikan asesmen kondisi dan perkembangan keuangan syariah, termasuk dengan asesmen keuangan konvensional yang telah tersedia; serta (iii) memperkuat infrastruktur keuangan syariah, khususnya melalui digitalisasi yang dapat mendorong inklusivitas keuangan syariah. Kedua, penyelenggaraan 6th Indonesia Halal Tourism

Summit yang meluncurkan Pedoman Layanan Dasar Pariwisata Ramah Muslim oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI, sebagai hasil kolaborasi antara Kemenparekraf dengan BI, industri, dan akademisi untuk mengakselerasi pengembangan sektor Pariwisata Ramah Muslim (PRM) nasional. Ketiga, penyelenggaraan *World Zakat and Waqf Forum Annual Meeting* yang menghasilkan resolusi kesepakatan pengembangan zakat dan wakaf di negara anggota WZWF serta pembahasan ratifikasi dan pengesahan *Technical Notes Zakat Core Principle* (TNZCP) dan *Technical Notes Waqf Core Principle* (TNWCP).

Melalui penyelenggaraan ISEF 2024, edukasi Eksyar juga semakin meluas. Hal ini tecermin dari hasil *big data analytics* selama periode 1 September – 10 November

2024 yang menunjukkan tingkat efektivitas publikasi (*Media Reach*) terhitung tinggi, dan semakin meningkat selama periode ISEF 2024. Lebih lanjut, penyelenggaraan rangkaian ISEF 2024 berhasil mencatatkan capaian transaksi yang cukup signifikan. Pada kegiatan *business matching* juga berhasil mencatatkan transaksi sebesar Rp1,8 Triliun yang terdiri dari komitmen dan realisasi pembiayaan maupun perdagangan serta kerja sama ekosistem keuangan syariah terhitung mulai dari kegiatan *Road to Fesyar*, *Road to ISEF*, Fesyar, hingga ISEF 2024. Lebih lanjut, rangkaian kegiatan ISEF 2024 melibatkan lebih dari 5 ribu pelaku usaha yang terdiri dari sektor fesyen dan makanan halal baik dalam negeri maupun luar negeri dan menghasilkan omset penjualan sebesar Rp115 Miliar.

26) Terlaksananya program inklusi ekonomi keuangan dan keuangan berkelanjutan

Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia senantiasa mengembangkan berbagai inisiatif dalam mencapai inklusi ekonomi keuangan dan keuangan berkelanjutan. Beragam inisiatif yang dilakukan oleh Bank Indonesia ditujukan untuk mengakselerasi UMKM naik kelas dan berdaya saing meliputi serangkaian program, antara lain: (i) UMKM *Go Export*; (ii) UMKM *Go Digital*; (iii) UMKM yang menerapkan *digital farming*; (iv) UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan; (v) UMKM yang masuk dalam *database* UMKM potensial dibiayai; (vi) kelompok subsisten yang mengalami peningkatan tahapan pengembangan; serta (vii) Pelaku Usaha Syariah (PUS) Industri Kreatif Syariah Indonesia (IKRA) baik PUS binaan maupun mitra. Dukungan akselerasi UMKM berdaya saing secara kontinu dilakukan melalui fasilitasi perluasan akses pasar untuk meningkatkan omzet dan komitmen *business matching* ekspor, serta fasilitasi akses pembiayaan. Secara kumulatif, hingga triwulan IV 2024, terdapat 8.719 UMKM dan PUS berdaya saing.

Dalam rangka mendorong UMKM *Go Export*, Bank Indonesia secara aktif melakukan pengembangan UMKM berorientasi ekspor melalui *pull and push strategy*. *Pull strategy* dilakukan melalui penyusunan model bisnis dan pedoman pengembangan UMKM berorientasi ekspor komoditas makanan dan minuman olahan. Sedangkan *push strategy* dilakukan melalui kurasi nasional dan pelatihan *product development* komoditas kopi, kain, pakaian siap pakai, dan kerajinan, serta melalui fasilitasi partisipasi UMKM dalam kegiatan promosi perdagangan baik di dalam negeri

maupun luar negeri. *Push strategy* dimaksud antara lain diwujudkan melalui penandatanganan 7 *Memorandum of Understanding* (MoU) antara UMKM dan *buyer* dengan nilai USD 120.667 selama triwulan IV 2024. Bank Indonesia juga telah memberikan penghargaan kepada pelaku UMKM binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja ekspor terbaik selama tahun 2024. Apresiasi ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan bentuk dukungan kepada UMKM dan mitra kerjas dalam upaya peningkatan kinerja UMKM pelaku ekspor serta mewujudkan *role model/champion* UMKM pelaku ekspor sebagai *best practice* untuk direplikasi secara lebih luas.

Selain itu, Bank Indonesia melakukan digitalisasi UMKM melalui program *onboarding* secara *end-to-end*, dimulai dari kurasi, edukasi, pendampingan, hingga monitoring baik untuk *onboarding* UMKM potensial maupun UMKM unggulan. Program *onboarding* UMKM potensial ditujukan untuk pendampingan UMKM yang memiliki prospek pertumbuhan namun masih memerlukan peningkatan kapasitas dasar untuk mengakses pemasaran *online*. Sedangkan, program *onboarding* UMKM unggulan ditujukan untuk memperkuat UMKM yang telah menunjukkan kinerja dan daya saing yang tinggi dengan penekanan pada inovasi, efisiensi operasional yang diintegrasikan untuk meningkatkan kinerja pemasaran *online*. Program dilakukan secara *end to end*, dimulai dari kurasi, edukasi, pendampingan, hingga monitoring. Secara kumulatif terdapat 2.081 UMKM yang telah mengikuti program *onboarding* pada triwulan IV 2024.

Dalam rangka mendukung transformasi UMKM menuju ramah lingkungan, Bank Indonesia telah melakukan program yang mengacu pada pedoman dan model bisnis UMKM hijau yang telah disusun pada tahun sebelumnya. Melalui program ini diharapkan UMKM dapat meningkatkan tahapan UMKM hijau yang terdiri atas 4 tahap yaitu *pre-eco adopter*, *eco-adopter*, *eco-entrepreneur*, dan *eco-innovator*. Pada triwulan IV 2024, terdapat 33 UMKM yang telah mengalami peningkatan tahapan UMKM hijau.

Bank Indonesia turut melaksanakan program fasilitasi UMKM dalam rangka mendukung terwujudnya peningkatan akses pembiayaan kepada UMKM. Fasilitasi UMKM dilaksanakan secara *end-to-end process* melalui peningkatan literasi pencatatan keuangan usaha secara digital dengan menggunakan aplikasi SIAPIK, penyediaan/*update* database profil UMKM potensial dibiayai (BISAID), dan pelaksanaan fasilitasi *business matching* pembiayaan yang diwujudkan melalui Gerakan "AKUBISA" yaitu Akses Keuangan UMKM melalui *Business Matching* (BM) dan Literasi untuk peningkatan daya saing. Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan fasilitasi BM pembiayaan berhasil menghubungkan 180 UMKM dan Koperasi dengan 15 lembaga keuangan (bank dan non-bank) dengan komitmen pembiayaan mencapai Rp188,19 miliar atau meningkat 27% dari tahun sebelumnya.

Bank Indonesia juga melakukan penguatan ekosistem produk halal melalui berbagai program untuk mencapai inklusi ekonomi keuangan dan keuangan berkelanjutan. Program yang diselenggarakan antara lain: (i) Industri Kreatif Syariah Indonesia (IKRA) sektor *food* dan *modest fashion*; (ii) pengembangan model bisnis dan ekosistem; (iii) *linkage* antar pelaku usaha syariah; (iv) fasilitasi sertifikasi halal dan inovasi sistem untuk halal *traceability*; serta (v) fasilitasi akses pasar *online* dan *offline*. Upaya peningkatan inklusi ekonomi dan keuangan juga dilakukan melalui program yang terkait dengan pemberdayaan dan pengembangan ekonomi pesantren. Pada triwulan IV 2024, telah dilaksanakan rangkaian pelatihan dan pendampingan kepada beberapa pesantren mitra yang berfokus pada komoditas bawang merah (2 pesantren) dan ayam pedaging (3 pesantren). Program tersebut ditujukan untuk memperbaiki tingkat produktivitas, meningkatkan efisiensi biaya produksi, mendukung hilirisasi, serta memperkuat akses pemasaran dan pembiayaan. Selain itu juga dilakukan pelatihan penguatan budidaya komoditas cabai serta manajemen

paska panen kepada 42 pesantren. Pelatihan tersebut dilakukan guna mendukung penguatan replikasi model ekosistem *Integrated Farming with Technology Information and Society* (INFRATANI) komoditas cabai di 11 wilayah untuk mencapai produktivitas budidaya yang optimal dan terstandarisasi dalam rangka pengembangan ekosistem rantai nilai halal secara nasional.

Sebagai upaya untuk memperluas *modest fashion* Indonesia, Bank Indonesia mengikuti berbagai rangkaian promosi perdagangan di dalam maupun luar negeri. Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia memperluas *modest fashion* Indonesia melalui keikutsertaan dalam berbagai rangkaian promosi perdagangan di dalam maupun luar negeri. Bank Indonesia telah menyelenggarakan Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MF) pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 3 November 2024 di Jakarta. Pelaksanaan IN2MF ini diharapkan dapat mendorong *branding* Indonesia sebagai pusat *modest fashion* dunia sehingga terjadi percepatan penetrasi pasar produk *modest fashion* Indonesia. Berbagai program fasilitasi UMKM yang dilakukan Bank Indonesia hingga triwulan IV 2024 telah menciptakan 8.719 UMKM dan PUS berdaya saing serta mendukung perluasan akses pasar dan pembiayaan UMKM baik konvensional maupun syariah senilai Rp3.353,36 Miliar.

27) Terwujudnya kebijakan dan program perlindungan konsumen nasional

Bank Indonesia telah melakukan serangkaian kegiatan pada triwulan IV 2024 sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan konsumen. Peningkatan literasi konsumen dilakukan secara masif dan terstruktur secara daring melalui video edukasi pada media sosial dan radio dalam rangkaian program Gerakan Bersama Edukasi Pelindungan Konsumen (GEBER PK) dengan jumlah *viewers* mencapai 121 juta selama periode tahun 2024. GEBER PK merupakan kerja sama Bank Indonesia dengan K/L terkait seperti OJK, Kemenkominfo, serta asosiasi dan industri. Kerjasama edukasi pelindungan konsumen juga dilakukan bersama Manajemen Pelaksana Program (*Project Management Officer/PMO*) Prakerja (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) dengan mewajibkan penerima Prakerja untuk mengakses video edukasi dengan jumlah peserta mencapai 1,13 juta orang.

Lebih lanjut, inisiatif program perlindungan konsumen merupakan bentuk penguatan edukasi PK yang juga dijalankan secara *offline* melalui beragam sosialisasi



Peluncuran Gerakan Bersama Edukasi Pelindungan Konsumen (Geber PK) tahun 2025 di Jakarta

PK kepada masyarakat di berbagai daerah. Sampai dengan triwulan IV 2024, jumlah peserta edukasi *offline* sebanyak 6.293 peserta dengan tingkat pemahaman 4,9.

Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi keuangan inklusif dan perlindungan konsumen juga dilakukan dengan melibatkan KPwBI di berbagai wilayah, antara lain Bali, Bangka Belitung, Cirebon, D.I. Yogyakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kediri, Kepulauan Riau, Lampung, Malang, Maluku, Purwokerto, Sibolga, Solo, Sulawesi Utara, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, dan Tasikmalaya. Program edukasi ditujukan kepada berbagai kelompok sasaran, antara lain UMKM, perempuan, santri/pelajar, imigran, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Sampai dengan triwulan IV 2024, kegiatan edukasi perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia bersama mitra kerja telah diikuti oleh 275.904 peserta.

28) Terjalinnya koordinasi dengan otoritas/lembaga dalam inklusi ekonomi-keuangan, keuangan berkelanjutan, dan perlindungan konsumen baik konvensional maupun syariah

Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan otoritas/lembaga terkait dalam rangka mendukung program inklusi ekonomi keuangan dan perlindungan konsumen. Melalui berbagai kegiatan koordinasi, hingga triwulan IV 2024 telah dihasilkan 9 kesepakatan/program dengan kementerian/lembaga

terkait yang terdiri dari 5 kesepakatan/program perlindungan konsumen dan 4 kesepakatan/program koordinasi dalam rangka mendukung ekonomi syariah.

Bank Indonesia juga meluncurkan modul dan *website* edukasi perlindungan konsumen dan pengelolaan keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia pada tanggal 4 Desember 2024, sebagai tindak lanjut atas NK antara Bank Indonesia dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Selain itu, dilaksanakan pula *talkshow* dengan tema "Lindungi Pekerja Migran Indonesia, Bersama Wujudkan Keamanan dan Kesejahteraan" yang menghadirkan narasumber dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Pengembangan Perbankan serta Lembaga Keuangan Mikro Indonesia, dengan kehadiran perwakilan secara luring dari Kementerian Luar Negeri, Perhimpunan Bank Nasional, ASPI, Asosiasi Fintech Indonesia, dan beberapa organisasi masyarakat, serta secara daring dari KBRI/KJRI di Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, dan Arab Saudi.

Di samping itu, pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia juga meluncurkan Gerakan Bersama Edukasi Pelindungan Konsumen (GEBER PK) yang merupakan program edukasi untuk meningkatkan literasi konsumen/masyarakat terkait perlindungan konsumen sehingga dapat memitigasi berbagai risiko yang dapat terjadi. Inisiatif GEBER PK dilakukan dengan mengedepankan kolaborasi lintas mitra, serta diseminasi konten edukasi secara luas melalui media sosial dan media radio.

Boks 8. Komitmen Bersama Edukasi Pelindungan untuk Konsumen yang Berdaya melalui Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK)



Opening Ceremony GEBER PK 2024 di Jakarta

Program GEBER PK merupakan inovasi program edukasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan literasi konsumen/masyarakat atas hak dan kewajiban, produk dan layanan keuangan digital guna memperkuat perlindungan bagi konsumen dari berbagai risiko, termasuk risiko terkena penipuan/*scam*. Program GEBER PK menekankan pada Sinergi dan Kolaborasi yang melibatkan Bank Indonesia, OJK, Kementerian Komunikasi dan Digital (KemKomdigi), Asosiasi (ASPI, Perbanas, Aftech, dan APGI) serta lebih dari 200 Penyelenggara dan mitra terlibat. Sinergi dan kolaborasi menjadi elemen kunci dalam pelaksanaan edukasi perlindungan konsumen, terutama mengingat besarnya jumlah konsumen yang menjadi target, yaitu sekitar 70% atau ±192 juta penduduk Indonesia yang berada di rentang usia produktif. Penduduk ini berasal dari berbagai segmen dan lapisan masyarakat yang tersebar luas secara geografis.

Peluncuran GEBER PK Tahun 2025 dilaksanakan pada 11 Desember 2024 yang merupakan kelanjutan dari pelaksanaan uji coba program 2024 yang diluncurkan pada 27 Maret 2024. Sepanjang periode 2024, berbagai konten edukasi yang memanfaatkan berbagai kanal media sosial yang dimiliki Bank Indonesia, OJK, KemKomdigi, Asosiasi, dan mitra Industri telah berhasil menjangkau 148 juta *viewers*/masyarakat, dengan mengusung *hashtag* #GeberPK dan #KonsumenCerdasPekaBertransaksi. Atensi dan respon yang positif dengan capaian jangkauan yang luas, serta dukungan dan komitmen yang kuat baik regulator, asosiasi, dan Industri, menjadi dasar untuk keberlanjutan program GEBER PK di 2025.

Di tengah pesatnya inovasi dan digitalisasi produk serta layanan keuangan saat ini, masih terdapat kesenjangan antara tingkat inklusi dan literasi keuangan masyarakat. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh BPS bekerja sama dengan OJK pada 2024, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia tercatat sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 75,02%. Hal ini menjadi celah bagi kejahatan digital dan berpotensi merugikan konsumen. Berdasarkan data pengaduan konsumen ke Bank Indonesia, tercatat terdapat 11.643 pengaduan selama tahun 2024 atau sebesar 0,16% dari total pengaduan konsumen yang disampaikan ke penyelenggara selama tahun 2024 yang sejumlah 7,34 juta pengaduan. Pengaduan terbanyak yang diterima Bank Indonesia antara lain terkait penipuan/*scam*, khususnya pada instrumen dompet elektronik dan transfer dana.

Upaya kolektif dari berbagai pihak menjadi kunci untuk menjembatani kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan, sekaligus memastikan perlindungan konsumen yang optimal. Sebagai langkah nyata, peluncuran GEBER PK diharapkan dapat memperluas jangkauan masyarakat yang teredukasi dengan tetap mengedepankan prinsip *satu tema, satu waktu, dan multi kanal*. Pelaksanaan GEBER PK melibatkan penyebaran konten edukasi perlindungan konsumen, seperti video, audio, *flyer*, dan materi lainnya, secara serempak melalui kanal komunikasi BI, OJK, asosiasi, serta mitra anggota asosiasi. Kanal yang digunakan meliputi media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, hingga

media luar ruang. Gerakan ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk meningkatkan literasi dan perlindungan konsumen di seluruh Indonesia.

Tahun 2025 menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam melindungi konsumen. Melalui Gerakan Bersama Edukasi Pelindungan Konsumen, regulator, asosiasi, dan mitra industri berkomitmen untuk melangkah lebih jauh dalam

memastikan seluruh masyarakat Indonesia tidak hanya memahami, tetapi juga memanfaatkan layanan keuangan secara bijak, aman, dan bertanggung jawab, sehingga terwujud konsumen yang lebih berdaya. Upaya kolektif ini diarahkan untuk mewujudkan ekosistem keuangan yang inklusif, inovatif, serta mampu melindungi seluruh pihak, demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dalam rangka peningkatan kapasitas pelaku UMKM, Bank Indonesia berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga melalui program penguatan UMKM yang meliputi peningkatan literasi dan fasilitasi. Bank Indonesia menyelenggarakan Forum Harmonisasi (FORHAR) bersama Kementerian Keuangan dengan pelatihan dan sosialisasi SIAPIK kepada 301 pendamping dan penerima kredit Ultra Mikro di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Banyuwangi, dan Lamongan. Selain itu, pelatihan kapasitas juga diberikan kepada sekitar 300 peserta, termasuk UMKM berorientasi ekspor, mengenai pemanfaatan Indonesia SME-Export Hub dan kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) guna memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM. Bank Indonesia bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama antara Bank Indonesia dan ATR/BPN melalui fasilitasi peningkatan kapasitas UMKM untuk akses pasar, termasuk pasar ekspor, dan pendataan UMKM yang melakukan pendaftaran tanah untuk pertama kali. Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia juga menyusun model bisnis dan replikasi *best practice* di sisi hulu melalui pemanfaatan teknologi seperti *digital farming*, *green/screen house*, sistem irigasi, pola tanam, dan pengendalian hama untuk mendukung GNIP dengan 75 UMKM menunjukkan peningkatan produktivitas di atas 10%.

Dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, Bank Indonesia turut berperan aktif dalam setiap Kelompok Kerja Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) guna menyusun strategi nasional serta program literasi dan inklusi keuangan. Sinergi ini diwujudkan melalui penyusunan kajian peta jalan penguatan strategi nasional ekonomi dan keuangan inklusif, serta kajian kompetensi inti literasi keuangan digital, guna memastikan keselarasan kebijakan dalam memperluas akses dan literasi keuangan di seluruh lapisan masyarakat.

Bank Indonesia juga turut berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga

Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BWI) yang dilaksanakan di 21 daerah. Bank Indonesia berperan sebagai *campaign manager* di Provinsi Sumatera Utara, *host* di delapan provinsi, dan *co-host* di seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia dalam negeri, serta mengoordinasikan proses *harvesting* dan pelaksanaan Anugerah Bangga Buatan Indonesia (ABBI) untuk mengapresiasi UMKM *champion*. Selain itu, Bank Indonesia menjalin kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak melalui program *Leaders' Insight* Pemberdayaan Perempuan dalam Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Inklusif. Bank Indonesia juga menyelenggarakan Webinar Nasional Edukasi Keuangan Inklusif bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk pendamping dan anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).

Selanjutnya, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan sejumlah Halal Center, diantaranya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Jaminan Produk Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Halal Science Center IPB, dan berbagai Halal Center lainnya yang tersebar di beberapa daerah. Koordinasi tersebut menghasilkan beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain *workshop* dan sertifikasi terhadap Pendamping Proses Produk Halal (PPH), serta juru sembelih halal, sehingga dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha, khususnya UMKM. Kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi peningkatan kapasitas dan akselerasi sertifikasi halal di berbagai wilayah. Program ini juga mendapatkan dukungan penuh dari KNEKS, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta mitra kerja daerah lainnya yang turut serta dalam memfasilitasi proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha di wilayah mereka. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan dapat lebih banyak produk yang berhasil memperoleh sertifikat halal sehingga mengakselerasi pencapaian produk dengan sertifikat halal di Indonesia.

Hasil koordinasi intensif bersama berbagai pihak telah memberikan hasil yang signifikan dalam penerbitan sertifikat halal dan juru sembelih halal. Hingga triwulan IV tahun 2024, telah diterbitkan 28.187 sertifikat halal untuk berbagai jenis produk. Selain itu, terdapat 170 juru sembelih halal yang telah tersertifikasi untuk memenuhi kebutuhan juru sembelih profesional di berbagai rumah potong hewan. Meningkatnya jumlah produk dan juru sembelih halal yang tersertifikasi diharapkan dapat memberi dampak positif pada daya saing produk halal Indonesia, baik di pasar nasional maupun internasional.

Bank Indonesia juga secara rutin terlibat aktif pada berbagai fora internasional syariah. Sebagai wujud konsolidasi inisiatif tersebut, Bank Indonesia menginisiasi pelaksanaan *Dedicated Meeting* (DM) Fora Eksyar yang melibatkan pemangku kepentingan eksyar baik nasional maupun internasional, sebagai wadah *brainstorming* dan *de-bottlenecking* berbagai isu eksyar. Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia menginisiasi pelaksanaan DM Fora Eksyar dengan kesepakatan antara lain penyesuaian ketentuan internasional mengenai penentuan *High Quality Liquid Asset* (HQLA) Level 1, *stance* Indonesia mengenai *roadmap* pengembangan IsDB, integrasi regulasi keuangan global pada *Financial Sector Assessment Program* (FSAP), dan inisiatif strategis lainnya.

Selain berperan dalam penguatan ekonomi syariah di tingkat internasional, Bank Indonesia juga berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah melalui berbagai inisiatif edukasi dan sosialisasi. Pemahaman masyarakat muslim Indonesia pada triwulan IV 2024 mengenai ekonomi syariah telah mencapai 43%. Peningkatan literasi tersebut merupakan hasil kolaborasi Bank Indonesia dengan Kementerian/ Lembaga serta mitra kerja terkait untuk terus melakukan berbagai program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai *channel* komunikasi. Bank Indonesia bersama Kementerian/ Lembaga dan mitra kerja terkait juga telah menyusun strategi nasional peningkatan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah.

PS 09 Merumuskan kebijakan dan melaksanakan kerjasama internasional dengan bank sentral, organisasi, dan lembaga internasional untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta bersinergi dengan pemerintah dan otoritas lain dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional

Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan internasional untuk mendukung stabilitas makroekonomi, sistem pembayaran, dan sistem keuangan nasional. Melalui kebijakan internasional yang strategis dan proaktif seperti mendorong transaksi berbasis mata uang lokal, memperkuat jaring pengaman keuangan internasional, menjaga kepercayaan lembaga internasional, dan menjalin sinergi kerja sama global, Bank Indonesia turut memastikan perekonomian Indonesia tetap tangguh di tengah tantangan global. Komitmen ini tak hanya mendukung stabilitas makroekonomi, sistem pembayaran, dan sistem keuangan, namun juga mengukuhkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis dalam arsitektur keuangan dunia.

Sepanjang triwulan IV 2024, Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam rangka merumuskan kebijakan dan melaksanakan kerja sama internasional dengan bank sentral, organisasi, dan lembaga internasional untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta bersinergi dengan Pemerintah dan otoritas lain dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional, sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

29) Terjaganya persepsi positif lembaga internasional dan lembaga rating terhadap perekonomian Indonesia

Bank Indonesia terus melakukan berbagai strategi yang proaktif dan kredibel untuk menjaga persepsi positif perekonomian Indonesia dari lembaga internasional dan pemeringkat di tengah divergensi pertumbuhan ekonomi negara penggerak utama perekonomian global, dinamika pasar keuangan global dan berlanjutnya konvergensi kebijakan moneter negara maju. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong peningkatan arus masuk modal asing melalui investasi portofolio (PI) dan investasi asing langsung (FDI).

Persepsi investor global terus terjaga didukung oleh inisiatif Bank Indonesia dalam penguatan *investor outreach* secara *targeted*, *thematic* dan *transparent* untuk menjaga persepsi positif global terhadap perekonomian Indonesia. Sepanjang triwulan IV 2024, Bank Indonesia berhasil merespons berbagai *concern* investor global di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan keuangan global. Respons tersebut dilakukan melalui *engagement* dan komunikasi intensif dengan investor asing, diantaranya melalui penyelenggaraan *Investor Conference Call* (ICC) bulanan bersama dengan Kementerian Keuangan RI, serta pelaksanaan temu investor atau *investor outreach* dengan berbagai *investment house*. Bank Indonesia telah melaksanakan 12 kegiatan *investor outreach* pada triwulan IV 2024 untuk memberikan informasi perkembangan dan kebijakan ekonomi Indonesia

terkini. Persepsi positif mitra kerja internasional terhadap perekonomian Indonesia juga tecermin dari laporan mengenai perekonomian Indonesia dari organisasi internasional. Dalam laporan ASEAN+3 *Financial Stability Report* Tahun 2024 yang diterbitkan oleh ASEAN+3 *Macroeconomic Research Office* (AMRO), dituliskan bahwa kebijakan moneter Bank Indonesia telah diarahkan untuk mempertahankan nilai tukar yang stabil didukung oleh strategi peningkatan arus modal masuk portofolio atau *portofolio inflows* yang dilakukan melalui instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI. Berbagai langkah strategis yang proaktif untuk menjaga persepsi positif lembaga internasional dan pemeringkat terhadap perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2024 telah menghasilkan 9 laporan dari lembaga internasional, lembaga pemeringkat, dan investor global yang memiliki *tone* positif.

Bank Indonesia secara aktif juga melakukan orkestrasi kegiatan promosi investasi dan perdagangan untuk meningkatkan arus masuk investasi asing. Menghadapi dinamika ekonomi global, Bank Indonesia melakukan pendekatan adaptasi, diversifikasi, dan inovasi dengan fokus pada tiga pilar utama, yaitu: (i) strategi promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas seperti industri yang meningkatkan lapangan kerja, kewirausahaan, dan industri kreatif; (ii) penguatan *market intelligence* melalui KPwLN; dan (iii) penguatan sisi pasokan berupa ketersediaan proyek investasi yang siap dipromosikan serta produk UMKM berkualitas dan memiliki kapasitas produksi yang berkelanjutan. Sepanjang triwulan IV 2024, Bank Indonesia telah memfasilitasi 6 kegiatan promosi melalui *linkage Investor Relation Unit* (IRU)- *Regional Investor Relation Unit* (RIRU)- *Global Investor Relation Unit* (GIRU), meliputi 2 kegiatan investasi dan 4 kegiatan perdagangan, dengan hasil yang positif dan berkelanjutan.

Pada sisi fasilitasi promosi investasi, Bank Indonesia berhasil memfasilitasi penandatanganan MoU antara investor dari Tiongkok dan Balohan *Central Business District* Aceh pada Desember 2024, untuk mendukung pengembangan pusat bisnis di Balohan, Sabang, Aceh. Sementara itu, di bidang fasilitasi promosi perdagangan, dalam kegiatan DMV *Chocolate and Coffee Festival* di New York, AS, pada November 2024, Bank Indonesia berhasil memfasilitasi penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) untuk komitmen impor biji kopi antara *Direct Coffee* (DC) dengan beberapa UMKM kopi, yaitu Wanoja Coffee, Java Frinsa Estate, Nuanza Porcelain Indonesia, dan Klasik Beans Cooperative. Upaya ini menunjukkan dampak signifikan dari strategi fasilitasi promosi terarah Bank Indonesia dalam mendorong investasi dan perdagangan.

30) Terdukungnya kebijakan utama dan kepentingan Bank Indonesia/Republik Indonesia melalui kebijakan dan kerja sama internasional

Bank Indonesia senantiasa memajukan kepentingan Bank Indonesia dan/atau ekonomi Republik Indonesia melalui diplomasi dan/atau negosiasi di forum/ lembaga/kerja sama internasional. Pada triwulan IV 2024, 28 posisi/*stances* Indonesia telah diterima di berbagai forum internasional yang mencakup area stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, sistem pembayaran, keuangan berkelanjutan, dan inklusi ekonomi. Posisi/*stances* Indonesia disampaikan antara lain di rangkaian pertemuan IMF, WB, G20, BIS, ASEAN, ASEAN+3, EMEAP, APEC serta pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara G20 di Washington D.C. pada tanggal 22-26 Oktober 2024, di mana Bank Indonesia menekankan pentingnya koordinasi kebijakan dan langkah yang konsisten dalam menghadapi ketidakpastian global. Selain itu, Bank Indonesia juga menyampaikan *stance* terkait operasionalisasi CMIM-Rapid Financing Facility (CMIM-RFF) yang mendapatkan sambutan positif pada ASEAN+3 *Finance and Central Bank Deputies Meeting* (AFCDM+3).

Dengan keanggotaan baru Gubernur Bank Indonesia pada BIS *Central Bank Governance Group* (CBGG) yang diumumkan pada 11 November 2024, Bank Indonesia berpartisipasi aktif dalam diskusi mengenai *governance, institutional* dan *organizational setting* pada bank sentral dalam pelaksanaan mandat penyusunan kebijakan. Di samping itu, pada pertemuan SEACEN *Board of Governors*, Bank Indonesia menegaskan peran sentral dengan komitmen untuk menjadi *host* pada 5 (lima) kegiatan SEACEN selama 2025 serta kesediaan menjadi *Chair* SEACEN *Board of Governors/Executive Committee* periode 2026.

Bank Indonesia juga menunjukkan wujud nyata *institutional leadership* dalam pengembangan Eksyar di sektor keuangan syariah internasional melalui peran aktif dalam berbagai forum kerja sama internasional. Hal ini tecermin dari keanggotaan dan partisipasi Bank Indonesia pada berbagai forum keuangan syariah internasional, seperti IILM dan IFSB.

Dalam pengembangan keuangan syariah internasional, Bank Indonesia juga berkontribusi aktif dalam forum kerja sama internasional untuk pengembangan keuangan syariah internasional. Bank Indonesia bersinergi dengan berbagai bank sentral negara lain dengan mendirikan lembaga IILM sebagai lembaga yang menerbitkan serta mengelola instrumen likuiditas berbasis syariah dalam bentuk *Short Term Sukuk*, dengan

tenor beragam. Bank Indonesia juga turut berperan aktif melalui *Hosting* penyelenggaraan IILM *Governing Board* (GB) *Meeting* Ke-33 di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2024 yang merupakan bagian dari *Chairmanship* Bank Indonesia di fora IILM sekaligus bentuk kontribusi dan komitmen Bank Indonesia dalam pengembangan lembaga keuangan syariah dan pendalaman pasar keuangan syariah di skala internasional. Sinergi dalam pendalaman pasar keuangan syariah global dilakukan melalui penyelenggaraan BI-IILM-IFSB *Joint High-level International Seminar and Investor Forum* sebagai bagian dari ISEF ke-11 Tahun 2024. Seminar tersebut bertujuan memberikan wawasan praktis untuk pengembangan kebijakan dan solusi keuangan inovatif, mendorong kemitraan strategis antar pemangku kepentingan, serta berkontribusi pada peningkatan kolaborasi internasional dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia terus memperkuat kerja sama jaring pengaman keuangan internasional (JPKI). Upaya ini dilakukan melalui perpanjangan perjanjian *Bilateral Swap Arrangement* antara Bank Indonesia dan Bank Sentral Jepang (*Bank of Japan*). Perjanjian yang ditandatangani pada 14 Oktober 2024 oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Gubernur Bank Sentral Jepang Kazuo Ueda tersebut berlaku efektif mulai tanggal 14 Oktober 2024 hingga 13 Oktober 2027. Pembaruan kerja sama ini memungkinkan Indonesia untuk melakukan penukaran mata uang Rupiah dengan Dolar AS dan/atau Yen Jepang sampai dengan 22,76 miliar dolar AS atau nilai yang setara dalam Yen Jepang. Upaya serupa juga dilakukan bersama *Monetary Authority of Singapore* melalui perpanjangan perjanjian *Bilateral Financial Arrangement* (BFA) yang mencakup LCBSA dan *Bilateral Repo Agreement* (BRA), sehingga mendukung pertukaran mata uang lokal senilai hingga 9,5 miliar dolar Singapura dan memperoleh likuiditas senilai 3 miliar dolar AS. Perpanjangan perjanjian BSA BI-BOJ dan BFA BI-MAS pada triwulan IV tahun 2024 menjadi pelaksanaan strategi intensifikasi Kerjasama Keuangan Internasional (KKI) saat ini agar lebih mendukung upaya pemenuhan kecukupan cadangan devisa sekaligus merepresentasikan peran penting KKI pada area kebanksentralan dalam bauran kebijakan Bank Indonesia.

Bank Indonesia juga terus mendorong transaksi antarnegara dengan menggunakan mata uang lokal melalui inisiatif *Local Currency Transaction* (LCT) sebagai bagian dari diversifikasi mata uang. Strategi yang ditempuh meliputi *refocusing* melalui intensifikasi kerja sama dengan negara mitra yang sudah ada dan

ekstensifikasi dengan mitra baru, serta *restrategizing* melalui sosialisasi 3T (*Targeted*, Terintegrasi, Terencana) yang dikoordinasikan oleh Satgas Nasional LCT, baik di dalam maupun luar negeri. Hingga November 2024, capaian penggunaan LCT mencapai 14,5 miliar dolar AS (rata-rata 1,4 miliar dolar AS per bulan), meningkat 176,4% dari periode sebelumnya, dengan kerja sama LCT terbesar tercatat bersama Tiongkok, diikuti oleh Jepang, Malaysia, dan Thailand, serta peningkatan jumlah pelaku usaha dari 27.580 menjadi 53.273 orang. Sinergi dan kolaborasi dalam implementasi LCT juga ditingkatkan melalui koordinasi Bank Indonesia bersama Kementerian/Lembaga terkait. Bank Indonesia berkoordinasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga anggota Satgas Nasional LCT untuk merumuskan rencana strategis dan program kerja melalui pertemuan teknis Satgas Nasional LCT pada 7-8 November 2024 sebagai tindak lanjut PKS³ pada 29 Agustus 2024.

Lebih lanjut, finalisasi kerja sama LCT antara Indonesia dan Uni Emirat Arab melalui *Joint Working Group* (JWG) menghasilkan kesepakatan operasional yang akan diterapkan pada Triwulan I 2025. Selain itu, intensifikasi LCT dengan Tiongkok dan Jepang dilakukan melalui sinergi dengan otoritas mitra seperti *People's Bank of China* (PBC) dan *Ministry of Finance of Japan* (JMOF), yang dituangkan dalam penyesuaian ketentuan yaitu PADG No. 14 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas PADG Nomor 22/20/PADG/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Antara Indonesia dan Jepang Menggunakan Rupiah dan Yen melalui Bank serta PADG No. 15 tahun 2024 tentang Perubahan Atas PADG Nomor 23/16/PADG/2021 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Tiongkok Menggunakan Rupiah dan Yuan melalui Bank yang diterbitkan pada 10 Oktober 2024.

Bank Indonesia terus memperkuat kerja sama bilateral dengan bank sentral mitra guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya melalui kerja sama kebanksentralan yang lebih terstruktur (*Structured Bilateral Cooperation* atau SBC). Hingga saat ini, Bank Indonesia telah menjalin kerja sama SBC secara intens dengan 13 bank sentral mitra yang menghasilkan kesepakatan berupa program implementasi yang

3 Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Tugas Nasional Transaksi Mata Uang Lokal (*Local Currency Transaction*) tanggal 29 Agustus 2024.

mencakup berbagai area kerja sama, seperti moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran. Penguatan kerjasamatersebutdilakukanmelalui penandatanganan nota kesepahaman dengan *National Bank of Cambodia* efektif 2 Desember 2024 dan pelaksanaan *High Level Meeting* serta diskusi teknis dengan bank sentral mitra

seperti *Bank of England*, *Bank of Japan*, *Bank of Korea*, *Monetary Authority of Singapore*, dan *Central Bank of the Republic of Turkiye*, sehingga mengukuhkan *institutional leadership* Bank Indonesia dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan perekonomian nasional.

Boks 9. Pertemuan Tahunan World Bank dan IMF



Pertemuan Tahunan IMF dan World Bank 2024 di Washington, D.C.

Pada pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB), termasuk di dalamnya pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20, yang diselenggarakan pada 22-26 Oktober 2024 di Washington D.C., Amerika Serikat, Bank Indonesia menegaskan perlunya kebijakan dan langkah yang konsisten dalam menghadapi ketidakpastian global. Bank Indonesia menyerukan pentingnya upaya mengatasi dampak rambatan (*spillover*) dari perekonomian global terhadap negara berkembang. Dalam hal ini keleluasaan penggunaan bauran kebijakan bank sentral, dukungan Lembaga Keuangan Internasional (*International Financial Institution* - IFIs) kepada negara berkembang untuk memperkuat formulasi bauran kebijakan tersebut, dan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dan reformasi struktural sangat diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pada aspek penguatan kerja sama multilateral ini, Bank Indonesia telah menyampaikan kesiapan mendukung implementasi kesepakatan *16th General Review of Quota* yang akan meningkatkan kapasitas IMF sebagai jaring pengaman keuangan global, serta mendorong

penyesuaian formula kuota IMF untuk memperkuat keterwakilan negara berkembang di IMF melalui *17th General Review of Quota*.

Dalam merespons kondisi ekonomi global tersebut, pada pertemuan G20, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20, termasuk Indonesia yang diwakili oleh Deputy Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta serta Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Thomas Djiwandono sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam menjawab tantangan global dan mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kerja sama di berbagai bidang seperti penguatan Bank Pembangunan Multilateral dan Regional dan kelanjutan pengembangan pembayaran lintas batas (*cross border payment*) dipandang akan terus menciptakan peluang bagi pertumbuhan ekonomi global yang lebih baik. Dalam sesi diskusi di sektor keuangan, Bank Indonesia mendukung upaya G20 dalam mengatasi kerentanan Institusi Keuangan Non-Bank (IKNB), pemanfaatan AI, dan transisi hijau yang berdampak pada stabilitas makrofinansial. Bank Indonesia menyampaikan pentingnya keterlibatan dan kolaborasi yang lebih kuat

antara sektor publik dan swasta dalam implementasi dan pemanfaatan pembayaran lintas batas. Selanjutnya, mempertimbangkan kompleksitas dan tantangan dari digitalisasi dalam rangka memastikan kelancaran implementasi *cross border payment*, Bank Indonesia juga menyampaikan pentingnya pengawasan AI, tokenisasi, dan inovasi aset kripto pada pembentukan kerangka peraturan (*regulatory framework*) *cross border payment*. Selanjutnya, Bank Indonesia juga mendorong inklusi keuangan melalui kebijakan ekosistem sistem pembayaran, perlindungan konsumen, literasi keuangan, dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM. Beberapa bank sentral, seperti *Bank of Japan*, juga mendukung posisi Bank Indonesia terkait pentingnya penguatan *regulatory framework* dalam mengatasi risiko dari digitalisasi.

Selanjutnya, pada pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di IMF telah disepakati Agenda Kebijakan Global (*Global Policy Agenda*) IMF untuk mendorong pemulihan ekonomi global serta mengatasi tantangan pertumbuhan dunia. Untuk memastikan pemulihan ekonomi global serta mengatasi tantangan pertumbuhan tersebut, para pembuat kebijakan diharapkan fokus untuk memastikan inflasi sesuai target, menjaga stabilitas sistem keuangan, melakukan konsolidasi fiskal untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, dan melakukan reformasi struktural untuk mendorong produktivitas dan prospek tenaga kerja. Selain itu, baik di pertemuan G20 maupun pertemuan IMF, didapatkan juga kesepakatan dari seluruh negara untuk terus mendorong kerja sama multilateral yang efektif.

PS 10 Merumuskan kebijakan dan mengelola sistem tata kelola kelembagaan yang baik untuk memperkuat kinerja kelembagaan

Bank Indonesia terus melakukan penguatan tata kelola kelembagaan dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia sesuai mandat UU P2SK secara efektif dan efisien. Hal ini tecermin pada: (i) kinerja kelembagaan yang efektif, efisien, dan berkepatuhan; (ii) sustainability dan akuntabilitas keuangan Bank Indonesia yang terjaga; serta (iii) maturitas tata kelola, Manajemen Risiko Bank Indonesia (MRBI), Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia (MKTBI), dan internal audit yang terjaga. Penguatan tersebut dilakukan untuk mencapai kinerja kelembagaan yang kuat dengan pemenuhan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik, profesional, dan akuntabel.

Sepanjang triwulan IV 2024 Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka merumuskan kebijakan dan mengelola sistem tata kelola kelembagaan yang baik untuk memperkuat kinerja kelembagaan sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

31) Terjaganya kinerja kelembagaan yang efektif dan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik

Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia secara konsisten menjagatakelolayangbaikdan profesional yang tecermin pada pencapaian tingkat maturitas tata kelola pada level *Enhanced*. Level *Enhanced* merupakan level tertinggi dalam skala penilaian tingkat maturitas tata kelola. Pada kategori ini, praktik Sistem Tata Kelola Bank Indonesia dipandang telah dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang memadai dengan penerapan yang konsisten, dan telah dilakukan perbaikan secara berkelanjutan. Pencapaian

tersebut didukung melalui berbagai upaya, yakni: (i) pemetaan seluruh mandat Bank Indonesia berdasarkan UU ke dalam ketentuan internal Bank Indonesia; (ii) evaluasi berkala strategi kebijakan jangka menengah dan pendek yang selaras dengan visi dan misi Bank Indonesia; (iii) proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara komprehensif yang didukung oleh organ pendukung pengambilan keputusan yang didasari oleh prinsip Independensi, Konsistensi, Koordinasi, Akuntabilitas, dan Transparansi (IKKAT); (iv) pengelolaan organisasi yang dilakukan secara *end-to-end* guna menciptakan sistem yang terstruktur dan memastikan operasionalisasi Bank Indonesia berjalan efektif; (v) proses manajemen risiko yang ditatakelolakan secara *robust*; (vi) pelaksanaan hubungan dengan pemangku kepentingan baik eksternal maupun internal sesuai strategi yang telah ditetapkan; dan (vii) konsistensi dalam menyampaikan publikasi laporan kelembagaan secara periodik. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam implementasi praktik tata kelola yang baik dan profesional, terdapat sejumlah rekomendasi yang akan dimonitor secara berkala untuk perbaikannya guna memperkuat tata kelola di Bank Indonesia.

32) Terjaganya akuntabilitas dan kinerja keuangan lembaga secara efisien dan *sustainable*

Bank Indonesia telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKTBI tahun 2023 dari BPK-RI untuk yang ke-21 (berturut-turut sejak tahun 2003). Perolehan opini WTP tersebut merupakan wujud komitmen Bank Indonesia untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dengan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik serta menyajikan laporan keuangan yang relevan,

akuntabel, dan transparan sehingga kredibilitas Bank Indonesia sebagai bank sentral tetap terjaga. Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan antara lain melalui pengendalian terhadap realisasi anggaran agar selalu sesuai dengan perencanaan, pengembangan sistem keuangan disertai sosialisasi pengelolaan sumber daya keuangan, dan penguatan fungsi *internal control officer* di masing-masing satuan kerja. Pencapaian opini WTP juga didukung oleh penyelesaian tindak lanjut terhadap pemeriksaan BPK atas LKTBI tahun-tahun sebelumnya guna terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Bank Indonesia.

33) Terwujudnya pengelolaan risiko yang *pre-emptive*, *forward looking*, dan *agile* yang selaras dengan arah strategis kebijakan dan kelembagaan

Bank Indonesia terus menjaga pengelolaan risiko yang *pre-emptive*, *forward looking*, dan *agile*. Hal ini tecermin dengan semakin membaiknya perolehan tingkat maturitas Manajemen Risiko Bank Indonesia (MRBI) dan Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia (MKTBI). Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia telah meraih maturitas MRBI pada level *managed*, sedangkan maturitas MKTBI telah didapatkan pada triwulan sebelumnya yakni pada level Terkuantifikasi Menuju Teroptimasi (*Quantified to Optimize Managed*). Pencapaian MRBI tersebut sebagai representasi pengelolaan risiko telah dijalankan secara sistematis dalam proses bisnis Bank Indonesia yang didukung oleh pelaksanaan manajemen risiko proaktif dan upaya *improvement* terhadap pengelolaan risiko pada semua aspek pelaksanaan tugas dan wewenang di Bank Indonesia. Selain itu, pencapaian maturitas MKTBI menunjukkan bahwa standar proses yang dipersyaratkan oleh *Business Continuity Management System* (BCMS) telah diterapkan dan terdokumentasi dengan baik meliputi kebijakan, proses dan/atau sasaran.

Dalam menjaga kualitas penerapan manajemen risiko, seluruh *output* dari proses kritikal telah diukur, dianalisis, dan dievaluasi. Dari hasil evaluasi, terdapat beberapa *continuous improvement* yang dilakukan terhadap MKTBI mencakup antara lain: (i) pengkinian tugas kritikal; (ii) penguatan ketentuan MKTBI; dan (iii) optimalisasi pelaksanaan MKTBI baik di KP maupun KPw. Sedangkan *continuous improvement* MRBI mencakup antara lain: (i) pemetaan proses integrasi tata kelola; dan (ii) penguatan program pelatihan. Upaya meningkatkan maturitas MRBI dan MKTBI dilakukan sebagai bagian dari penguatan tata kelola kelembagaan Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang sesuai mandat UU P2SK secara efektif dan efisien.

34) Terwujudnya pelaksanaan audit berbasis risiko yang berkualitas untuk mendukung kinerja kelembagaan yang efektif, efisien dan patuh terhadap ketentuan/prosedur

Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia telah berhasil mempertahankan maturitas internal audit pada level *integrated*. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan internal audit di satuan kerja Bank Indonesia telah diterapkan secara menyeluruh dan optimal. Keberhasilan tersebut ditunjukkan melalui pemenuhan seluruh Key Process Area yang menjadi indikator utama dalam IACM Level 3. Area yang telah terpenuhi meliputi *Advisory Services, Performance Audits, Teams Building and Competency, Professionally Qualified Staff, Workforce Coordination, Quality Management Framework, Risk-based Audit Plans, Performance Measures, Cost Information, Internal Audit Management Reports, Coordination with other review groups, Integral component of management team, Management oversight of the internal audit activity dan Funding mechanism*. Pemenuhan seluruh aspek ini menunjukkan bahwa internal audit di Bank Indonesia telah berperan aktif dalam memberikan nilai tambah bagi organisasi, khususnya pada aspek kepatuhan.

Pencapaian ini juga didukung oleh penguatan metodologi audit melalui *revisit* terhadap ketentuan fungsi audit intern serta pengkinian pedoman audit sesuai dengan perkembangan organisasi. Selain itu, Bank Indonesia terus meningkatkan kapabilitas auditor guna memastikan bahwa pelaksanaan fungsi audit intern semakin berkualitas dan sesuai dengan standar profesional.

Sampai dengan triwulan IV 2024, pelaksanaan audit telah berjalan sesuai dengan rencana tahunan, diantaranya melalui pelaksanaan audit strategis dan audit kepatuhan. Dalam rangka menjaga level maturitas internal audit, satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal juga memberikan konsultasi dan rekomendasi kepada satuan kerja sebagai upaya untuk memperkuat tata kelola dan sistem pengendalian di internal satuan kerja. Langkah ini menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan maturitas internal audit di Bank Indonesia agar tetap berada pada level yang optimal.

PS 11 Merumuskan kebijakan, mengembangkan, dan mengelola proses kerja, sumber daya manusia, peraturan dan ketentuan, serta laporan dan komunikasi untuk menjamin tercapainya kinerja kelembagaan secara efisien, profesional, taat hukum, akuntabel, dan transparan

Bank Indonesia terus melakukan penguatan kinerja kelembagaan yang efisien, profesional, taat hukum, akuntabel, dan transparan. Sepanjang triwulan IV 2024 Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka merumuskan kebijakan, mengembangkan, dan mengelola proses kerja, sumber daya manusia, peraturan dan ketentuan, serta laporan dan komunikasi sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

35) Tersedianya SDM yang kompeten, profesional, berintegritas, dan berakhlak mulia

Pada triwulan IV 2024, penguatan pengelolaan SDM yang kompeten, profesional, berintegritas, dan berakhlak mulia dilakukan melalui penerapan strategi perencanaan, pemenuhan, pengembangan, dan pemeliharaan (4P). Pada triwulan IV 2024, strategi pengelolaan SDM difokuskan pada aspek pemenuhan, pengembangan, dan pemeliharaan. Pemenuhan SDM dari internal dilakukan melalui reposisi pegawai dalam bentuk promosi, mutasi, atau rotasi. Sementara itu, pemenuhan dari eksternal dilakukan melalui proses rekrutmen untuk mendapatkan SDM Bank Indonesia yang berkualitas, berprestasi tinggi, dan berakhlak mulia.

Strategi pengembangan SDM dilakukan dengan pemetaan kualitas pegawai berdasarkan asesmen potensi, yang diterapkan pada pegawai dari pangkat Asisten Manajer hingga Deputy Direktur. Asesmen ini bertujuan mengidentifikasi karakter dan kompetensi kepemimpinan secara lebih objektif dengan melihat tiga aspek utama, yaitu *strategic visioning*, *get things done*, dan *coordination (the power of we)*. Hasil dari asesmen tersebut digunakan untuk memperkuat indikator kepemimpinan pegawai di Bank Indonesia. Pengembangan kapabilitas SDM juga dilakukan melalui berbagai program pendidikan, antara lain orientasi untuk calon pegawai baru, *In House Training* untuk seluruh pegawai, program pengembangan kompetensi untuk kelompok pegawai potensial, dan program pengembangan karir untuk pegawai yang promosi. Pada triwulan IV 2024, telah diselenggarakan sejumlah program pengembangan kapabilitas SDM, yaitu *program on boarding* calon pegawai baru yang diikuti oleh 168 peserta sejak awal tahun, program pengembangan kompetensi untuk 21 topik yang diselenggarakan dalam 54 batch kelas dan diikuti oleh 2.899 peserta, program pengembangan karir yang diikuti oleh 494 peserta, program persiapan pegawai tugas belajar (S2 dan S3) yang diikuti oleh 171 peserta, program pengembangan kompetensi untuk pegawai potensial yang diikuti oleh 132 peserta, dan program persiapan masa purnabakti yang diikuti oleh 180 peserta.

Sejalan dengan upaya pengembangan SDM tersebut, Bank Indonesia juga mengimplementasikan Program Aku Bangga BI Bermakna (AB3) sebagai bagian dari strategi peningkatan kesejahteraan pegawai. Program AB3 di tahun 2024 salah satunya dilakukan dengan penguatan pilar kesejahteraan dalam EVP 3.0, yang terdiri dari tiga aspek utama kesejahteraan pegawai. Pertama, *Remunerasi Kompetitif*, yang diberikan dengan prinsip *lead the market* dan *institutional driven* untuk menarik dan memotivasi pegawai. Kedua, *Kesehatan Terpelihara*, yang mengutamakan prinsip preventif guna meningkatkan produktivitas pegawai, dengan fokus awal pada kesehatan fisik sebagai kewajiban (*mandatory*). Ketiga, *Pensiun Tenang*, yang menjamin kesejahteraan pegawai dalam menghadapi masa purnabakti melalui kesiapan finansial, kesehatan, dan pemanfaatan potensi diri. Lebih lanjut, dari sisi budaya kerja, implementasi AB3 juga dijalankan dengan berkolaborasi bersama berbagai komunitas terkait lainnya. Pencapaian implementasi AB3 dinilai berjalan dengan baik dengan tingkat *Culture Maturity Level* (CML) di level *Enable*. Pada level ini, tingkat motivasi dan persepsi pegawai terkait pengalaman kerja di Bank Indonesia berada pada level yang tinggi, kondisi kesehatan mental yang baik (tidak terindikasi stres) serta tingkat kesiapan pegawai bertransformasi digital. Ke depan, budaya kerja akan tetap menjadi pendorong untuk menjaga motivasi pegawai mencapai visi Bank Indonesia.

36) Pemenuhan penerbitan dan pelaksanaan peraturan per-Undang-Undang Bank Indonesia sesuai amanat Undang-Undang dan kebutuhan Bank Indonesia, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia melakukan penyesuaian terhadap sejumlah ketentuan yang ada dan menerbitkan ketentuan baru dalam rangka menjaga kecukupan landasan hukum dalam pelaksanaan tugas. Bank Indonesia telah menerbitkan 61 peraturan yang terdiri dari 11 PBI, 15 PDG, 12 PADG, dan 23 ketentuan internal. Penerbitan ketentuan merupakan pemenuhan terhadap amanat UU P2SK dan kebutuhan Bank Indonesia. Pembentukan peraturan di Bank Indonesia dilakukan melalui: (i) asesmen hukum secara komprehensif di area kebijakan utama dan kebijakan kelembagaan; (ii) proses harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya; serta (iii) koordinasi dengan mitra kerja terkait. Hal tersebut dimaksudkan agar peraturan yang diterbitkan dapat mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia

dan selaras dengan kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta sesuai dengan tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

37) Komunikasi untuk mendukung efektivitas kebijakan serta pemenuhan akuntabilitas dan transparansi

Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga keterbukaan informasi publik dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia secara konsisten memperkuat kolaborasi dan sinergi kelembagaan dengan Kementerian/Lembaga dalam mendorong komunikasi kebijakan. Pada triwulan IV 2024, komunikasi Bank Indonesia diarahkan pada pengelolaan ekspektasi dan literasi mitra kerja sejalan dengan *stance* bauran kebijakan Bank Indonesia. Komunikasi kebijakan diharapkan dapat memperkuat ekspektasi publik terhadap efektivitas kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas (*pro-stability*) dan mendukung pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*), serta kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, dan ekonomi keuangan inklusif dan hijau yang diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*). Bauran kebijakan Bank Indonesia tersebut ditujukan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah, memastikan inflasi terkendali dalam kisaran sasaran, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, komunikasi kebijakan Bank Indonesia juga diharapkan dapat mendorong peningkatan literasi seluruh lapisan masyarakat mengenai *stance* kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia.

Komunikasi bauran kebijakan Bank Indonesia berfokus pada hasil keputusan RDG Oktober, November, dan Desember 2024 yang mempertahankan BI-Rate sebesar 6,00%. Komunikasi intensif dilakukan untuk memperkuat ekspektasi masyarakat bahwa keputusan Bank Indonesia tetap konsisten dengan *stance* kebijakan moneter serta untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025. Terkait pengendalian inflasi, Bank Indonesia mengomunikasikan rangkaian kegiatan sinergi antara Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Daerah, serta berbagai mitra strategis lainnya dalam TPIP dan TPID, di antaranya melalui GNPIP di berbagai daerah. Sementara itu, komunikasi kebijakan *pro-growth* pada triwulan IV 2024 difokuskan pada kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran, seperti penguatan dan *refocusing* KLM, upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia melalui rangkaian kegiatan ISEF

2024, perluasan layanan BI-FAST yang mencakup layanan transfer secara kolektif, dan SERUNAI dalam rangka penguatan strategi menjaga ketersediaan dan kelancaran sistem pembayaran pada periode Nataru.

Bank Indonesia juga secara intensif melaksanakan komunikasi kebijakan melalui berbagai kanal komunikasi kepada beragam mitra kerja yang disasar. Komunikasi Bank Indonesia secara konsisten diarahkan untuk mengelola literasi publik melalui beragam kanal *above the line* (ATL) seperti *website*, media sosial Bank Indonesia, serta media massa. Ada pun komunikasi melalui kanal *below the line* (BTL), antara lain dilakukan melalui konferensi pers, taklimat media, serta FGD dengan ekonom, akademisi, lembaga riset, Kementerian/Lembaga, parlemen, dan media. Kegiatan komunikasi *through the line* (TTL) dilakukan Bank Indonesia melalui kegiatan edukasi yang dipublikasikan pada kanal media sosial Bank Indonesia dan kegiatan komunikasi interaktif yang diselenggarakan oleh Museum Bank Indonesia (MuBI). Melalui berbagai strategi komunikasi dimaksud, keterlibatan aktif mitra kerja Bank Indonesia pada triwulan IV 2024 dapat tetap terjaga. Hal ini tecermin pada persepsi positif-netral dari mayoritas mitra kerja terhadap pesan yang dikomunikasikan Bank Indonesia melalui berbagai kanal.

Selain itu, Bank Indonesia telah mendapatkan sejumlah pengakuan dan apresiasi dalam pengelolaan komunikasi dari lembaga tingkat nasional dan internasional antara lain sbb.:

- Penghargaan kepada Pengelolaan layanan *contact center* BI BICARA, yaitu perolehan 2 medali emas, 2 medali perak, dan 3 penghargaan khusus yaitu *Certified World Class Contact Center in Help Desk*, *Customer Service* dan *Employee Wellness*.
- The Best Contact Center* Indonesia 2024 dengan perolehan *runner up* 3 bagi Bank Indonesia dan perolehan 23 medali terdiri dari 7 platinum, 7 emas, 2 perak, 5 perunggu.
- Pencapaian kembali sebagai "Lembaga Publik Informatif" 2024 dari Komisi Informasi Pusat (KIP).
- Pencapaian kembali ISO 9001:2015 *Quality Management System* untuk pengelolaan Layanan *Contact Centre* BI BICARA, Layanan Museum.
- Penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada Anugerah Media Humas (AMH) tahun 2024 sebagai Terbaik Umum.



Penghargaan *Certified World Class Contact* dalam *Global Top Ranking Performers Awards* 2024

- Penghargaan dari Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2024 untuk Website, Media Sosial, Majalah dan PPID BI dengan perolehan 6 gold dan 4 silver.
- Penghargaan dari *Public Relation Indonesia Award* (PRIA) sebagai peraih penghargaan terbanyak dari 12 sektor yang berbeda.

PS 12 Merencanakan, mengembangkan, dan mengelola teknologi dan inovasi digital serta sarana dan prasarana kerja untuk menjamin tercapainya kinerja kelembagaan yang modern, produktif, dan efektif

Bank Indonesia terus melakukan penguatan pengelolaan sumber daya dan pengelolaan program dalam rangka mencapai kinerja kelembagaan yang modern, produktif, dan efektif. Hal ini tecermin pada: (i) digitalisasi bisnis proses dan digitalisasi data yang selaras dengan transformasi Bank Indonesia; (ii) layanan digital yang andal dan aman; (iii) pengelolaan logistik sesuai standar dan bertatakelola; (iv) perencanaan dan pelaksanaan pengadaan yang terintegrasi, modern dan digital; serta (v) pengelolaan program yang *end-to-end* dan terintegrasi sesuai dengan azas tata kelola yang baik. Penguatan tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan kinerja kebijakan dan kelembagaan yang modern, produktif, dan efektif melalui optimalisasi pemanfaatan inovasi dan informasi digital, sarana dan prasarana modern, serta pengelolaan program yang bertata kelola secara baik.

Sepanjang triwulan IV 2024, Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam rangka merencanakan, mengembangkan, dan mengelola teknologi dan inovasi

digital serta sarana dan prasarana kerja sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

38) Tersedianya teknologi, layanan, dan inovasi digital yang *agile*, *resilient*, dan *intelligent* untuk mendukung implementasi kebijakan dan kelembagaan

Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia memastikan ketersediaan berbagai inovasi dan teknologi serta layanan digital yang *agile*, *resilient*, dan *intelligent* untuk senantiasa mendukung transformasi pada area kebijakan dan kelembagaan. Bank Indonesia telah mengimplementasikan digitalisasi Bank Indonesia sesuai dengan rencana yang sudah disusun, meliputi penyelesaian kegiatan eksplorasi Digital Rupiah untuk cakupan *wholesale cash ledger*, serta perluasan cakupan pengembangan pada area Pusat Data. Pengembangan Pusat Data dilakukan melalui proses pengayaan konten, pengembangan *usecase*, pengembangan *platform* serta pemanfaatan AI/ML. Beberapa pengembangan lainnya juga telah selesai dilakukan untuk mendukung transformasi digital Bank Indonesia, melalui perluasan cakupan *Digital Workplace* khususnya untuk dukungan terhadap pelaksanaan RDG Bulanan.

Bank Indonesia telah berhasil menjaga tingkat keandalan, *availability*, dan keamanan sistem informasi melalui asesmen *Information Technology Service Management (ITSM)* dan *Cyber Security*. Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia berhasil menjaga tingkat maturitas layanan dan keamanan *cyber* dengan baik. Maturitas ITSM dapat tercapai melalui monitoring atas *availability* ketersediaan layanan digital. Bank Indonesia juga senantiasa menjaga maturitas *cyber*

security melalui *review* dan penguatan terhadap sistem keamanan siber Bank Indonesia.

39) Terwujudnya layanan prima dan sarana dan prasarana kerja kelogistikan yang selaras dengan arah strategis kebijakan dan kelembagaan

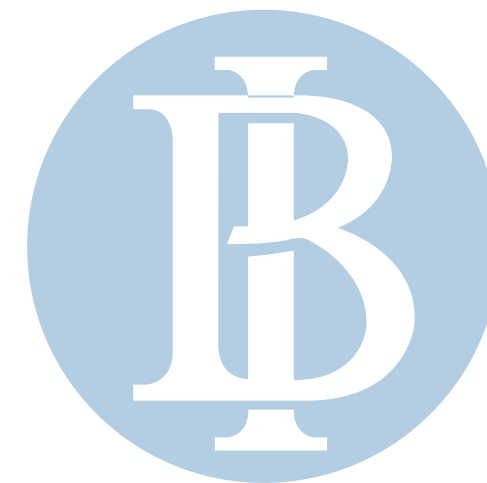
Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia senantiasa berupaya mewujudkan layanan kelogistikan yang berkualitas untuk aplikasi BI-RTGS, BI-SSSS, SKNBI, BI-ETP, dan BI-FAST. Penyediaan layanan kelogistikan telah dilakukan secara optimal yang tecermin pada kualitas layanan yang memenuhi standar Bank Indonesia. Hal ini dicapai antara lain dengan memastikan *supply* daya listrik secara kontinu 24/7 serta memastikan kualitas tegangan dan frekuensi listrik dicapai secara optimal melalui instalasi peralatan pendukung kelistrikan pada aplikasi kritikal. Di sisi lain, Bank Indonesia turut menjalin kemitraan strategis dengan PLN dan pelaksana operasional pemeliharaan guna memastikan kualitas layanan listrik pada aplikasi kritikal selalu dalam kondisi yang prima sehingga mendukung operasionalisasi aplikasi dapat berjalan 24/7.

40) Terwujudnya perencanaan dan pengadaan strategis secara profesional serta sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku

Pada triwulan IV 2024, Bank Indonesia melakukan *Procurement Maturity Assessment* (PMA) sebagai bagian dari kegiatan asesmen tahunan untuk menilai tingkat maturitas pengadaan di Bank Indonesia. Penilaian tingkat maturitas ditujukan dalam rangka memperkuat tata kelola pengadaan, serta

mewujudkan perencanaan dan pengadaan strategis secara profesional, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Penguatan maturitas pengadaan Bank Indonesia tahun 2024 difokuskan pada perencanaan dan pelaksanaan pengadaan yang terintegrasi, *modern* dan digital. Hal tersebut dicapai melalui strategi transformasi pengadaan, yakni: (i) reformasi regulasi; (ii) reorganisasi dan *business process re-engineering*; serta (iii) pengembangan digitalisasi pengadaan secara menyeluruh (*end-to-end*). Berbagai penguatan yang telah dilakukan antara lain melalui penguatan pengelolaan hubungan penyedia (*supplier relationship management*) dan implementasi *modern strategic sourcing* diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran maturitas pengadaan di level *strategic*.

Penilaian PMA dilakukan oleh pihak ahli eksternal dengan menerapkan model maturitas pengadaan sesuai implementasi terbaik, yakni model *Procurement Excellent Plus*, untuk menilai kematangan fungsi pengadaan sebuah organisasi secara holistik mencakup aspek strategi, operasional, organisasi, dan teknologi. Pada triwulan IV 2024, telah diperoleh penilaian PMA yang mencapai level *proactive*. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan serta operasional pengadaan telah dilakukan secara strategis, kolaboratif, terintegrasi, dan berorientasi pada kinerja, guna mendukung keberhasilan strategi dan pencapaian target kinerja organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengadaan di Bank Indonesia telah didukung oleh standardisasi proses dan tata kelola yang baik, serta telah menggunakan strategi dan perencanaan yang optimal.





Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara

LAMPIRAN

DAFTAR ISTILAH

ISTILAH	PENJELASAN
3I	Integrasi, interkoneksi, interoperabilitas yang menggambarkan bentuk keterhubungan antarinfrastruktur pasar keuangan.
3-Smart	Program kepemimpinan Bank Indonesia untuk menciptakan pemimpin yang profesional yang memiliki kompetensi (<i>book smart</i>), berpengalaman (<i>street smart</i>), dan memiliki perilaku mulia (<i>spiritual smart</i>).
Advanced Release Calendar	Sistem yang digunakan untuk menjadwalkan dan merilis informasi penting atau data ekonomi sebelum tanggal rilis resmi.
Agile	Kemampuan untuk bergerak cepat dan mudah
Bantuan Sosial	Pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
Bauran Kebijakan Bank Indonesia	Penggunaan beberapa kebijakan oleh Bank Indonesia, baik berupa kebijakan moneter, makprudensial, sistem pembayaran maupun kebijakan pendukung lainnya.
Bauran Kebijakan Kelembagaan	Penggunaan beberapa kebijakan pada area kelembagaan dengan basis kinerja efektif, efisien, dan kepatuhan/ <i>compliance</i> . Hal ini diperlukan sebagai langkah dalam memastikan keseimbangan antara memastikan tercapainya mandat Bank Indonesia melalui kinerja yang efektif dengan upaya mendorong produktivitas sumber daya secara efisien, serta memastikan ketaatan hukum dan akuntabilitas melalui tata kelola yang baik.
Electronic Trading Platform	Infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi yang dilakukan secara elektronik.
Bank Indonesia – Real-Time Gross Settlement	Sistem transfer dana secara elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
BI-FAST	Layanan sistem pembayaran yang dilakukan secara <i>real time</i> dan 24/7, yang mempercepat proses penyelesaian transaksi dan akan menggantikan SKNBI.
BI-Payment Clear dan BI-Payment Info	Infrastruktur untuk mendeteksi anomali transaksi dan potensi fraud di sektor keuangan.
Blueprint	Kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit kerja.
Cadangan devisa	Cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia yang tercatat pada sisi aktiva neraca Bank Indonesia, yang antara lain berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan dalam bentuk giro, deposito berjangka, wesel, surat berharga luar negeri dan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri.

ISTILAH	PENJELASAN
Capital Adequacy Ratio	Rasio kecukupan modal bank yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).
Central Bank Digital Currency	Mata uang digital yang diterbitkan dan peredarannya dikontrol oleh bank sentral, dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk menggantikan uang kartal.
Central Clearing	Mekanisme penyelesaian transaksi keuangan yang dikelola oleh CCP untuk mengurangi risiko gagal bayar, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan efisiensi pasar.
Central Counterparty	Lembaga kliring yang mengambil alih risiko <i>counterparty</i> dari transaksi antar pelaku pasar melalui proses novasi dan melakukan multilateral <i>netting</i> atas eksposur transaksi para pelaku pasar.
Collaborative Workplace	Lingkungan kerja yang menekankan kerja sama tim, komunikasi terbuka, dan teknologi pendukung untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, serta efisiensi.
Composability	Kemampuan berbagai komponen atau aplikasi keuangan untuk saling berintegrasi dan beroperasi bersama.
Contagion Analysis	Analisis yang digunakan untuk memahami bagaimana krisis keuangan, kejutan pasar, atau risiko tertentu menyebar dari satu entitas atau sektor ke sektor lainnya dalam sistem ekonomi atau keuangan.
Countercyclical Capital Buffer	Tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (<i>buffer</i>) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit dan/atau pembiayaan perbankan yang berlebihan (<i>excessive credit growth</i>) sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.
Counterparty Line	Jumlah kredit atau limit eksposur yang diberikan oleh satu pihak kepada <i>counterparty</i> dalam transaksi keuangan.
Cross Border	Lintas batas, lintas negara.
Cyber Library	Perpustakaan digital yang memungkinkan akses cepat dan luas ke berbagai sumber akademik dan literatur melalui internet, mendukung pembelajaran dan riset modern.
Cyber Patrol	Sistem atau layanan pemantauan keamanan siber yang bertugas mengawasi, mendeteksi, dan merespons ancaman siber secara proaktif.
Dana Pihak Ketiga	Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada perbankan berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Data-driven Institution	Organisasi atau lembaga yang mendasarkan pengambilan keputusan dan strateginya pada analisis data.
Data Lake	Tempat penyimpanan data mentah dalam jumlah besar yang fleksibel dan digunakan untuk analisis lanjutan seperti <i>Big Data</i> , AI, dan <i>machine learning</i> .

ISTILAH	PENJELASAN
<i>Data Preparation</i>	Proses menyiapkan data mentah agar lebih bersih, terstruktur, dan siap digunakan dalam analisis atau machine learning, sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat dan efektif.
<i>Data Repository Loader</i>	Proses atau alat yang digunakan untuk memuat data ke repositori penyimpanan (seperti <i>Data Warehouse</i> atau <i>Data Lake</i>) dengan memastikan integritas, efisiensi, dan kesiapan data untuk analisis atau kebutuhan bisnis.
<i>Data Visualization</i>	Penyajian data dalam bentuk visual agar lebih mudah dipahami, dianalisis, dan dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efektif.
<i>Dedicated Meeting</i>	Pertemuan yang secara khusus diadakan untuk membahas satu topik atau tujuan tertentu dengan fokus penuh, tanpa gangguan dari agenda lain.
Derivatif	Instrumen turunan yaitu kontrak, perjanjian, atau transaksi yang nilainya diturunkan dari suatu instrumen keuangan.
Devisa	Sejumlah emas atau valuta asing yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional.
Digitalisasi	Proses alih media dari bentuk fisik, tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital.
Digital BPR	Pendekatan komprehensif untuk mendesain ulang dan mengoptimalkan proses bisnis berbasis digital dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kemampuan beradaptasi, antara lain mencakup aspek pengambilan keputusan, manajemen informasi, <i>digital environment</i> , dan pola kerja.
<i>Domestic Non-Deliverable Forward</i>	Transaksi derivatif standar (<i>plain vanilla</i>) berupa transaksi <i>forward</i> yang dilakukan dengan mekanisme <i>fixing</i> dan mata uang penyelesaiannya dalam Rupiah.
<i>Dynamic Systemic Risk Surveillance</i>	Kerangka pengawasan yang bersifat <i>forward looking</i> dan terintegrasi dengan mempertimbangkan seluruh informasi pengawasan yang menjadi kewenangan Bank Indonesia.
Ekspor	Proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain.
Elektronifikasi	Mengubah cara pembayaran yang semula menggunakan tunai menjadi nontunai.
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah dari cara tunai menjadi nontunai berbasis digital.
<i>Employee Value Proposition</i>	Nilai tambah yang ditawarkan pegawai dan sebagai imbalan atas kontribusi terhadap perusahaan.
<i>End-to-end</i>	Kebijakan yang dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan inklusif.
<i>Epicentrum of Change</i>	Titik utama atau pusat dari suatu perubahan besar yang berdampak luas dalam ekonomi, teknologi, sosial, atau pemerintahan.
<i>Financial Market Infrastructure</i>	Sistem multilateral antar lembaga peserta (langsung), termasuk operator sistem, yang digunakan untuk kliring atau pencatatan pembayaran, surat berharga, derivatif, atau transaksi keuangan lainnya.
<i>Financing to Value</i>	Rasio pembiayaan yang diberikan bank terhadap nilai aset.

ISTILAH	PENJELASAN
<i>Forward looking</i>	Kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi pada periode yang akan datang karena mempertimbangkan adanya efek tunda/ <i>time lag</i> kebijakan moneter.
<i>Fx Forward Curve</i>	Kurva yang menggambarkan nilai tukar forward (kurs berjangka) untuk berbagai tenor (jangka waktu).
<i>Hedging</i>	Kegiatan yang dilakukan oleh investor untuk mengurangi atau menghilangkan suatu sumber risiko.
HLM	<i>High Level Meeting</i>
Impor	Kegiatan membeli barang dari luar negeri.
<i>Imported Inflation</i>	Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga barang yang berasal dari luar negeri akibat dampak perubahan nilai tukar.
<i>Indirect Clearing</i>	Mekanisme kliring di mana peserta pasar yang tidak memiliki akses langsung ke Central Counterparty (CCP) menggunakan perantara (clearing member) untuk menyelesaikan transaksi mereka.
IndONIA	Indeks suku bunga atas transaksi pinjam-meminjam Rupiah tanpa agunan yang dilakukan antarbank untuk jangka waktu <i>overnight</i> di Indonesia.
Inflasi	Keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunannya daya beli. Terdapat dua jenis sumber inflasi, yaitu inflasi yang disebabkan oleh dorongan biaya (<i>cost-push</i>) dan inflasi karena meningkatnya permintaan (<i>demand-pull</i>).
Inflasi inti	Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditas internasional, inflasi mitra dagang dan ekspektasi inflasi. Inflasi inti diperoleh dari angka inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen <i>volatile foods</i> dan <i>administered prices</i> .
Integrasi	Penyatuan infrastruktur <i>post trade</i> dalam satu institusi yang sama untuk rantai nilai (<i>value chain</i>) layanan transaksi.
Interkoneksi	Kemampuan antarsistem bertukar informasi atau bertransaksi membutuhkan perantara, atau dengan kata lain interkoneksi antar sistem terjadi secara tidak langsung.
Interoperabilitas	Kemampuan dua sistem untuk berkomunikasi atau bertransaksi secara langsung.
Investasi	Akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal.
<i>Investor Outreach</i>	Strategi atau upaya untuk menjangkau, berkomunikasi, dan menarik investor potensial agar tertarik berinvestasi dalam aset, proyek, atau instrumen keuangan tertentu.
<i>Joint Audit</i>	Proses audit keuangan yang dilakukan oleh dua atau lebih firma audit secara bersamaan untuk menilai laporan keuangan suatu entitas.

ISTILAH	PENJELASAN
Kuangan digital	Kuangan yang menggunakan sarana teknologi digital seperti seluler atau <i>web</i> melalui pihak ketiga.
Kuangan inklusif	Suatu bentuk pendalaman layanan keuangan untuk masyarakat bawah untuk dapat memanfaatkan produk keuangan formal.
Klaster	Kelompok usaha yang saling berhubungan atau sentra UMKM.
<i>Lead the Market</i>	Memimpin dalam industri atau segmen tertentu dengan inovasi, keunggulan kompetitif, atau strategi yang lebih unggul dibandingkan pesaing.
Likuiditas	Kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat; sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya.
<i>Loan to Value</i>	Rasio pinjaman yang diberikan bank terhadap nilai aset.
<i>Local Currency Transaction</i>	Transaksi bilateral antar dua negara dengan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara, untuk mendiversifikasi <i>currency exposure</i> .
Makroprudensial	Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan.
<i>Market Maker</i>	Pihak yang secara aktif menyediakan likuiditas dengan menawarkan harga beli (bid) dan harga jual (ask) dalam transaksi pasar uang.
<i>Modern Strategic Sourcing</i>	Pendekatan strategis dalam pemilihan dan manajemen pemasok yang mengutamakan efisiensi, inovasi, keberlanjutan, dan teknologi untuk meningkatkan nilai bisnis serta mengoptimalkan rantai pasok.
<i>Money Market Curve</i>	Kurva yang menggambarkan hubungan antara tenor (jangka waktu) dan suku bunga instrumen pasar uang.
<i>National Driven</i>	Pendekatan atau strategi yang berfokus pada tujuan, kepentingan, dan prioritas suatu negara, dengan dorongan kuat dari pemerintah atau institusi nasional untuk mencapai visi atau target tertentu.
Neraca Pembayaran Indonesia	Suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial.
<i>Net inflows</i>	selisih antara total kontribusi atau pembelian baru (inflows) dan total penarikan atau penjualan (outflows) dari suatu investasi atau entitas.
<i>Non Performing Loan</i>	Kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet.
<i>Online</i>	Daring atau dalam jaringan, yaitu terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya.

ISTILAH	PENJELASAN
Operasi Moneter	Pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan Koridor Suku Bunga (<i>Standing Facilities</i>).
<i>Outstanding</i>	Jumlah yang masih berjalan, beredar, atau belum lunas dalam suatu instrumen keuangan.
Penyangga Likuiditas Makroprudensial	Instrumen makroprudensial yang dirumuskan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas perbankan. PLM mensyaratkan bank untuk memiliki <i>buffer</i> likuiditas dalam bentuk SSB dalam besaran tertentu dari dana pihak ketiga (DPK) Rupiah.
Penanaman Modal Asing	Kegiatan memasukkan modal atau investasi baik nyata maupun tidak nyata dari suatu negara ke negara lain untuk melakukan kegiatan usaha atau mengelola operasi perusahaan dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal baik secara total atau sebagian.
Penyelesaian secara <i>close-out netting</i>	Mekanisme penyelesaian transaksi keuangan yang menghitung kewajiban pembayaran secara bersih, setelah terjadi <i>default</i> atau gagal bayar dari salah satu pihak
<i>Portfolio Inflows</i>	Investasi portofolio yang dilakukan oleh bukan penduduk Indonesia di Negara Indonesia
<i>Price Discovery</i>	Proses pembentukan harga yang mencerminkan nilai wajar suatu aset berdasarkan interaksi antara penjual dan pembeli di pasar.
<i>Primary Dealer</i>	Institusi yang disetujui oleh bank sentral atau otoritas moneter untuk berpartisipasi dalam pembelian dan penjualan obligasi pemerintah secara langsung dari pemerintah.
<i>Pro-growth</i>	Kebijakan yang ditempuh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
<i>Pro-stability</i>	Kebijakan yang ditempuh untuk menjaga stabilitas ekonomi.
<i>Programmability</i>	Kemampuan sistem keuangan untuk membuat kontrak dan instruksi keuangan yang dapat dijalankan secara otomatis sesuai aturan yang telah ditetapkan sebelumnya
<i>Project Based</i>	Pendekatan kerja yang berfokus pada penyelesaian proyek dengan tim khusus, batas waktu tertentu, dan hasil yang terukur.
Proyek Garuda	Sebuah inisiatif yang memayungi eksplorasi desain <i>Central Bank Digital Currency</i> (CBDC) Indonesia yang kemudian disebut Rupiah Digital.
<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> (QRIS)	Standar <i>QR Code</i> pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).
QRIS <i>Cross Border</i> /Lintas Negara	Salah satu inisiatif kolaboratif untuk membangun standarisasi infrastruktur setelmen untuk perdagangan lintas batas.

ISTILAH	PENJELASAN
Rasio Intermediasi Makroprudensial	Penyempurnaan kebijakan GWM LFR yang dilakukan dengan memperluas komponen intermediasi, yakni menambahkan surat-surat berharga (SSB) yang dimiliki bank sebagai komponen pembiayaan. Namun, hanya SSB dengan persyaratan tertentu yang dapat diperhitungkan sebagai komponen RIM, antara lain: diterbitkan oleh korporasi nonkeuangan dan memiliki peringkat setara dengan peringkat investasi.
Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial	Penyempurnaan dari kebijakan rasio kredit UMKM antara lain melalui perluasan mitra bank dalam penyaluran pembiayaan inklusif, sekuritisasi pembiayaan inklusif, dan model bisnis lain dalam rangka memperkuat kebijakan makroprudensial akomodatif
Rasio Pembiayaan Luar Negeri	
Regional Payment Connectivity (RPC)	Perjanjian kerja sama konektivitas pembayaran di kawasan yang disepakati oleh Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, Bangko Sentral ng Pilipinas, Monetary Authority of Singapore, Bank of Thailand.
Reformasi Regulasi	Proses perubahan, penyempurnaan, atau penyederhanaan regulasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas kebijakan dalam suatu sektor atau industri.
Repurchase Agreement (Repo)	Transaksi penjualan instrumen keuangan antara dua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan pembelian kembali atas instrumen keuangan yang sama dengan harga tertentu yang disepakati.
Rupiah Digital	Bentuk digital mata uang Rupiah.
Sandbox	Uji coba terbatas dalam lingkungan yang terkontrol sebelum sistem atau fitur baru diterapkan secara luas.
Seamless	Sistem atau proses yang berjalan lancar, otomatis, dan tanpa hambatan.
Sistem Pembayaran	Sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain.
Spot	Transaksi valas dengan penyelesaian pada hari yang sama atau maksimal dalam dua hari.
Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP)	Standar Nasional Open API Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia guna menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif; mendorong integrasi, interkoneksi, interoperabilitas, serta keamanan dan keandalan infrastruktur sistem pembayaran; dan/atau meningkatkan praktik pasar (<i>market practice</i>) yang sehat, efisien, dan wajar dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.
Straight-through	Pemrosesan otomatis yang dilakukan dalam transaksi bisnis
Streamlining	Peningkatan efisiensi suatu proses tertentu dalam suatu organisasi
Stress test	Uji ketahanan.

ISTILAH	PENJELASAN
Supplier Relationship Management	Strategi dan proses yang digunakan perusahaan untuk mengelola hubungan dengan pemasok secara efektif, dengan tujuan meningkatkan efisiensi rantai pasok, mengurangi risiko, dan menciptakan nilai tambah dalam bisnis.
Surat Berharga Negara	Surat berharga yang terdiri dari Surat Utang Negara dalam mata uang Rupiah dan Surat Berharga Negara Syariah dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Tim lintas instansi yang melakukan pemantauan perkembangan inflasi daerah dan mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait pengendalian inflasi.
Tokenization	Proses digitalisasi aset nyata menjadi token yang dapat diperdagangkan di blockchain.
Transformasi kelembagaan	Transformasi yang mencakup penguatan organisasi dan proses kerja, SDM dan budaya kerja, serta digitalisasi.
Uang Elektronik	Alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang telah disetorkan terlebih dahulu.
Uang Layak Edar	Uang Rupiah asli yang memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Underlying Asset	Aset yang menjadi dasar dari instrumen finansial atau investasi.
Volatile Food	Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh <i>shocks</i> (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.
Wajar Tanpa Pengecualian	Pendapat wajar tanpa pengecualian, diberikan auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Waste to Energy	Proses mengubah limbah menjadi energi yang dapat dimanfaatkan, seperti listrik, panas, atau bahan bakar.
Wholesale Rupiah Digital Cash Ledger	Sistem pencatatan digital berbasis ledger untuk transaksi Rupiah Digital dalam skala wholesale.

DAFTAR SINGKATAN

ISTILAH	PENJELASAN
3I	Integrasi, Interkoneksi, Interoperabilitas
3S	Simplifikasi, Standardisasi, dan Sistemisasi
3T	Terdepan, Terluar, dan Terpencil
3P + 1I	<i>Product, Pricing</i> , Pelaku dan Infrastruktur
4P	Perencanaan, Pemenuhan, Pengembangan, Pemeliharaan
AB3	Aku Bangga BI Bermakna
ACC-BIS	The Council dari Asian Consultative Council – Bank for International Settlement
ACCD	<i>Appointed Cross Currency Dealers</i>
AI	Artificial Intelligence
AL	Alat Likuid
AL/DPK	Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga
APUVINDO	Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia
AS	Amerika Serikat
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
ASPI	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia
ATL	<i>Above The Line</i>
ATM	<i>Automated Teller Machine</i> /Anjungan Tunai Mandiri
ATM/D	<i>Automated Teller Machine/Deposit</i> .
BTL	<i>Below The Line</i>
BBWI	Bangga Berwisata #DiIndonesiaAja
BCMS	<i>Business Continuity Management System</i>
BI-ETP	Bank Indonesia – <i>Electronic Trading Platform</i>
BI-FAST	Bank Indonesia – <i>Fast Payment</i>

ISTILAH	PENJELASAN
BI-RTGS	Bank Indonesia – <i>Real Time Gross Settlement</i>
BIS	<i>Bank for International Settlements</i>
BKBI	Bauran Kebijakan Bank Indonesia
BKK	Bauran Kebijakan Kelembagaan
BNM	Bank Negara Malaysia
BoP	<i>Balance of Payments</i>
BoT	Bank of Thailand
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPPU	<i>Blueprint</i> Pengembangan Pasar Uang
BPR	Business Process Reengineering
BSBI	Badan Supervisi Bank Indonesia
BSP	Bangko Sentral ng Pilipina
BSPI	<i>Blueprint</i> Sistem Pembayaran
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUSN	Bank Umum Swasta Nasional
CAR	<i>Capital Adequacy Ratio</i>
CBDC	<i>Central Bank Digital Currency</i>
CBUAE	Bank Sentral Uni Emirat Arab
CCP	<i>Central Counterparty</i>
CCyB	<i>Countercyclical Capital Buffer</i>
CKPN	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
CML	<i>Culture Maturity Level</i>
CP	<i>Consultative Paper</i>
CPIS	<i>Coordinated Portfolio Investment Survey</i>
DC	Data Center
DMP	<i>Decision Making Process</i>
DNDF	<i>Domestic Non-Deliverable Forward</i>
DPK	Dana Pihak Ketiga

ISTILAH	PENJELASAN
DPR-RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPSP	Destinasi Pariwisata Super Prioritas
DSRS	<i>Dynamic Systemic Risk Surveillance</i>
EKD	Ekonomi Keuangan Digital
EMEAP	Executives Meeting of East Asia Pacific Central Banks
ERB	Ekspedisi Rupiah Berdaulat
ETP	<i>Electronic Trading Platform</i>
ETP	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah
EVP	<i>Employee Value Proposition</i>
FAQ	<i>Frequently Asked Question</i>
FATF	Financial Action Task Force
FEB	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
FEKDI	Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia
FFR	<i>Fed Funds Rate</i>
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
FK-PPPK	Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan
FSAP	<i>Financial Sector Assessment Program</i>
FSI	<i>Financial Soundness Indicators</i>
G20	<i>Group of Twenties</i>
GBBI	Gerakan Bangga Buatan Indonesia
GIRU	<i>Global Investor Relation Unit</i>
GNPIP	Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan
GFXC	<i>Global Foreign Exchange Committee</i>
HLM	<i>High Level Meeting</i>
IACM	<i>Internal Audit Capability Model</i>

ISTILAH	PENJELASAN
IIP	<i>International Investment Position</i>
IKKAT	Independensi, Konsistensi, Koordinasi, Akuntabilitas, dan Transparansi
IKN	Ibu Kota Nusantara
IKNB	Institusi Keuangan Non-Bank
IKU	Indikator Kinerja Utama
IMF	<i>International Monetary Fund</i>
INFRATANI	<i>Integrated Farming with Technology Information and Society</i>
IPK	Infrastruktur Pasar Keuangan
IndONIA	Indonesia Overnight Index Average
INDRA	<i>Integrated Analytic Data Repository and Analytic</i>
IRFCL	<i>International Reserves and Foreign Currency Liquidity</i>
IRU	<i>Investor Relation Unit</i>
IHT	<i>In House Training</i>
ISDA	<i>International Swaps and Derivatives Association</i>
ISEF	<i>Indonesia Sharia Economic Festival</i>
ISO	International Organization of Standardization
ITSM	<i>Information Technology Service Management</i>
JIBOR	<i>Jakarta Interbank Offered rate</i>
JKD	Jaringan Komunikasi Data
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
K/L	Kementerian/Lembaga
KCBA	Kantor Cabang Bank Asing
KKI	Karya Kreatif Indonesia
KKI	Kartu Kredit Indonesia

ISTILAH	PENJELASAN
KKI	Kerja Sama Keuangan Internasional
KKKM	Kerangka Kerja Kebijakan Moneter
KKMP	Kerangka Kerja Kebijakan Makroprudensial
KKNI	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
KKSP	Kerangka Kerja Sistem Pembayaran
KLM	Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
KOPERBI	Komplek Perkantoran Bank Indonesia
KSSK	Komite Stabilitas Sistem Keuangan
KUPVA BB	Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
KUR	Kredit Usaha Rakyat
LAPS	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
LCT	<i>Local Currency Transaction</i>
LGA	Listrik-Gas-Air
LKTBI	Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia
LMS	<i>Learning Management System</i>
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
LRUK	Limbah Racik Uang Kertas
LSB	Lembaga Selain Bank
LU	Lapangan Usaha
MAS	<i>Monetary Authority of Singapore</i>
MCoC	<i>Market Code of Conduct</i>
MDR	<i>Merchant Discount Rate</i>
ME FATF	<i>Mutual Evaluation by the Financial Action Task Force</i>
MKTBI	Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia
ML	<i>Machine Learning</i>
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>

ISTILAH	PENJELASAN
MuBI	Museum Bank Indonesia
MRBI	Manajemen Risiko Bank Indonesia
Nataru	Natal dan Tahun Baru
NCCD	<i>Non Centrally Cleared Derivative</i>
NK	Nota Kesepahaman
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NPI	Neraca Pembayaran Indonesia
NPL	<i>Non Performing Loan</i>
NWGBR	<i>National Working Group on Benchmark Reform</i>
UMI	Usaha Mikro
UMi	Ultramikro
OECD	<i>Organization for Economic Co-operation and Development</i>
OG	<i>Operational Guidelines</i>
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
OM	Operasi Moneter
P2DD	Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
P2SK	Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
PADG	Peraturan Anggota Dewan Gubernur
PBI	Peraturan Bank Indonesia
PCPM	Pendidikan Calon Pegawai Muda
PDB	Produk Domestik Bruto
PDG	Peraturan Dewan Gubernur
Perpres	Peraturan Presiden
Pemda	Pemerintah Daerah
PFMI	<i>Principles for Financial Market Infrastructures</i>
PII	Posisi Investasi Internasional
PIP	Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran

ISTILAH	PENJELASAN
PJP	Penyedia Jasa Pembayaran
PKWT	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
PLM	Penyangga Likuiditas Makroprudensial
PKS	Perjanjian Kerja Sama
PMA	<i>Procurement Maturity Assessment</i>
PMK	Program Meningkatkan Kompetensi
PMK	Protokol Manajemen Krisis
PPSPM	Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
PoC	<i>Proof of Concept</i>
PRM	Pariwisata Ramah Muslim
PSN	Proyek Strategis Nasional
PSP	Penyelenggara Sistem Pembayaran
PTBI	Pertemuan Tahunan Bank Indonesia
PUR	Pengelolaan Uang Rupiah
PUVA	Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
PQN	Pekan QRIS Nasional
QRIS	<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>
QRIS TUNTAS	QRIS Tarik Tunai, Transfer, Setor Tunai
RDG	Rapat Dewan Gubernur
Repo	<i>Repurchase Agreement</i>
RIM	Rasio Intermediasi Makroprudensial
RIRU	<i>Regional Investor Relation Unit</i>
RPC	<i>Regional Payment Connectivity</i>
RPIM	Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial
RPLN	Rasio Pendanaan Luar Negeri
RRH	Rata-Rata Harian
SBC	<i>Structured Bilateral Cooperation</i>
SBDK	Suku Bunga Dasar Kredit
SBN	Surat Berharga Negara

ISTILAH	PENJELASAN
SBV	State Bank of Vietnam
SDM	Sumber Daya Manusia
SEKDA	Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah
SEKI	Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia
SERUNAI	Semarak Rupiah di Hari Natal Penuh Damai
SIAPIK	Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan
SIMA	Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank
SiKA	Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank
SiPA	Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank
Simkrisnas	Simulasi Krisis Nasional
SKNBI	Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
SNAP	Standar Nasional <i>Open API</i>
SNLIEKSI	Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia
SN-PPPK	Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan
SPBI	Sistem Pembayaran Bank Indonesia
SPIP	Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan Indonesia
SP-PUR	Sistem Pembayaran-Pengelolaan Uang Rupiah
SRBI	Sekuritas Rupiah Bank Indonesia
SSK	Stabilitas Sistem Keuangan
SSKI	Statistik Sistem Keuangan Indonesia
STP	<i>Straight Through Processing</i>
SULNI	Statistik Utang Luar Negeri Indonesia
SupTech	<i>Supervisory Technology</i>
SKKNI	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

ISTILAH	PENJELASAN
SUVBI	Sukuk Valas Bank Indonesia
SVBI	Sekuritas Valas Bank Indonesia
TIKMI	Transaksi, Interkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko, dan Infrastruktur Teknologi
ToT	<i>Training of Trainer</i>
TPID	Tim Pengendalian Inflasi Daerah
TPIP	Tim Pengendalian Inflasi Pusat
TPPT	Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
TPPU	Tindak Pidana Pencucian Uang
UE	Uang Elektronik
UGM	Universitas Gajah Mada
UI	Universitas Indonesia
ULE	Uang Layak Edar
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah

ISTILAH	PENJELASAN
UPB	Uang Pecahan Besar
UPK	Uang Pecahan Kecil
UU	Undang-Undang
UU P2SK	Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
UYD	Uang Kartal Yang Diedarkan
Valas	Valuta Asing
VITAL	<i>Visualizing the outcomes, Theory understood, Algorithm fitted, dan Learn the meaning</i>
VF	<i>Volatile Food</i>
WB	World Bank
WTE	<i>Waste to Energy</i>
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
yoy	<i>Year on Year</i>





Jl. MH Thamrin No. 2 Jakarta 10350
www.bi.go.id